

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
Jalan Sukapura VI Bojongkoneng Singaparna Telepon (0265) 330163
fax (02650) 330163 email : disperta@tasikmlayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026 telah dapat kami susun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk merencanakan pembangunan pertanian, pangan dan perikanan selama lima tahun secara bertahap.

Harapan kami dengan Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman, referensi, acuan dan arah kegiatan pembangunan pertanian bagi seluruh komponen yang merupakan pelaku pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Tasikmalaya.

Kami sadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan kedepan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



NURAEDIDIN, S.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650504 198403 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau Lembaga pemerintah non

kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya disusun atas dasar kebutuhan organisasi untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang sehingga ada pengakuan (*recognized*) dan respon dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

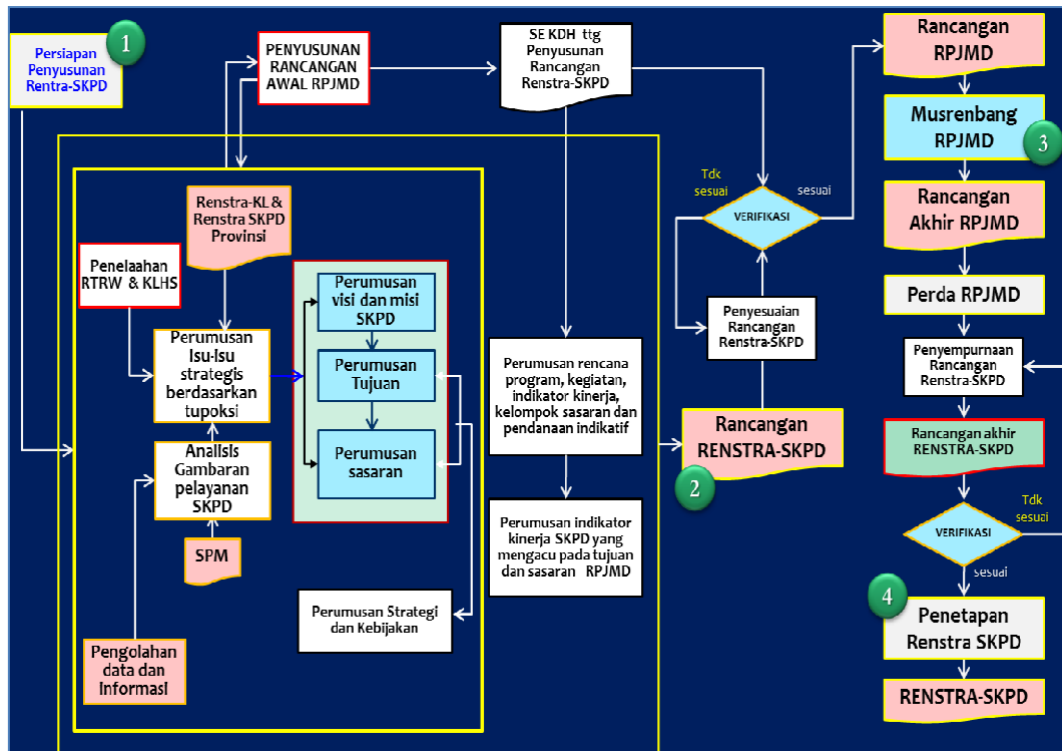
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah) disusun dengan tahapan :

- a) persiapan penyusunan;
- b) penyusunan rancangan awal;
- c) penyusunan rancangan
- d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e) perumusan rancangan akhir; dan
- f) penetapan.

Setelah itu, pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu dikendalikan dan dievaluasi agar sesuai dengan standar penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas selaku pimpinan perangkat daerah, yang mana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya.

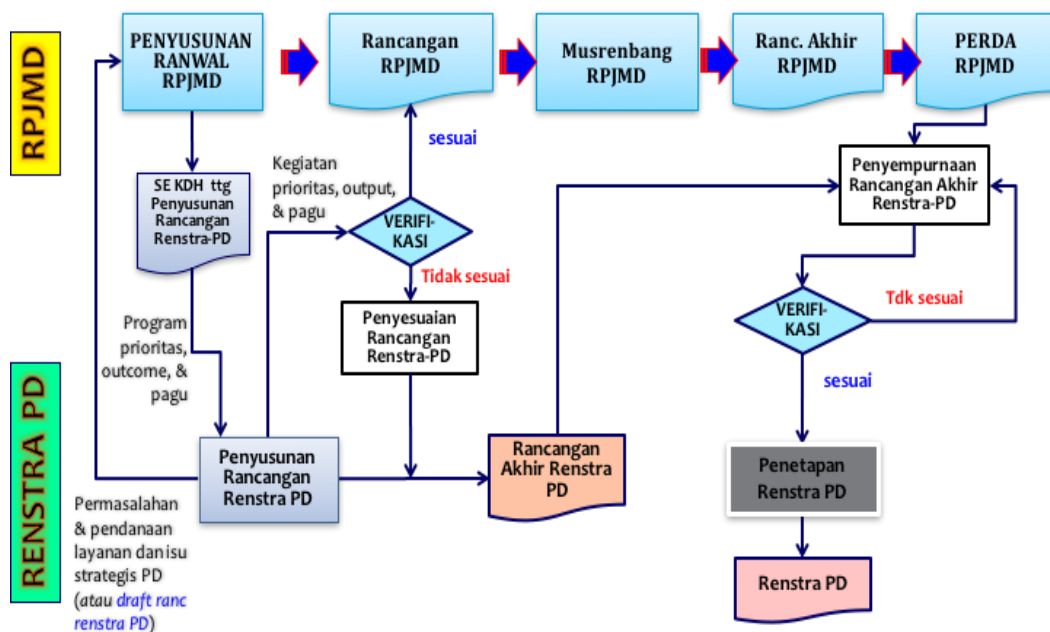
Adapun Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan sebagai berikut :



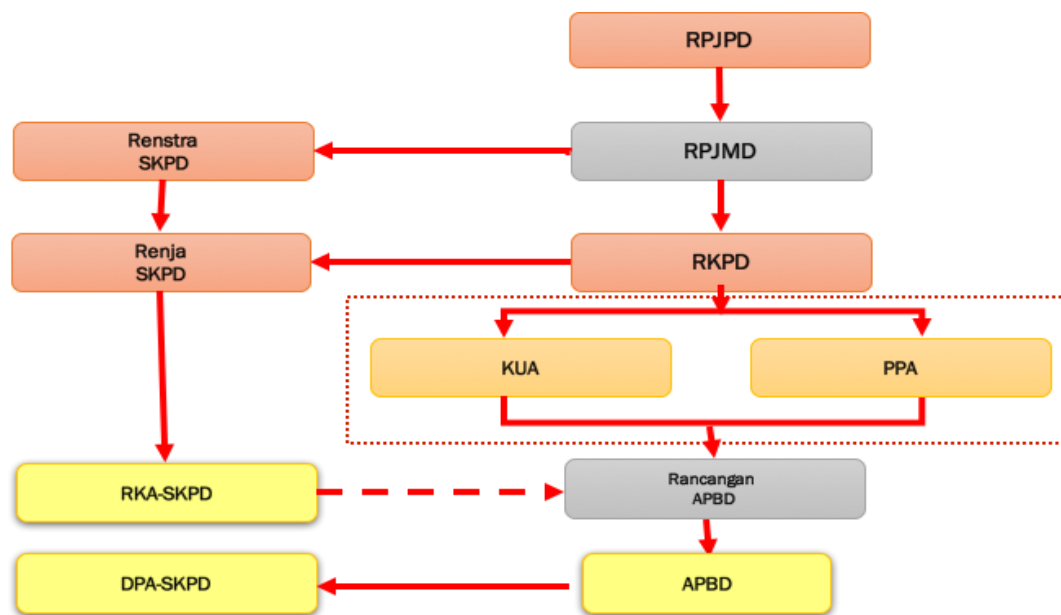
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah kemudian dijabarkan menjadi Program Tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan Pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian Dokumen Perencanaan Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta perkiraan maju yang disusun pada rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.

Rumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen yang utuh dari unsur pimpinan dan staf melalui proses komunikasi yang baik antara *top-down* dan *bottom-up approach*. Untuk mewujudkan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan diperlukan sinergitas dan keterpaduan antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik di daerah maupun nasional.

Rencana strategis menjadi sarana operasional Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal instansi terutama dalam masalah dinamika manajemen dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan peran dan

kontribusi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Praktek manajemen yang baik selalu memasukkan pertimbangan perencanaan sumber daya dan anggaran dalam perencanaan strategis. Renstra menggariskan arah perkembangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, sedangkan anggaran merupakan salah satu sumber daya untuk melaksanakannya. Sebaliknya alokasi anggaran yang tidak dilandaskan pada pemikiran yang strategis seringkali tidak responsif terhadap berbagai kondisi dan perubahan dimasa mendatang. Perencanaan Strategis diperlukan untuk memandu proses anggaran dan Kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum untuk melaksanakan penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

- tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
 22. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
30. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 910/103/Bapp tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan pada bidang urusan pertanian, urusan ketahanan pangan serta bidang urusan perikanan dan kelautan Kabupaten Tasikmalaya.

Program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh *stakeholder* secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Bupati Tasikmalaya ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, beserta program prioritas dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- d. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumberdaya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Capaian Kinerja masa Renstra periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang dihadapi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian terkait Perangkat Daerah Provinsi terkait serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan mengenai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah .

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Tugas Pokok: **“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang tanaman pangan, bidang kebun dan horti, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan.”**

Dengan menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil, perbibitan dan produksi peternakan serta penyuluhan dan sarana prasarana pertanian serta bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
- b. Penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Penyelenggaraan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan mutu, peredaran dan
- e. pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. Penyelenggaraan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- g. Penyelenggaraan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- h. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;

- i. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan
- j. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pangan dan perikanan;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan dan perikanan;
- m. Penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, pangan dan perikanan;
- n. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- o. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- p. Pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- q. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
- r. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis.

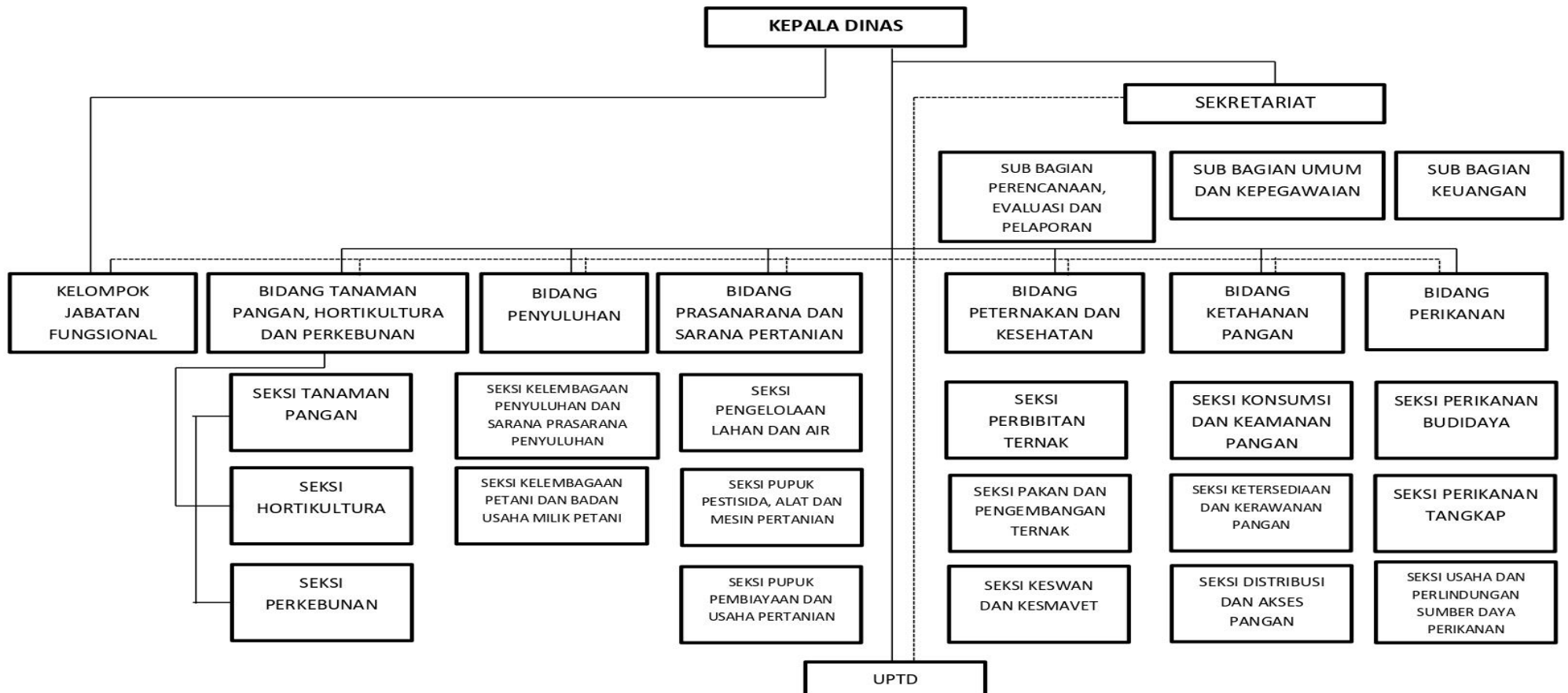
Susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura; dan
 3. Seksi Perkebunan.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan;

2. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Seksi Perbibitan Ternak
 2. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan Dan Air;
 2. Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Akses Pangan; Dan
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TASIKMALAYA



Rincian tugas pokok seluruh unsur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan tugas Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan perikanan serta pembinaan unit pelaksana teknis Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
3. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha perikanan;
4. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
5. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepala dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
- c. Menyelenggarakan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;
- d. Menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- g. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan/ikan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi penanggulangan bencana alam;
- i. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- k. Menyelenggarakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan perikanan;
- l. Menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- m. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan

- pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - p. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
 - q. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - r. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
 - s. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah; dan
 - t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas;
 - l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
 - o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang tanaman pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meliputi produksi padi palawija, perkebunan dan hortikultura.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberi bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, koordinasi penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- i. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi tanaman pangan;
- b. Seksi hortikultura; dan

- c. Seksi perkebunan.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan meliputi perbibitan dan produksi peternakan, pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi produksi perbibitan peternakan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengembangan peternakan;
- d. Pembinaan usaha sektor peternakan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- d. Menyelenggarakan pengendalian dan penyediaan bibit ternak, pakan ternak dan benih atau bibit hijauan pakan ternak;
- e. Menyelenggarakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

- f. Menyelenggarakan proses pemberian izin atau rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil;
- h. Menyelenggarakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- i. Menyelenggarakan pengawasan obat hewan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- k. Menyelenggarakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- l. Menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi perizinan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Seksi perbibitan dan produksi peternakan;
- 2) Seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- 3) Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

5. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunany pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan meliputi aspek kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian mempunyai fungsi :

- 1. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis penyuluhan;

2. Penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan meliputi kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani; dan
3. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Penyuluhan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penyuluhan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang penyuluhan;
- d. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi bidang penyuluhan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan di bidang penyuluhan;
- h. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi kerja sama dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri;
- i. Menyelenggarakan integrasi, sinkronisasi lintas sektor optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- j. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah dalam aspek penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;

- l. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia penyuluh;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang penyuluhan, terdiri atas:

- a) Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan
- b) Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Petani.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program prasarana dan sarana pertanian;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Penyelenggaraan kebijakan teknis potensi dan pengelolaan dan irigasi pertanian;
- d. Penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- e. Penyelenggaraan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan usaha pertanian; dan
- f. Penyelenggaraan pemberian fasilitasi investasi pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan air serta alat mesin pertanian;
- c. Menyelenggarakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. Menyelenggarakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan dan usaha pertanian;
- f. Menyelenggarakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
- b) Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- c) Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian

7. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang ketahanan pangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan pendampingan di bidang ketahanan pangan; dan
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang ketahanan pangan;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang ketahanan pangan; dan
- g. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang ketahanan pangan, meliputi:

- a. Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. Seksi distribusi dan akses pangan; dan
- c. Seksi konsumsi dan keamanan pangan.

8. Bidang Perikanan

Bidang perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang perikanan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama di bidang perikanan; dan
- d. Penyelenggaraan pembinaan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perikanan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perikanan;
- b. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- c. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- d. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan budidaya meliputi sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan tangkap meliputi sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;

- j. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- k. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang perikanan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perikanan terdiri atas:

- a. Seksi perikanan budidaya;
- b. Seksi perikanan tangkap; dan
- c. Seksi usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kekuatan Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai definitif ada 253 orang, meliputi 105 pegawai struktural dan 148 tenaga fungsional. Jumlah pegawai selengkapnya berdasarkan eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Gedung Kantor	130	
	Ruang Kepala	1	
	Ruang Rapat Pimpinan	1	
	Aula	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Kasubag	3	
	Ruang Kepala Bidang	6	
	Ruang Kepala Seksi	18	
	Ruang Pelayanan (front office)	1	
	Ruang Pengolahan (back office)	0	
	Ruang Penerbitan	0	
	Ruang Arsip	1	
	Ruang Tunggu	1	
No.	Uraian	-	Ket
	Loket Pembayaran	-	
	Loket Informasi & Pengaduan	-	
	Ruang Rokok	1	
	Ruang Laktasi	-	
	Ruang Satpam	1	
	Ruang Serbaguna	-	
	Ruang Baca dan Bermain Anak	-	
	Musholla	1	
	Pantry	-	
	Kamar Mandi/WC	8	
2.	Kendaraan Roda 4	22	
3.	Kendaraan Roda 2	312	
4.	Komputer/PC	46	
5.	Laptop	24	
6.	Printer	32	
7.	Server	1	
8.	Telephone	1	
9.	Faximili	1	
10.	Infocus	5	
11.	Layar Infocus	2	
12.	Internet	6	
	Jaringan Speedy 100 Mbs	-	

13.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan :		
	E-mail disperta@tasikmalayakab.go.id	1	
	Local Area Network Sistem Informasi Manajemen Perizinan (SIM Perizinan)	1	
14.	Tablet	-	
15.	Mesin Penghancur Kertas	12	
16.	Scanner	10	
17.	Digital Kamera	6	
18.	Televisi	-	
19.	USB Adapter	-	
20.	Handphone	-	
21.	Standing Bracket	-	
22.	CCTV	-	
23.	Pendingin Ruangan	20	
24.	Tabung Pemadam Kebakaran	-	
25.	Kursi Tunggu Tamu	14	
26.	Kursi Sofa	14	
No.	Uraian	-	Ket
27.	Meja Kerja	88	
28.	Meja Pelayanan	2	
29.	Kursi Kerja	67	
30.	Lemari Kayu	16	
31.	Lemari Besi	34	
32.	Rak Arsip	7	
33.	Brankas	1	
34.	Perosotan Anak	-	
35.	Kursi Sofa Baca	-	
36.	Rak Buku Minimalis	-	
37.	Meja Popok Laktasi	-	
38.	Lemari Es Laktasi	-	

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan	Golongan I	-
		Golongan II	47
		Golongan III	151
		Golongan IV	55
2.	Pendidikan	SD	-
		SMP	-
		SMA	89
		D1	2
		D3	14
		D4	36
		S1	69
		S2	43
		S3	-
3.	Eselon	II	1
		III	7
		IV	45

Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	Jumlah Total Personil (org)	Jumlah Personil (org) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan		Jumlah Personil (org) Berdasarkan Pangkat		Jumlah Personil (org) Berdasarkan Golongan		Jumlah Pejabat	
								Struktural	Fungsional (org)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	253	SD	-	Juru Muda	-	1/a	-	Struktural 47	Penyuluh 126
		SLTP	-	Juru Muda Tk.I	-	1/b	-	Pelaksana 58	Medik veteriner 4
		SLTA	89	Juru	-	1/c	-		Pengawas Mutu Pakan 8
		D.I	2	Juru Tk.I	-	1/d	-		Pengawas Bibit Ternak 6

		D.III	14	Pengatur Muda	13	II/ a	13		Paramedik Veteriner 4
		D.IV	36	Pengatur Muda Tk.I	5	II/ b	5		
		S.1	69	Pengatur	22	II/c	22		
		S.2	43	Pengatur Tk.I	7	II/ d	7		
		S.3	-	Penata Muda	50	III/ a	50		
				Penata Muda Tk.I	27	III/ b	27		
				Penata	31	III/ c	31		
				Penata Tk.I	43	III/ d	43		
				Pembina	19	IV/ a	19		
				Pembina Tk.I	29	IV/ b	29		
				Pembina Utama Muda	7	IV/ c	7		

No	JABATAN	JUMLAH	KETERANGA N
1	Pejabat Struktural	47	
2	Pejabat Fungsional		
	a. Fungsional Penyuluh	126	
	b. Medik Veteriner	4	
	c. Pengawas Mutu Pakan	8	
	d. Pengawas Bibit Ternak	6	
	e. Paramedik Veteriner	4	
3	Pelaksana	58	
	Jumlah	253	

2.3. Sumber Daya Unit Operasional Teknis

Dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah dilengkapi dengan 11 (Sebelas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai berikut :

Tabel 2.4.
UPTD Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	UPT	Keterangan
1	Balai Benih Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan	UPT penyedia benih unggul padi palawija (Mangunreja)
		UPT penyedia benih hortikultura dan perkebunan (Cimintar Cipatujah)
2	Perbibitan Ternak	UPT Sapi Potong Tawang dan UPT Kambing PE Malaganti (Penyediaan Bibit Sapi Potong dan Kambing Perah; Kemitraan Usaha Sapi Potong dan Kambing Perah
3	Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Manonjaya, RPH Singaparna dan RPH Ciawi (Pelayanan fasilitas pemotongan hewan ternak besar (sapi dan kerbau)
4	Puskesmas	Wilayah I,II,III
5	Laboratorium Veteriner	Kabupaten
6	Pasar Hewan	Pasar Hewan Manonjaya, Pasar Hewan Padakembang, Pasar Hewan Ciawi, Pasar Hewan Pancatengah (Pelayanan fasilitas perdagangan hewan ternak besar dan kecil (Sapi, Kerbau, Kambing dan domba)
7	Wilayah Pertanian	Taraju, Singaparna, Ciawi, Cikatomas, Manonjaya, Sukaraja, Karangnunggal
8	Balai Benih Ikan	BBI Rancapaku, BBI Padakembang
9	Pasar Ikan	Pasar Ikan Jatihurip, Pasar Ikan Singaparna, dan Pasar Ikan Padakembang
10	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cipatujah

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun-					Realisasi Capaian Tahun-					Rasio (%) Capaian pada Tahun-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan jumlah produksi hasil olahan komoditas pertanian	%	2,01	1,70	2,00	2,05	0,52	2,01	2,05	2,13	2,06	0,48	100,00	120,59	106,49	100,49	92,31
2	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,00	0,80	0,90	1,00	0,27	1,30	1,18	1,00	0,83	0,81	130,00	147,50	111,17	83,00	300,00
3	Persentase peningkatan produksi hortikultura	%	1,00	0,80	0,90	1,00	0,27	(2,39)	(2,78)	1,03	0,96	0,73	-239,00	-347,50	114,52	96,00	270,37
4	Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	1,50	1,30	1,40	1,50	0,40	0,01	(0,01)	1,52	1,49	0,6	0,67	-0,77	108,75	99,33	150,00
5	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH	%	2,00	1,70	2,00	2,05	0,50	0,36	(17,66)	2,11	1,98	0,33	18,00	-1038,82	105,43	96,59	66,00
6	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan per kapita	%	65,40	67,40	79,15	80,75	80,00	65,99	68,09	79,94	82,50	81,5	100,90	101,02	101,00	102,17	394,86

7	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	7,81	7,81	9,77	7,99	2,95	5,30	7,45	5,57	7,75	2,90	67,86	95,39	56,96	97,00	98,31
---	--	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa terdapat 3 indikator yang tidak tercapai, yaitu

- Persentase Produksi Hortikultura Tahun 2016 dan 2017;
- Persentase Produksi Perkebunan Tahun 2016 dan 2017
- Persentase Produksi Peternakan Tahun 2016 dan 2017

Faktor pendukung pencapaian kinerja:

1. Dispersikan terus berusaha mengoptimalkan produksi semua urusan (pertanian, pangan dan perikanan);
2. Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan
3. Upaya untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) yang berbasis sumber pangan lokal agar terus dilakukan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Dampak Perubahan Iklim (DPI)
2. Penyediaan Bibit Unggul
3. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Prasarana
4. Refocusing dan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Uraian Program	Anggaran pada Tahun-					Realisasi Anggaran pada Tahun-					Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	980.813.630	0	574.367.750	920.482.515	1.770.115.600	893.511.604	0	520.449.935	812.077.340	513.712.578	91,10	0,00	90,61	88,22	29,02	9,77	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207.140.000	0	330.260.000	560.991.750	435.504.600	170.405.227	0	314.381.245	457.250.815	170.675.060	82,27	0,00	95,19	81,51	39,19	21,56	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	0	0	0	44.500.000	60.000.000	0	0	0	44.500.000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	13.300.000	20.000.000	0	0	0	13.165.000	7.820.000	0,00	0,00	0,00	98,98	39,10	0,00	0,00
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	155.000.000	0	125.000.000	12.990.000	38.750.000	70.499.000	0	111.479.000	12.724.250	36.825.000	45,48	0,00	89,18	97,95	95,03	119,86	0,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	0	0	0	7.388.594.840	3.221.165.000	0	0	0	7.114.184.910	549.915.000	0,00	0,00	0,00	96,29	17,07	0,00	0,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkeb	30.441.178.500	75.278.163.200	86.016.942.000	65.763.611.144	18.392.654.400	29.464.488.400	74.244.182.395	84.318.971.310	63.859.763.640	101.434.000	96,79	98,63	98,03	97,11	0,55	3,31	1,39

unan																	
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	0	0	0	0	3.500.000.000	0	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan Budi Daya Perikanan	0	0	0	2.238.308.410	2.038.077.500	0	0	0	2.051.378.216	86.929.500	0,00	0,00	0,00	91,65	4,27	0,00	0,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	0	11.500.000.000	14.575.000.000	19.962.924.500	11.337.165.000	0	11.094.584.390	14.171.627.550	19.201.629.887	51.165.000	0,00	96,47	97,23	96,19	0,45	0,00	3,65
Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	0	0	0	521.935.500	741.212.500	0	0	0	434.915.928	334.710.000	0,00	0,00	0,00	83,33	45,16	0,00	0,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian	638.000.000	930.000.000	700.000.000	1.035.668.250	0	638.000.000	859.076.560	694.100.000	949.178.310	0	100,00	92,37	99,16	91,65	0,00	0,00	8,26
Program Peningkatan Usaha Perikanan	0	0	0	254.937.800	34.285.000	0	0	0	250.309.460	28.950.000	0,00	0,00	0,00	98,18	84,44	0,00	0,00
Program Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan	28.159.374.760	34.296.912.400	18.120.000.000	30.175.716.400	2.878.505.000	27.726.286.620	33.773.570.650	16.261.510.750	29.595.621.630	28.505.000	98,46	98,47	89,74	98,08	0,99	1,56	1,55
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	44.411.301.959	5.533.799.000	6.884.670.000	8.830.074.000	3.467.486.500	39.789.271.611	5.467.910.450	6.869.907.100	8.751.834.200	966.308.500	89,59	98,81	99,79	99,11	27,87	11,62	1,21

Program Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Ternak	0	455.000.000	850.000.000	622.469.020	277.299.000	0	451.981.500	835.220.939	598.734.923	107.299.000	0,00	99,34	98,26	96,19	38,69	0,00	0,67
Program Peningkatan Usaha Peternakan	0	95.000.000	1.300.000.000	54.665.000	12.700.000	0	94.859.000	1.279.716.000	54.665.000	12.700.000	0,00	99,85	98,44	100,00	100,00	0,00	0,15
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan	0	0	0	233.085.000	424.560.000	0	0	0	227.286.000	201.860.000	0,00	0,00	0,00	97,51	47,55	0,00	0,00
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau	0	1.205.231.000	600.000.000	474.106.750	0	0	1.133.948.600	585.004.250	423.163.600	0	0,00	94,09	97,50	89,25	0,00	0,00	6,29
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	390.079.050	0	0	0	0	388.714.050	0	0	0	0	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
Jumlah	105.052.808.849	129.294.105.600	130.076.239.750	139.063.860.879	48.633.980.100	98.812.462.462	127.120.113.545	125.962.368.079	134.807.883.109	3.243.308.638	94,06	98,32	96,84	96,94	6,67	6,32	1,71

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap segala kendala dan hambatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan	Menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan.	Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan.
2	Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian	Keterbatasan akses Petani Terhadap Lembaga Permodalan dan Pasar	Masih Rendahnya Daya Saing Kompetitif dan Komparatif
3	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Pertanian	Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian yang diakibatkan lulusan pertanian yang berlatar belakang agronomi, hama penyakit dan teknologi pertanian masih kurang disamping jumlah pegawai yang terus berkurang sehingga luas wilayah kabupaten tidak seimbang dengan keberadaan jumlah pegawai yang ada.	Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.
4	Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian	Belum adanya konsep wawasan pertanian terpadu (<i>integrated farming system</i>) dalam membangun pertanian.	Secara kelembagaan, kelompok tani masih lemah, hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.
5	Dampak Perubahan Iklim (DPI)	<i>Permasalahan ekologi/lingkungan</i>	Perubahan iklim pada zaman sekarang merupakan menjadi

			kendala yang serius karena iklim.
6	<i>Fluktuasi Harga Pangan</i>	Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pangan.	Harga jual yang sangat fluktuatif sangat mempengaruhi inflasi.
7	<i>Ketersediaan Pangan Kurang Memadai</i>	Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (1,39%/tahun) mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat.	Pertumbuhan penduduk menjadi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan, sementara itu penduduk menuntut adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan tersedia setiap saat.
8	<i>Penurunan kualitas perairan</i>	Permasalahan ekologi lingkungan yang terjadi adalah tekanan terhadap Sumberdaya ikan terutama di daerah pesisir dan perairan umum daratan (Sungai, waduk, embung, danau dll). Tekanan ini menyebabkan stok ikan yang menurun.	Penurunan kualitas air dapat menyebabkan masa pemeliharaan ikan semakin lama, ikan lebih mudah terkena penyakit, konversi pakan makin tinggi (boros pakan), produktivitas budidaya perikanan akan menurun, sehingga biaya produksi akan meningkat.
9	<i>Rendahnya Tingkat Kemandirian Pangan</i>	Di desa dengan kategori miskin masih banyak penduduk rawan pangan.	Masih terdapat 31 desa rawan pangan di Kabupaten Tasikmalaya.
10	<i>Besarnya porsi biaya dan tingginya harga sarana produksi pakan</i>	Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, sehingga ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar, dan usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan.	Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari Negara lain (impor), sedangkan pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik.
11	<i>Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Belum Optimal</i>	Dalam upaya pengembangan perikanan budidaya khususnya pada proses pendederan/pembenihan di sentra-sentra pembenihan ikan air tawar	<i>Sarana Prasarana Pembenihan belum memadai.</i>

		(Sukaratu, Padakembang dan Singaparna) masih terkendala oleh penurunan debit dan kualitas air akibat aktivitas kegiatan tertentu di luar perikanan.	
--	--	---	--

3.1.1 Permasalahan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan

Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan; banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan dan menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan.

2. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Prasarana

Ketersediaan infrastruktur (prasarana dan sarana pertanian) belum memadai yang diakibatkan oleh faktor-faktor masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur dan sarana prasarana.

3. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Pertanian

Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian yang diakibatkan lulusan pertanian yang berlatar belakang agronomi, hama penyakit dan teknologi pertanian masih kurang disamping jumlah pegawai yang terus berkurang sehingga luas wilayah kabupaten tidak seimbang dengan keberadaan jumlah pegawai yang ada. Secara kelembagaan, kelompok tani masih lemah, hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.

4. Keterbatasan akses Petani Terhadap Lembaga Permodalan dan Pasar

Masalah kekurangan modal yang dihadapi petani menjadi isu klasik karena memang sifat usaha bidang pertanian belum mendapat dukungan yang penuh dari pihak perbankan.

5. Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian

Belum adanya konsep wawasan pertanian terpadu (*integrated farming system*) dalam membangun pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan) serta dukungan dari perindustrian guna mencapai sistem agribisnis.

6. Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Perubahan iklim pada zaman sekarang merupakan menjadi kendala yang serius karena iklim

7. Masih Rendahnya Daya Saing Kompetitif dan Komparatif

Pada dasarnya kepada tersedianya pasar dan informasi harga, kondisi yang selalu fluktuatif yang bergantung pada tengkulak dan pedagang yang sering merugikan petani.

8. Masih Tingginya Penggunaan Pupuk dan Pestisida an Organik

Masih lemahnya penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang ditandai antara lain dengan penggunaan pupuk dan bahan kimia anorganik yang berlebihan serta perkembangan teknologi seringkali menyebabkan tergerusnya kearifan lokal dan potensi sumberdaya lokal.

9. Mentalitas

Sempitnya kerangka berfikir petani terhadap usaha bidang pertanian itu sendiri, yaitu di satu sisi petani menggantungkan hidupnya pada usaha tani tetapi disatu sisi sebagian besar petani tidak bersungguh-sungguh dalam usaha taninya karena hanya dianggap sebagai tradisi saja (subsisten).

3.1.2 Permasalahan Utama Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan)

1. Ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan peternakan yang terintegrasi belum memadai

Ketika suatu sistem peternakan dikelola, maka daya dukung lahan sebagai pemasok hijauan harus dipikirkan. Sebaiknya suatu peternakan harus memiliki lahan hijauan tersendiri agar daya dukung lahan dapat dikelola dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan hijauan ternak. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan daya dukung lahan terhadap ketersediaan hijauan untuk produktivitas ternak. Faktor-faktor tersebut adalah 1) Kesuburan lahan; 2) Kondisi dan jenis tanaman yang tersedia; 3) Jenis dan Kondisi ternak; 4) Kondisi iklim.

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena tidak ada regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang mulai maju usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha yang lain. Sehubungan hal di atas dan menjamin kebutuhan pangan nasional asal ternak, maka usaha peternakan harus maju dan berkembang. Salah satu syaratnya adalah peternakan harus diberi lahan dengan cara memberi kepastian dalam RTRW untuk ruang peternakan.

Ketersediaan lahan inilah yang menjadi penghambat dalam pengembangan peternakan yang terintegrasi. Adanya tanah/lahan pangangonan yang difungsikan di luar keperluan peternakan menyebabkan semakin sempitnya ruang bagi perluasan areal peternakan. Sehingga perlu didorong untuk mengembangkan kawasan peternakan rakyat yang terintegrasi melalui optimalisasi fungsi lahan pangangonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pengembangan kawasan ini perlu juga diimplementasikan adanya integrasi peternakan dengan tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan. Adanya integrasi tersebut akan memberikan manfaat saling menguntungkan berupa

penyediaan pupuk kandang bagi tanaman serta limbah pertanian sebagai sumber pakan bagi ternak.

2. Penyediaan Bibit Unggul

Produktivitas ternak masyarakat khususnya ternak lokal (terutama sapi potong) belum optimal sehingga masih diperlukan upaya fasilitasi dalam pengembangan perbibitan secara terstruktur dan terarah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kendala tersebut adalah masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak betina, masih adanya pemotongan betina produktif dan keterbatasan SDM (Medis Veteriner/Dokter Hewan dan Paramedis Veteriner) serta Sarana Prasarana UPT Perbibitan Ternak Daerah.

Guna mendorong peningkatan penyediaan bibit unggul di daerah, perlu dilakukan beberapa upaya diantaranya Optimalisasi IB (Gertak Berahi IB), Pengawasan Peredaran Bibit dan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit.

Berkenaan dengan pengembangan sumberdaya genetik lokal, juga perlu didorong untuk melakukan pemurnian terhadap jenis ternak tersebut. Sumber daya genetic local yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah ternak itik ras Cihateup yang telah diakui oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu jenis ternak asli local asal Kabupaten Tasikmalaya.

3. Kelembagaan Kelompok Tani

Secara kelembagaan, kelompok tani ternak yang ada masih lemah. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani ternak.

4. Sarana Prasarana Pendukung Peternakan

Ketersediaan sarana prasarana pendukung usaha peternakan baik di sub sistem hulu maupun hilir seperti unit perbibitan, kebun HMT, Sumber Air, Jalan Produksi, Puskesmas, Pos IB, Fasilitas Pengolahan Limbah, Padang Penggembalaan, pasar ternak, rumah potong hewan belum memadai.

5. Permodalan petani

Lemahnya permodalan petani ternak, diakibatkan oleh faktor keterbatasan akses terhadap sumber permodalan selain dari pemerintah.

6. Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustri

Dengan produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya efisiensi produksi sehingga menyebabkan nilai tambah kurang memadai, sehingga sulit bersaing untuk meningkatkan kualitas produk.

7. Pengembangan Kawasan Peternakan Rakyat yang belum Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Pengelolaan ternak dan kesehatan ternak secara berkelanjutan menjadi pembicaraan yang mengemuka terkait adanya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan pemanasan global. Pola peternakan saat ini seharusnya didorong untuk berubah yaitu dari sistem pengelolaan peternakan konvensional yang berorientasi produktivitas saja, menuju sistem pengelolaan peternakan berwawasan lingkungan.

8. Belum Optimalnya Penanganan Kesehatan Hewan dan Rehabilitasi Reproduksi

Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan populasi ternak adalah mengetahui status reproduksi ternak, dalam hal ini fertilitas dan pemeriksaan kebuntingan. Pemeriksaan infertilitas yang tidak tepat akan berimplikasi pada kegagalan treatment infertilitas yang diberikan. Demikian pula, pemeriksaan kebuntingan yang tidak akurat menyebabkan *days open* yang lebar. Lebih lanjut berakibat pada rendahnya angka kebuntingan.

9. Belum optimalnya Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ternak dan hasil ternak.

Peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk pengolahan hasil ternak masih belum optimal, demikian pula upaya pemasarannya masih belum memadai.

10 Belum optimalnya pengawasan terhadap produk pangan asal hewan

3.1.3 Permasalahan Utama Bidang Perkebunan

1. Terjadinya penurunan daya dukung lahan sebagai akibat dari kurangnya diperhatikannya pengelolaan sumberdaya lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi, sehingga muncul lahan-lahan potensial kritis dan kurang produktif;
2. Kelembagaan petani perkebunan belum tertata dan terbina secara baik, sehingga fungsi kelembagaan belum dapat berjalan dengan baik;
3. Populasi tanaman perkebunan rakyat, belum memenuhi standar baku budidaya tanaman;
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi pestisida nabati dan agensi hayati dalam pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan;
5. Rendahnya luasan kepemilikan lahan petani perkebunan yang diperkirakan rata-rata 0,20 Ha;
6. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan;
7. Masih kurangnya infrastruktur perkebunan;
8. Penanganan kegiatan panen dan pasca panen produksi hasil perkebunan masih belum memenuhi standar baku hasil;
9. Masih rendahnya pendapatan petani perkebunan;
10. Terjadinya penurunan produksi dan produktivitas tanaman sebagai akibat tanaman tua/rusak (TT/TR).

3.1.4 Permasalahan Utama Bidang Ketahanan Pangan

2.3 Ketersediaan dan Distribusi Pangan

2.3.1.1 Ketersediaan Pangan Kurang Memadai

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (1,39%/tahun) mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga

membutuhkan ruang dan energi yang lebih besar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, perluasan industri, perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan penduduk menjadi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan, sementara itu penduduk menuntut adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan tersedia setiap saat.

2.3.1.2 Fluktuasi Harga Pangan

Fluktuasi harga pangan perlu diantisipasi karena harga jual yang sangat fluktuatif sangat mempengaruhi inflasi. Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pangan dunia, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu.

2.3.1.3 Terbatasnya fasilitas dan aktivitas lumbung pangan pedesaan

Dalam perkembangan kehidupan sosial di pedesaan saat ini lumbung – lumbung desa / lumbung pangan pribadi para petani sudah tidak terlihat lagi, sudah banyak yang dibongkar beralih fungsi karena kebutuhan. Karena tuntutan kebutuhan para petani kita juga banyak yang menjual padinya di sawah pada saat panen walaupun masih banyak juga yang membawa hasil panen padinya kerumah.

2.3.1.4 Rendahnya Tingkat Kemandirian Pangan

Di desa dengan kategori miskin masih banyak penduduk rawang pangan, menurut BKPD Provinsi Jawa Barat, masih terdapat 31 desa rawan pangan di Kabupaten Tasikmalaya.

2.3.1.5 Distribusi pangan kurang memadai

Kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di perdesaan serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan nasional. Pengembangan infrastruktur tersebut diperlukan untuk menggerakkan proses produksi dan distribusi/pemasaran komoditas pangan. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan, dapat mengakibatkan terganggunya transportasi dan distribusi bahan pangan dan akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Selain itu juga mempertinggi proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan.

2.4 Konsumsi dan Keamanan Pangan

2.4.1.1 Kurangnya Kesadaran Konsumsi Pangan

Selain laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, faktor kebiasaan penduduk yang hanya mengonsumsi jenis pangan tertentu, misalnya beras, akan memberikan tekanan yang berat terhadap penyediaan pangan tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) yang berbasis sumber pangan lokal agar terus dilakukan.

2.4.1.2 Kurangnya Keragaman Pangan

Kurangnya keragaman pangan dapat dilihat dari Skor pola pangan harapan konsumsi yang baru mencapai 67,10% dari angka ideal 100%.

2.4.1.3 Kurangnya Kesadaran Keamanan Pangan

Di berbagai daerah telah terjadi beberapa kasus keracunan dan gangguan kesehatan manusia akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya. Hal ini antara lain dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran para pengusaha waralaba (ritel) untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu, belum efektifnya

penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas, standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri, belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar serta koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.

1. Permasalahan Utama Bidang Perikanan

a. Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan (Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar serta Nelayan) masih rendah

Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan (Pembudidaya, pengolah/pemasar dan nelayan) masih rendah disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1) Kepemilikan lahan masih rendah;

Lahan merupakan syarat utama dalam usaha budidaya perikanan. Karena usahanya merupakan sampingan dan skala kecil, maka kepemilikan lahan masih rendah.

2) Kondisi SDM masyarakat nelayan yang mayoritas masih kurang memadai.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan formal yang sebagian besar disebabkan oleh sulitnya sekolah atau akses di daerah pesisir. Kurangnya pendidikan ini berdampak sulitnya masyarakat nelayan untuk menerima transfer ilmu maupun transfer teknologi, sehingga sering terjadi pelanggaran.

3) Inefisiensi Usaha

Permasalahan yang terjadi adalah usaha perikanan yang belum efisien maupun kontinuitas produksi yang tidak stabil. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya sarana prasarana maupun pengetahuan untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah pada produk perikanan. Dampak dari rendahnya daya saing produk perikanan tangkap adalah berkurangnya

lapangan pekerjaan, yang diiringi menurunnya pendapatan masyarakat. Secara global maka negara juga akan mengalami kerugian akibat menurunnya devisa

4) Akses permodalan usaha perikanan masih terbatas

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sulitnya prosedur perbankan bagi masyarakat nelayan yang sebagian besar merupakan nelayan skala kecil. Selain itu suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya usaha perikanan nelayan di Indonesia. Dampak dari terbatasnya akses permodalan usaha bagi nelayan adalah sulitnya perkembangan usaha perikanan tangkap atau cenderung stagnan. Di sisi lain terbatasnya akses permodalan bagi nelayan juga menyebabkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak berimbang terutama di daerah pesisir.

5) Besarnya porsi biaya dan tingginya harga sarana produksi pakan

Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari Negara lain (impor), sedangkan pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik, sehingga kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, sehingga ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar, dan usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan.

b. Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Belum Optimal

Pencapaian produksi ikan konsumsi dan benih belum optimal sebagai akibat beberapa hal sebagai berikut :

1) Sarana Prasarana Pembenihan

Dalam upaya pengembangan perikanan budidaya khususnya pada proses pendederan/pembenihan di sentra-sentra pembenihan ikan air tawar (Sukaratu, Padakembang dan Singaparna) masih terkendala oleh penurunan debit dan kualitas air akibat aktivitas kegiatan tertentu di luar perikanan.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah menyebabkan berkurangnya sumber daya ikan.

2) *Penurunan kualitas perairan*

Penurunan kualitas air dapat menyebabkan masa pemeliharaan ikan semakin lama, ikan lebih mudah terkena penyakit, konversi pakan makin tinggi (boros pakan), produktivitas budidaya perikanan akan menurun, sehingga biaya produksi akan meningkat dan dalam jangka panjang kegiatan usaha perikanan budidaya menjadi tidak menarik lagi.

3) *Kepastian tata ruang usaha budidaya perikanan*

Terjadi konflik kepentingan dengan pengguna lain serta tidak ada kepastian hukum dalam arti fisik dan fungsional bagi para investor perikanan budidaya sehingga *sustainability* usaha perikanan budidaya tidak bisa dijamin. Juga tidak ada jaminan bahwa perairan yang ada tidak akan tercemari baik oleh limbah industri, pertanian ataupun rumah tangga yang berada dibagian hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) yang mengalir di kawasan tersebut.

4) *Permasalahan ekologi/lingkungan*

Permasalahan ekologi lingkungan yang terjadi adalah tekanan terhadap Sumberdaya ikan terutama di daerah pesisir dan perairan umum daratan (Sungai, waduk, embung, danau dll). Tekanan ini menyebabkan stok ikan yang menurun. Akar penyebab dari menurunnya sumberdaya ikan adalah penyalahgunaan alat tangkap seperti ukuran mata jaring yang terlalu kecil sehingga menyebabkan banyak tertangkapnya ikan berukuran kecil yang belum matang. Hal ini diperparah oleh aktivitas usaha pertambangan pasir besi di sebagian besar pantai Kabupaten Tasikmalaya.

5) *Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) belum memadai;*

Kondisi PPI tersebut menyebabkan penggunaan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, yaitu

perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal ikan berukuran 0,5 sampai 3 *gross tonnage* (GT), sehingga produksi perikanan tangkap saat ini hanya mampu mencapai 13% dari potensi yang ada.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu: **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

a. Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa gotong yang berarti "mengangkat" dan royong yang berarti "bersama". Bersama dengan musyawarah, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, serta kekeluargaan, gotong royong menjadi dasar filsafat Indonesia.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan untuk mencapai tujuan bersama.

b. Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (ال سَ لَامُ)

yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang.

Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

c. Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

d. Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan dalam table berikut ini.

Tabel 3.2
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
-------------	-------------------------	-------------------

DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran

		dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	<i>Berdaya Saing</i>	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.
	Sejahtera	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk

		ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang- orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat
		dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 3.3
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berakhlak mulia, sehat cerdas, berbudiilmu Pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah</i> dan <i>fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam Melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme
			aparatur,efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

2.	Berdaya Saing dan Kesejahteraan	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
----	---------------------------------	---	---

“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA ”

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan kewenangan dinas yaitu terdapat pada Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan

pariwisata”. Dinas juga diharapkan dapat merespon dan menjawab tantangan dalam isu strategis peningkatan produksi di bidang pertanian serta usaha agribisnis.

Terkait dengan pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan dalam menjawab tantangan dalam misi dan isu strategis pemerintah daerah tersebut, maka akan cukup sentral perannya karena ketahanan pangan dan perikanan rakyat bersama dengan usaha pertanian lainnya merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagian besar perikanan rakyat masih merupakan usaha subsisten (sampingan) dan belum secara sepenuhnya menerapkan system agribisnis, namun dengan dorongan dan fasilitasi pemerintah usaha perikanan rakyat dapat diarahkan untuk menerapkan system agribisnis yang merupakan satu kesatuan usaha yang terintegrasi dengan dukungan berbagai sektor.

Dalam hal-hal tertentu, agribisnis dapat terintegrasi dengan pariwisata dalam suatu kawasan menjadi suatu kawasan agrowisata.

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

No.	Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai	a. Pengembangan Kawasan Terintegrasi belum memadai b. Sarana Prasarana Pendukung Peternakan	a. Keterbatasan SDM aparatur b. Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan	a. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU Peternakan dan Kesehatan

Visi : **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

No.	Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	c. Permodalan Petani Ternak d. Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustry b. Ketersediaan pangan kurang memadai; c. Fluktuasi harga pangan; d. Lemahnya distribusi pangan e. Produksi Perikanan Belum Optimal a. Daya Saing Lemah	Petani c. Kondisi geografis d. Ketersediaan Ruang dan Lahan Untuk Budidaya e. Pertumbuhan produksi pangan dan penduduk tidak seimbang; f. Tinggi permintaan pangan; g. Fasilitas lumbung dan lembaga distribusi pangan tidak berjalan optimal h. Penurunan kualitas	Hewan serta propinsi melalui Perda Tata Ruang dan Zonasi; b. Adanya potensi alam yang cukup mendukung c. Tersedianya teknologi

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Provinsi Terkait

1. Renstra Kementerian Pertanian

a. Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian

Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas

pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
- b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
- c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
- d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
- e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
- f. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
- g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
- h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- i. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas;

Tabel. 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Bidang Pangan berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”			
No	Misi	Permasalahan	Faktor

			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan ketahanan pangan	Sistem pertanian berkelanjutan belum berjalan dengan baik	Pemahaman sistem pertanian berkelanjutan yang dipadukan dengan sistem agribisnis belum direalisasikan secara real	Memiliki wilayah yang masih luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
		Alih fungsi lahan pertanian	Alih fungsi lahan pertanian	
2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Belum go Agroindustri	Pola pikir petani yang belum berorientasi pada usaha tani	Memiliki komoditas yang dapat diunggulkan
3	Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana petani	Sarana prasarana belum memadai	Pola pikir petani yang belum berorientasi pada usaha tani	
		Sistem pertanian yang dilaksanakan secara integral belum dilaksanakan dengan baik	Masih adanya ego bidang	basis pertanian sebagian besar berada di perdesaan
		Penguasaan IPTEK yang masih kurang	Pola pikir petani yang belum berorientasi pada usaha tani	a. Jumlah kelompok tani yang terus meningkat b. memiliki komoditas unggulan
		Sistem kemitraan belum berjalan dengan baik	Pola pikir petani yang belum berorientasi pada usaha tani	Memiliki komoditas yang dapat diunggulkan
			Tata niaga pertanian belum berjalan dengan baik	Potensi pasar pertanian masih
		Masih banyak SDM yang belum	SDM yang expert/	Ketersediaan SDM

		profesional	ahli/spesifikasi masih kurang	
--	--	-------------	----------------------------------	--

Implementasi program dan kegiatan, maka program yang terkait erat serta menjadi program prioritas nasional di bidang pertanian adalah :

(1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
2. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi.
3. Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

(2) Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura ;

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
2. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
3. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kondisi faktual faktor-faktor pendukung program prioritas Kementerian Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

(1) Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam, wilayah binaan yang terdiri dari 39 kecamatan dengan berbagai potensi unggulan komoditas, yaitu Tasikmalaya Utara dan Timur sebagai penghasil padi, Tasikmalaya Barat sebagai penghasil padi dan hortikultura dan Tasikmalaya Selatan sebagai penghasil palawija dan hortikultura sehingga menjadi suatu peluang yang baik;

(2) Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin meningkat, dengan indikasi penerapan adopsi inovasi teknologi pertanian oleh para petani yang salah satunya Kabupaten Tasikmalaya sebagai penghasil dan sebagai

eksportir beras organik di Jawa Barat dan penghasil manggis terbesar di Jawa Barat merupakan suatu peluang untuk lebih dikenal ke khalayak luas;

- (3) Pangsa pasar selalu terbuka mengikuti *trend* dan kebutuhan maka ini menjadi suatu peluang yang bisa dimanfaatkan;
- (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang kawasan lahan pertanian berkelanjutan yang menjadi acuan penyusunan Perda tentang konversi lahan dan perlindungan lahan berkelanjutan.

2. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP

dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

- a. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- c. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat,

memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Dari uraian visi misi dan arah kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pembangunan perikanan dan kelautan adalah guna mewujudkan adanya kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dalam bidang perikanan dan kelautan di Indonesia. Ketiga tujuan tersebut merupakan pendekatan dalam upaya membangun masyarakat perikanan dan kelautan baik fisik maupun non fisik.

Untuk implementasi di daerah, pendekatan kedaulatan mencakup upaya-upaya dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan produksi perikanan, sedangkan pendekatan keberlanjutan mencakup upaya-upaya dalam melestarikan sumber daya perikanan serta mendorong peningkatan kemandirian, daya saing dan nilai tambah hasil perikanan. Sementara untuk kesejahteraan adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM pelaku utama perikanan baik budidaya, tangkap maupun pengolahan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 3.6
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi : “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disperpakan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Keterbatasan Sarana Prasarana Pendukung Perikanan dan Kelautan	Keterbatasan SDM aparatur	Tersedianya teknologi pendukung

2	mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Kepastian tata ruang usaha budidaya perikanan	Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Tersedianya potensi sumber daya perikanan dan kelautan
3	mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.	Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustri	Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Tersedianya teknologi pendukung

3. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi.

Sasaran : Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan.

Strategi : Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan.

Kebijakan pembangunan pertanian di Jawa Barat diarahkan pada :

- 1) Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya.
- 2) Desentralisasi pelayanan kesehatan

- 3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
- 4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
- 5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
- 6) Infrastruktur konektivitas wilayah
- 7) Gerakan bangun desa (Gerbang desa)
- 8) Subsidi gratis golekma
- 9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Visi : <i>“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”</i>				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan DISPERPAKAN	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan	Sistem agribisnis belum berjalan dengan benar	Pemahaman sistem agribisnis dan agroindustri belum direalisasikan	Penumbuhan agroindustri
2	Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia pertanian		Masih banyak penempatan SDM yang tidak sesuai keahliannya	Ketersediaan SDM
3	Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sarana prasarana pertanian	Sistem agribisnis belum berjalan dengan benar Lahan pertanian yang harus dikonservasi atau dilestarikan belum <i>up to date</i>	Pemahaman sistem agribisnis dan agroindustri belum direalisasikan	Penumbuhan agroindustri
4	Mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian berwawasan lingkungan	Inkonsistensi antara pembangunan dan dukungan anggaran	Saprodi belum memadai	Peningkatan infrastruktur pertanian

5	Meningkatkan akses pasar dan permodalan	Kemitraan belum terjalin dengan baik	Sarana pendukung pemasaran pertanian belum memadai	Perbaikan tata niaga pertanian
				Pembuatan kawasan pertanian berkelanjutan

Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya terfokus pada Pengembangan Agribisnis, dimana pelaku utama yang dikedepankan adalah petani yang sejahtera dengan segala aspek pendukungnya seperti sarana dan prasarana, kelembagaannya, sistem informasinya serta aspek penyuluhan bagi petani. Kebijakan tersebut memiliki faktor penghambat berupa SDM petani yang masih rendah, luas lahan yang semakin sempit, tataniaga yang belum baik, akses informasi petani masih terbatas, sedangkan faktor pendorongnya adalah ***bahwa Peningkatan Kemandirian Jawa Barat Dalam Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan.***

4. Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat adalah "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat".

Misinya adalah sebagai berikut :

- 1) Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis;
- 2) Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan; dan

- 3) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan.

Kebijakan pembangunan peternakan di Jawa Barat diarahkan pada optimalisasi, potensi dasar daerah untuk :

- 1) Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya lokal,
- 2) Perluasan lapangan kerja berbasis agribisnis peternakan,
- 3) Meningkatkan produktivitas usaha,
- 4) Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal.

Kebijakan jangka menengah propinsi Jawa Barat di bidang peternakan pada prinsipnya terfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan produktivitas serta peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan tersebut berkaitan dengan permasalahan pelayanan SKPD DPPK terkait dengan masalah Penyediaan Bibit Unggul, Kelembagaan Tani Ternak, Infrastruktur dan Sarana Prasarana. Faktor penghambatnya adalah berupa produktivitas ternak yang masih rendah, terbatasnya SDM petugas teknis, lemahnya SDM petani ternak, serta sulitnya meningkatkan nilai tambah produk akibat kurang efisiennya proses produksi. *Faktor pendorongnya adalah bahwa potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi.*

Tabel 3.8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pertanian, Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi : "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat"				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan DPPK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1.	Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis	Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi sumber daya ternak dan lahan
2.	Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan	Penyediaan Bibit Unggul, Kelembagaan Tani Ternak, Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi sumber daya ternak dan lahan
3.	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan	Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi permintaan produk

Tabel.3.9 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program

Visi : DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata			
	Program : a. Peningkatan Kesejahteraan Petani.	Kesejahteraan Petani dan buruh tani belum meningkat	SDM Petani masih lemah/rendah Modal Usaha Tani terbatas	Potensi SDM Kelompok Tani Hutan/Kebun
	b. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan	Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan belum optimal	Sarana Produksi (Bibit, pupuk) yang berkualitas masih terbatas Pemeliharaan tanaman belum optimal Pendanaan terbatas	Potensi Komoditi Perkebunan cukup tersedia

5. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah "***Tercapainya Masyarakat Agribisnis Perkebunan Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera***". Sejalan dengan visi tersebut, maka *Misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat* adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,
2. Meningkatkan Mutu hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha Perkebunan,
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan.

Beberapa program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang sangat erat hubungannya dengan program kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya khususnya Bidang Perkebunan, yang meliputi:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian;
2. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit *Tanaman, Ternak* dan Ikan;
4. Program Pemasaran & Pengolahan Hasil *Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan* dan Kehutanan.

6. Arah dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Secara sub sektoral, kebijakan pengembangan Ketahanan Pangan di Indonesia harus mengacu pada arah dan kebijakan yang digariskan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagai eselon I yang menangani bidang ketahanan pangan.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan

kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah dijabarkan dalam PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Sejalan dengan Undang-Undang Pangan tersebut, pemerintah baru dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menempatkan pangan sebagai salah satu agenda penting pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2015-2019 bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumberdaya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, serta 27 Peraturan/Surat Edaran Gubernur di 27 Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dapat segera terwujud manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif.

Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu : “Terwujudnya **ketahanan pangan** melalui **penganekaragaman pangan** berbasis **sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan**”.

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “*lead institution*” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- b. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
- c. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
- d. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- e. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) pemerintahan Joko Widodo dan Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan

untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2020-2024 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2020-2024 adalah: (1) Korporasi petani; (2) Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando; (3) Pertanian Keluarga (Family Farming) (4) Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's).

a. Analisis dan Telaahan Terhadap Arah dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Arah dan kebijakan pangan nasional merujuk pada satu tujuan yaitu kedaulatan pangan. Prioritas utama pembangunan ketahanan pangan nasional adalah peningkatan ketersediaan pangan produksi local, distribusi dan aksesibilitas pangan untuk stabilitas harga mencegah spekulasi, peningkatan cadangan pangan pemerintah, serta perbaikan kualitas dan konsumsi gizi masyarakat.

Berdasarkan telaahan tersebut, kebijakan pangan daerah sudah seharusnya mendukung pencapaian tujuan kedaulatan pangan dimaksud. Pemerintah daerah harus memprioritaskan

pada ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

Tabel 3.10
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Visi : “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan Dispersikan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Ketersediaan pangan kurang memadai	Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding produksi pangan;	Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU pangan Adanya potensi alam yang cukup mendukung
2.	Memantapkan penanganan kerawanan pangan	Fluktuasi harga pangan	Fasilitas lumbung pangan yang tidak berjalan optimal	Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU pangan Adanya potensi alam yang cukup mendukung
3.	Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok	Lemahnya lembaga distribusi pangan masyarakat	Infrastruktur yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan	Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU pangan Adanya potensi alam yang cukup mendukung

Visi : “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”			
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan Dispersikan	Faktor

4.	Mewujudkan keamanan pangan segar	Kesadaran akan konsumsi dan keamanan pangan	Rendahnya keanekaragaman dan pengawasan keamanan pangan	Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU di bidang ketahanan pangan Adanya potensi alam yang cukup mendukung
----	----------------------------------	---	---	--

7. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat".

Misinya adalah sebagai berikut :

- 1) Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis;
- 2) Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan; dan
- 3) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan.

Dengan demikian kebijakan pembangunan peternakan di Jawa Barat diarahkan pada optimalisasi, potensi dasar daerah untuk :

- 1) Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya lokal,
- 2) Perluasan lapangan kerja berbasis agribisnis peternakan,
- 3) Meningkatkan produktivitas usaha,
- 4) Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal.

Kebijakan jangka menengah propinsi Jawa Barat di bidang peternakan pada prinsipnya terfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan produktivitas serta peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan tersebut berkaitan dengan permasalahan pelayanan SKPD DPPK terkait dengan masalah Penyediaan Bibit Unggul, Kelembagaan Tani Ternak, Infrastruktur dan Sarana Prasarana. Faktor penghambatnya adalah berupa produktivitas ternak yang masih rendah, terbatasnya SDM petugas teknis, lemahnya SDM petani ternak, serta sulitnya meningkatkan nilai tambah produk akibat kurang efisiennya proses produksi. Faktor pendorongnya adalah bahwa potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi.

Tabel 3.12

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat**

Visi : "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat"				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan DPPK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis	Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi sumber daya ternak dan lahan

2.	Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan	Penyediaan Bibit Unggul, Kelembagaan Tani Ternak, Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi sumber daya ternak dan lahan
3.	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan	Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi permintaan produk

8. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 *“Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Jawa Barat yang maju dan sejahtera*
“

Pernyataan visi tersebut, memiliki beberapa kata kunci yang menjadi unsur pendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta menjadi pengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembangunan perikanan dan kelautan.

MAJU berarti : *Sikap dan kondisi masyarakat perikanan dan kelautan yang produktif, berdaya saing, dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak, dan adaptif terhadap dinamika perubahan, namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.*

SEJAHTERA berarti : *Sikap dan kondisi masyarakat perikanan dan kelautan Jawa Barat yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupannya*

Misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumberdaya perikanan dan kelautan;
2. Meningkatkan usaha dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.
3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan.

Dari misi yang diemban oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk serta pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Tabel 3.13
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Visi : 2020 “Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Jawa Barat yang maju dan sejahtera “				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan DPPK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumberdaya perikanan dan kelautan	Kepastian tata ruang usaha budidaya perikanan	Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Tersedianya potensi sumber daya perikanan dan kelautan

2.	Meningkatkan usaha dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan	Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustri	Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Tersedianya teknologi pendukung
3.	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan	Keterbatasan Sarana Prasarana Pendukung Perikanan dan Kelautan	Keterbatasan SDM aparatur	Tersedianya teknologi pendukung

3.4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

3.4.1 Kondisi Internal Dan Eksternal Pada Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya

a) ANALISIS INTERNAL (*STRENGTH AND WEAKNESESS* / KEKUATAN DAN KELEMAHAN)

FAKTOR <i>STRENGTHS</i>/KEKUATAN	FAKTOR <i>WEAKNESESS</i>/KELEMAHAN
a. Memiliki kewenangan dengan Perbup Nomor 67 tahun 2016	a. Motivasi kerja aparatur belum optimal
b. Keberadaan kelembagaan pertanian UPT/UPTD	b. Database yang masih kurang baik.
c. Tersedianya aparatur pertanian	c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia

Penjelasan Kekuatan

- (1) Peraturan merupakan dasar yang kuat dalam kewenangan penyelenggaraan suatu instansi, maka dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 menjadi dasar yang kuat dan payung hukum dalam penyelenggaraan suatu instansi.

- (2) Keberadaan kelembagaan pertanian seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas seyogyanya menjadi kekuatan dalam membantu penyelenggaraan suatu instansi.
- (3) Tersedianya aparatur pertanian merupakan modal utama dalam pelaksanaan suatu penyelenggaraan instansi.

Penjelasan Kelemahan

- (1) Motivasi kerja yang belum optimal didasari pada penempatan aparatur yang kurang sesuai dengan pendidikannya dapat menjadi pemicu kurangnya optimalisasi kinerja aparatur.
- (2) Database yang masih kurang baik, karena belum optimalnya koordinasi antar sektor pertanian.
- (3) Sarana dan prasarana pada kenyataannya untuk dinas pertanian belum terealisasi secara nyata : kantor dinas terpisah jauh dengan kawasan perkantoran, UPT wilayah belum memiliki kantor, terbatasnya sarana mobilitas dan informasi sehingga menjadi kendala baik dalam koordinasi, kearsipan maupun aksesibilitas.

b) ANALISIS EKSTERNAL (*OPPORTUNITIES AND THREATS* / PELUANG DAN ANCAMAN)

FAKTOR <i>OPPORTUNITIES</i> / PELUANG	FAKTOR <i>THREATS</i> / ANCAMAN
a. Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.	a. Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/ hewan).
b. Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang.	b. Menurunnya minat masyarakat untuk usaha tani.
c. Terbukanya pangsa pasar untuk komoditas pertanian	c. Adanya globalisasi pasar bebas
d. Adanya UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan.	d. Alih fungsi lahan pertanian tinggi

Penjelasan Peluang

- (1) Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam, wilayah binaan yang terdiri dari 39 kecamatan dengan berbagai potensi unggulan komoditas baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (2) Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin meningkat, dengan indikasi penerapan adopsi inovasi teknologi pertanian oleh para petani yang salah satunya Kabupaten Tasikmalaya sebagai penghasil dan sebagai eksportir beras organik di Jawa Barat dan penghasil manggis terbesar di Jawa Barat merupakan suatu peluang untuk lebih dikenal ke khalayak luas.
- (3) Pangsa pasar selalu terbuka mengikuti *trend* dan kebutuhan maka ini menjadi suatu peluang yang bisa dimanfaatkan.
- (4) UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan yang menjadi acuan penyusunan Perda tentang konversi lahan dan perlindungan lahan berkelanjutan.

Penjelasan Ancaman

- (1) Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan), Tasikmalaya merupakan daerah yang rawan bencana khususnya gempa dan tanah longsor menjadi suatu ancaman bagi wilayah-wilayah binaan Dinas Pertanian disamping gangguan OPT.
- (2) Menurunnya minat masyarakat terhadap usahatani terutama generasi muda yang menganggap bahwa usaha pertanian kurang bergengsi selain itu petani di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah masyarakat tani subsisten.
- (3) Pasar bebas dan globalisasi menjadi suatu ancaman bagi masyarakat yang belum siap mengikuti arus globalisasi.

- (4) Alih fungsi lahan pertanian tinggi akan menyebabkan lahan-lahan pertanian yang potensial semakin berkurang.

Tabel 3.12 Penggambaran Matriks Analisis SWOT

INTERNAL EKTERNAL	<u>Strenght</u>	<u>Weaknesses</u>
	a. Memiliki kewenangan dengan Perbup No.67 tahun 2016 b. Keberadaan kelembagaan pertanian UPTD c. Tersedianya aparatur pertanian	a. Motivasi kerja aparatur belum optimal b. Database yang masih kurang baik. c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia
<u>Opportunities</u>	<u>Strategi SO</u>	<u>Strategi WO</u>
a. Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. b. Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. c. Terbukanya pangsa pasar untuk komoditi pertanian d. Adanya UU No. 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan.	a. Memanfaatkan peraturan daerah No.67 tahun 2016 dalam penggunaan sarana prasarana untuk mendukung pembangunan pertanian b. Memanfaatkan keberadaan UPT untuk menginventarisir potensi wilayah yang belum tergal dengan baik. c. Mengoptimalkan keberadaan aparatur pertanian untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif di wilayah binaannya khususnya di pedesaan d. Penyusunan Perda tentang lahan berkelanjutan	a. Menciptakan konsep panduan mengenai kepemimpinan dan penciptaan tatanan kerja yang kondusif b. Membentuk struktur intern yang lebih solid serta penempatan aparatur yang profesional c. Memperbaiki dan melengkapi database supaya lebih <i>up to date</i> d. Menyelenggarakan diklat teknis substantif pertanian e. Pembenahan dan pembangunan kantor-kantor UPT wilayah f. Pemutakhiran data lahan pertanian yang potensial untuk dijadikan lahan berkelanjutan
<u>Threats</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
a. Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan). b. Menurunnya minat masyarakat untuk usaha tani. c. Adanya globalisasi pasar bebas d. Alih fungsi lahan pertanian tinggi	a. Memasyarakatkan usahatani konservasi yang berwawasan lingkungan b. Mengoptimalkan keberadaan kelembagaan sesuai dengan payung hukum yang ada c. Memberdayakan keberadaan UPT untuk menginventarisir daerah-daerah yang berpotensi rawan bencana d. Mengoptimalkan keberadaan aparatur pertanian untuk	

	meningkatkan minat masyarakat melalui penyuluhan dan penerapan usahatani berwawasan agribisnis	
	e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui pendekatan RTRW	

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.17
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 7.400 (tujuh ribu	Pengembangan Budidaya Ternak Besar di Prioritaskan di wilayah Selatan, Budidaya Ternak Kecil di	a. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Adanya peruntukan yang jelas bagi pengembangan kawasan peternakan memberikan dampak	Pengembangan Budidaya Ternak Besar di Prioritaskan di wilayah Selatan, Budidaya Ternak Kecil di wilayah tengah, timur

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	empat ratus) hektar	wilayah tengah, timur dan barat serta budidaya ternak unggas di seluruh wilayah. Pengembangan Pengolahan hasil dan pascapanen diprioritaskan di pusat-pusat pertumbuhan perkotaan.	Ternak c. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Peternak d. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternak Rakyat e. Peningkatan Ketahanan Pangan	yang signifikan terhadap peningkatan usaha ternak rakyat	dan barat serta budidaya ternak unggas di seluruh wilayah. Pengembangan Pengolahan hasil dan pascapanen diprioritaskan di pusat-pusat pertumbuhan perkotaan.
2	Kawasan peruntukan budidaya perikanan berupa budidaya perikanan air tawar kolam seluas kurang lebih 2.988 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar berada di seluruh kecamatan	Pengembangan budidaya ikan air tawar di hamper seluruh wilayah dengan kondisi air yang memadai. Pengembangan budidaya ikan laut di wilayah kecamatan pesisir.	a. Pengembangan Budidaya Perikanan b. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Penyediaan ruang lahan kolam dengan kualitas air yang memadai akan dapat memberikan pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap usaha budidaya ikan masyarakat	Pengembangan budidaya ikan air tawar di hampir seluruh wilayah dengan kondisi air yang memadai. Pengembangan budidaya ikan laut di wilayah kecamatan pesisir.
3	jalur penangkapan I meliputi : 1) jalur penangk	Sesuai dengan rencana pola ruang	a. Pengembangan Perikanan Tangkap b. Optimalisasi	Adanya pola ruang sesuai dengan jalur penangkapan memberikan	Sesuai dengan rencana pola ruang

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	apan ikan I A berada pada perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah ; dan 2) jalur penangkapan ikan I B berada pada perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut. jalur penangkapan II berada pada perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan jalur penangkapan III meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan II.		si Pengelola dan Pemasaran Produksi Perikanan	dampak yang signifikan terhadap usaha penangkapan ikan nelayan kecil	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	KSK Kawasan Pesisir meliputi : 1. Kecamatan Cipatujah; dan 2. Kecamatan Cikalong.	Sesuai dengan rencana pola ruang	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Adanya kepastian zonasi kawasan pesisir memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat pesisir	Sesuai dengan rencana pola ruang

Dalam pelaksanaan pelayanan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor-faktor penghambat dan pendorong berkaitan dengan Rencana Tata Ruang wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Telaahan RTRW Kabupaten Tasikmalaya

No.	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dispersikan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan Peruntukan kawasan pertanian/Kawasan Budidaya pertanian	Belum adanya kawasan peruntukan agroindustri Belum Tercapainya Indikator Renstra	Pengawasan dan pengendalian , Aktivitas yang merusak lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi	Masih terbukanya ruang bagi kawasan budidaya, Adanya LP2B Komitmen pimpinan dengan kebijakan kebijakan yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah

2.	Kawasan peruntukan peternakan, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kelautan (pesisir dan pulau-pulau kecil) baik budidaya (on-farm) maupun industri pengolahan hasil (off-farm)	Infrastruktur dan Sarana Prasarana, belum adanya industri peternakan	Pengawasan dan pengendalian , Aktivitas yang merusak lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi	Masih terbukanya ruang bagi kawasan budidaya
3	Kawasan peruntukan pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kelautan (pesisir dan pulau-pulau kecil) baik budidaya (on-farm) maupun industri pengolahan hasil (off-farm)	Infrastruktur dan Sarana Prasarana, belum adanya industri pertanian/ perikanan	Pengawasan dan pengendalian, Aktivitas yang merusak lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi	Masih terbukanya ruang bagi kawasan budidaya

Dalam melaksanakan pembangunan peternakan perikanan dan kelautan tidak akan terlepas dari asas pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga diperlukan kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 3.19
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya
terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan DPPK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pengelolaan Limbah	Pengawasan dan pengendalian, Aktivitas yang merusak lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi	Tersedianya teknologi ramah lingkungan

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian dan telaahan terhadap Renstra K/L, Renstra Propinsi dan RTRW dan KLHS, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan
2. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan pertanian
4. Keterbatasan akses petani terhadap lembaga permodalan
5. Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian
6. Dampak Perubahan iklim (DPI)
7. Masih rendahnya daya saing kompetitif dan komparatif
8. Masih tingginya penggunaan pupuk dan pestisida an organik
9. Optimalisasi fungsi lahan pangonan sesuai UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
10. Pengembangan Kawasan Peternakan yang terintegrasi
11. Penyediaan bibit dan pengembangan sumberdaya genetik lokal
12. Perluasan areal HMT/HPT dan penyediaan pakan berkualitas
13. Peningkatan daya saing, nilai tambah dan kualitas produk peternakan;
14. Pengendalian Kesehatan Hewan
15. Kelembagaan petani usaha kehutanan dan perkebunan belum tertata dengan baik.
16. Kemandirian Perikanan Budidaya
17. Keberlanjutan, daya saing dan nilai tambah usaha dan produk perikanan budidaya.

- 
18. Kesejahteraan pelaku usaha perikanan budidaya
 19. Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya di UPR dan UPTD.
 20. Keberlanjutan dan daya saing usaha perikanan tangkap
 21. Pemberdayaan Nelayan Kecil
 22. Peningkatan jumlah ukuran kapal perikanan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan.
 23. Pengelolaan tempat pelelangan ikan dan cara penanganan hasil tangkapan ikan yang baik;
 24. Revitalisasi lumbung pangan masyarakat, usaha pangan masyarakat dan lembaga distribusi pangan masyarakat;
 25. Peningkatan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah;
 26. Mewujudkan desa mandiri pangan;
 27. Peningkatan upaya penanganan rawan pangan;
 28. Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari;
 29. Peningkatan penganekaragaman pangan,

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah difokuskan dalam menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya (pertanian, ketahanan pangan dan perikanan).

Misi RPJMD yang terkait dengan bidang tugas Perangkat Daerah adalah **Misi Ketiga yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;** bermakna *Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.*

Sementara sasaran Daerah yang terkait adalah **Sasaran : Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah.**

Ketahanan pangan masyarakat perlu diperkuat dan ditingkatkan, mengingat masalah pangan sangat rentan sekali terkena dampak dari perkembangan makro maupun global.

Perlu adanya dukungan seluruh sektor perekonomian masyarakat yaitu diantaranya sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan. Agar terwujud **misi ke 2 tersebut** maka para pelaku usaha pertanian yaitu petani, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan pemasar hasil perikanan serta nelayan perlu ditingkatkan kesejahteraannya.

Dalam mendukung program pembangunan daerah tersebut, maka diimplementasikan dalam **tujuan** yang ingin dicapai oleh **Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan** yaitu ” **Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah**”.

Indikator dari tujuan tersebut adalah **(1) Nilai Tukar Petani/Nelayan** dan **(2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**;

Tabel IV.1.
Target Skor Pola Pangan Harapan dan Persentase PDRB
Tahun 2021-2026

No	Tahun	Skor PPH Konsumsi	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Nelayan
1	2021	75,82	93,18	111,47
2	2022	76,34	93,74	112,14
3	2023	76,87	94,40	112,92
4	2024	77,41	95,15	113,83
5	2025	77,97	96,01	114,85
6	2026	78,52	96,97	115,40

Pada tahun 2021 (akhir masa jabatan kepala daerah), Pola Pangan Harapan ditargetkan mencapai 75,82 yang merupakan indikator ketahanan pangan masyarakat, sedangkan Nilai Tukar Petani/Nelayan sebagai indikator kesejahteraan petani dan nelayan.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran-sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. **SASARAN 1 (S1)** : *Meningkatnya Penyuluhan Pertanian dengan indikator Cakupan bina kelompok tani (Jumlah kelompok tani terbina penyuluh/Total Kelompok tani x 100%).*

Tabel IV.2.
Target Persentase Meningkatnya Penyuluhan Pertanian
Tahun 2021-2026

No	Tahun	Prosentase Peningkatan
1	2021	53,22
2	2022	54,02
3	2023	54,88
4	2024	55,82
5	2025	56,82
6	2026	57,90

- b. **SASARAN 2 (S2)** : Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator *Prosentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*;

Tabel IV.3.
Target Persentase Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Prosentase Peningkatan
1	2021	1
2	2022	1,04
3	2023	1,05
4	2024	1,06
5	2025	1,07
6	2026	1,08

- c. **SASARAN 3 (S3)** : Meningkatnya produksi peternakan dengan indikator kinerja *Prosentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH*;

Tabel IV.4.

**Target Persentase Peningkatan Produksi Peternakan
Tahun 2016-2021**

No	Tahun	Prosentase Peningkatan
1	2021	1
2	2022	1,1
3	2023	1,2
4	2024	1,3
5	2025	1,4
6	2026	1,5

- d. **SASARAN 4 (S4)** : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi. Sasaran ini memiliki indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1) Prosentase Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita adalah ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein. Pencapaian.

**Tabel IV.5. Target Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026**

No	Tahun	Ketersedian Energi/Prot Perkapita	
		Rataan Energi/ Protein	Trend (%)

1	2021	85,07	2
2	2022	86,86	2,1
3	2023	88,77	2,2
4	2024	90,81	2,3
5	2025	92,99	2,4
6	2026	95,31	2,5

2) *Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan*

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Pola konsumsi pangan masyarakat berbeda dan berubah dari waktu ke waktu, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pola konsumsi pangan antara daerah satu dengan daerah lainnya dapat berbeda tergantung dari lingkungannya termasuk sumberdaya dan budaya setempat, Dinamika Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia, selera dan pendapatan masyarakat. Demikian pula pola konsumsi pangan juga akan berubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, perubahan kesadaran masyarakat akan pangan dan gizi serta perubahan gaya hidup. Dengan demikian, perubahan-perubahan tersebut, baik antar daerah maupun antar waktu akan menentukan perubahan berapa pangan yang harus disediakan dan bagaimana distribusinya agar harga pangan tersebut dapat dijangkau masyarakat dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu entripoint dan sub system untuk memantapkan ketahanan pangan.

Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor .

Tabel IV.6. Konsumsi Pangan (Energi dan Protein) Perkapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Tahun	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)
1	2021	2039,45	58,62
2	2022	2082,28	61,02
3	2023	2128,09	63,59
4	2024	2177,03	66,32
5	2025	2229,28	69,24
6	2026	2285,02	72,35

Target jangka menengah (2021-2026) untuk peningkatan konsumsi energi dan protein per kapita adalah 2,1% .

- e. **SASARAN 5 (S5) :** Meningkatnya produksi perikanan dengan indikator Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan. Produksi Perikanan merupakan rekapitulasi produksi ikan yang dihasilkan melalui proses budidaya dari berbagai jenis komoditas ikan air tawar maupun air payau serta produksi ikan yang dihasilkan dari penangkapan di perairan umum laut dan perairan umum daratan (waduk, danau, cekdam, sungai, embung). Target capaian indikator kinerja sasaran peningkatan produksi perikanan selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.8. Target Capaian Peningkatan Produksi Perikanan

No	Tahun	Produksi Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Tangkap	
		Produksi (ton)	Trend (%)	Produksi (ton)	Trend (%)
1	2021	76.271,72	1	1.712,28	1
2	2022	77.797,15	2	1.746,53	2
3	2023	80.131,06	3	1.798,92	3
4	2024	83.336,31	4	1.870,88	4
5	2025	87.503,12	5	1.964,43	5
6	2026	92.753,31	6	2.082,29	6
No	Tahun	Produksi Perikanan			
		Produksi (ton)		Trend (%)	
1	2021	77.984,00		1	
2	2022	79.543,68		2	
3	2023	81.929,99		3	
4	2024	85.207,19		4	
5	2025	89.467,55		5	
6	2026	94.835,60		6	

Tabel IV.9.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN KE					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	75,82	76,34	76,87	77,41	77,97	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi	Prosentase Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
									Prosentase Peningkatan Konsumsi Energi dan Protein Perkapita	%	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
		Nilai Tukar Petani	93,18	93,74	94,40	95,15	96,01	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Capaian Bina Kelompok Tani	%	53,22	54,02	54,88	55,82	56,82
		Nilai Tukar Nelayan	111,47	112,14	112,92	113,83	114,85	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Prosentase Peningkatan Rata-rata Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	1,00	1,04	1,05	1,06	1,07
								Meningkatnya Produksi Peternakan Yang ASUH	Prosentase Peningkatan Produksi Peternakan Yang ASUH	%	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
								Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung tujuan Perangkat Daerah dapat diuraikan secara spesifik mengenai strategi dan kebijakan yang hendak dicapai dari masing-masing Sasaran yaitu sebagai berikut :

1. **SASARAN 1 (S1)** : Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian dengan indikator *cakupan bina kelompok tani*.

Strategi yang diterapkan adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen kelompok tani dengan **arah kebijakan** Penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh pertanian.

2. **SASARAN 2 (S2)** : Meningkatnya rata-rata produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator *Prosentase peningkatan rata-rata produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*;

Strategi yang diterapkan adalah 1) Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan good agriculture practices (GAP) serta meningkatkan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati; 2) Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan perkebunan untuk meningkatkan produksi dan produktifitasnya; 3) Mengoptimalkan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian; 4) Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian; dengan **arah kebijakan** 1) Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan; 2) Peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan melalui penerapan teknologi tepat guna dan diversifikasi usaha serta sinergitas

perencanaan perkebunan, didukung data dan informasi yang berkualitas; 3) Pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian; 4) Penerapan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cetak Sawah Baru.

3. **SASARAN 3 (S3)** : Meningkatnya produksi tanaman pangan, peternakan yang ASUH dengan indikator *Prosentase peningkatan produksi peternakan yang ASUH*;

Strategi yang diterapkan adalah 1) Mengoptimalkan Pengembangan Peternakan Berbasis kawasan yang terintegrasi dengan arah kebijakan; 2) Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis; **dengan arah kebijakan** 1) Peningkatan Populasi Ternak Lokal dengan menstimulasi usaha budidaya ternak di masyarakat; 2) Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis;

4. **SASARAN 4 (S4)** : ” Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi” dengan indikator sasaran :

a. Prosentase Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

b. Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah “Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Pangan lokal”, dengan arah kebijakan “Mengembangkan dan merevitalisasi kelembagaan pangan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan menjadi sumber produksi pangan”.

5. **Sasaran 5 (S5)** : "Meningkatnya produksi perikanan" dengan indikator Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan.

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah "Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi budidaya dan penangkapan ikan", dengan arah kebijakan "Mengembangkan dan merevitalisasi unit pembenihan serta mengoptimalkan pemberdayaan nelayan tangkap laut dan perairan umum".

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran tersebut adalah "Mengoptimalkan pembinaan dalam peningkatan disiplin aparatur" dengan arah kebijakan "Mengoptimalkan dukungan administrasi, manajemen dan sarana prasarana dalam tata kelola pemerintahan".

Strategi dan kebijakan dapat dijabarkan pada tabel V.1. berikut :

Tabel V.I
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah	1. Meningkatnya penyuluhan pertanian	1. Mengoptimalkan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian;	1. Pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian;
	2. Meningkatnya rata-rata Produksi Tanama Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan good agriculture practices (GAP) serta meningkatkan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati;	2. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
		2. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan perkebunan untuk meningkatkan produksi dan produktifitasnya;	3. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui penerapan teknologi tepat guna dan diversifikasi usaha serta sinergitas perencanaan didukung data dan informasi yang berkualitas;
		3. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian;	4. Penerapan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
	3. Meningkatnya Produksi Peternakan Yang ASUH	1. Mengoptimalkan Pengembangan Peternakan Berbasis kawasan yang terintegrasi dengan arah kebijakan;	1. Peningkatan populasi Ternak Lokal dengan mesntimulasi usaha budidaya ternak di masyarakat
		2. Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	2. Peningkatan Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menulat strategis dan zoonosis
	4. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi budidaya dan penangkapan ikan.	1. Mengembangkan dan merevitalisasi unit pembenihan serta mengoptimalkan pemberdayaan nelayan tangkap laut dan perairan umum.
	5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Pangan lokal", dengan arah kebijakan	1. Mengembangkan dan merevitalisasi kelembagaan pangan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan menjadi sumber produksi pangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program/kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya yang secara langsung maupun tidak langsung mengacu dan akan mendukung dan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program, kegiatan dan seub kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmlaya yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program prioritas terpilih untuk menunjang terwujudnya visi misi dimaksud.

Program Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmlaya adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmlaya sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmlaya dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmlaya;
4. Penerapan sub urusan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.



Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmlaya untuk periode Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 6.1 berikut ini :



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan penyelenggaraan bidang urusan urusan PERTANIAN, urusan KETAHANAN PANGAN, urusan KELAUTAN dan PERIKANAN pada masa tahun rencana 2021-2026 disusun sebagai alat ukur keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah sebagai berikut :

Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan

Bidang Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan

1. Nilai Tukar Tani/Nelayan (NTP/NTN)

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu pada RPJMD selengkap pada tabel berikut :

Tabel VII.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten
Tasikmalaya 2021 - 2026

Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Urusan Perikanan

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Urusan Ketahanan Pangan										
1.	Skor Pola Pangan Harapan	poin	75,82	76,34	76,87	77,41	77,97	78,52	78,52	
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi	%	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	
3.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	ton	50	50	60	70	80	90	100	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (indikator SDG's)
Urusan Pertanian										

1.	Nilai Tukar Petani	Indeks	93,18	93,74	94,4	95,15	96,01	96,97	96,97	
	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	111,47	112,14	112,92	113,83	114,85	115,4	115,4	
2.	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	%	53,22	53,22	54,02	54,88	55,82	56,82	56,82	
3.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	%	1	1	1,04	1,05	1,06	1,07	1,07	
4.	Meningkatnya Produksi Peternakan Yang ASUH	%	1	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	
5.	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Ha	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	PERDA NO 4 TH 2016 (Indikator SDG's)
6.	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	ekor	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	Indikator SDG's
7.	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	ekor	4.578	4.499	4.399	4.299	4199	4099	4000	Indikator SDG's
Urusan Perikanan										
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	%	1	1	2	3	4	5	6	
2.	Jumlah nelayan yang terlindungi	Orang	6.863	9.000	9.050	9.060	9.060	9.070	9.070	Indikator SDG's

BAB VIII PENUTUP

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, maka dalam rangka pencapaian program pembangunan ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Tasikmalaya disusunlah Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya 2021–2026 sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan pengembangan ketahanan pangan dan perikanan jangka waktu menengah (lima tahunan). Sebagai proses yang terus menerus maka Renstra senantiasa membuka diri untuk dilakukan evaluasi baik dari sisi formulasi/substansi, implementasi dan dampaknya. Rencana Strategis ini diharapkan memberikan arah dan langkah kebijakan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya sehingga lebih mempermudah dan lebih jelas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas setiap tahun.

KEPALA DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



NURAEIDIDIN, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198403 1 001



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



DINAS PERTANIAN, KETAHANAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
Jalan Sukapura VI Bojongkoneng Singaparna Telepon (0265).330163
fax (02650).330163 email: dkpp@tasikmalayab.go.id



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojonggambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman arah pembangunan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan di Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan program, kegiatan, serta kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok tani dan nelayan, akademisi, maupun masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah secara berkelanjutan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan kinerja, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, peternak, dan nelayan di Kabupaten Tasikmalaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya pertanian maju, ketahanan pangan yang kuat, serta perikanan yang berdaya saing.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	15
1.3 Maksud dan Tujuan	19
1.4 Sistematika Penulisan	20
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS DPKPP KABUPATEN TASIKMALAYA	22
2.1 Gambaran Pelayanan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	22
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKP.....	22
b. Sumber Daya DPKPP Kabupaten Tasikmalaya.....	38
c. Kinerja Pelayanan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	51
d. Kelompok Sasaran Pelayanan	80
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPKPP Kabupaten	
Tasikmalaya	85
a. Permasalahan Pelayanan DPKPP Kabupaten	
Tasikmalaya.....	85
b. Isu Strategis DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	85
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN	
STRATEGI.....	97
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP Kabupaten	
Tasikmalaya 2025-2029.....	97
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi DPKPP dalam Mencapai Tujuan	
dan Sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2025-2029	101

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	108
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPKPP Kab. Tasikmalaya	108
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	153
BAB V PENUTUP	255

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Status Kepegawaian	38
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan	38
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	40
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	53
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	55
Tabel 2.6	Mitra DPKPP dalam Pemberian Pelayanan	75
Tabel 2.7	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja DPKPP	77
Tabel 2.8	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab DPKPP	78
Tabel 2.9	Rumusan Isu DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	81
Tabel 2.10	Isu Strategis DPKPP	85
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	93
Tabel 3.2	Penahapan Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	96
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Rencana Strategis DPKPP Tahun 2025-2029	97
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	104
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	148
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mndukung Program Prioritas Pembangunan Daerah DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	242

Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	246
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci DPKPP Kabupaten Tasikmalaya	248

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	4
Gambar 1.2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	5
Gambar 1.3	Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.	6
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPKPP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau Lembaga pemerintah non

kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya disusun atas dasar kebutuhan organisasi untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang sehingga ada pengakuan (*recognized*) dan respon dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

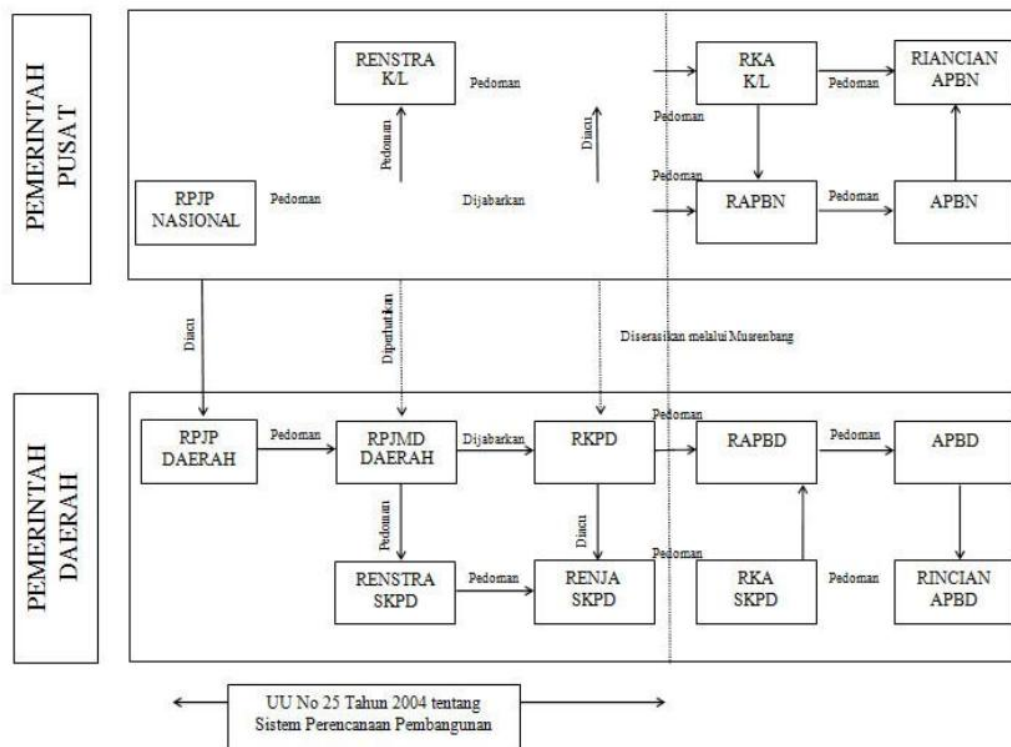
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah) disusun dengan tahapan :

- a) persiapan penyusunan;
- b) penyusunan rancangan awal;
- c) penyusunan rancangan
- d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e) perumusan rancangan akhir; dan
- f) penetapan.

Setelah itu, pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu dikendalikan dan dievaluasi agar sesuai dengan standar penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas selaku pimpinan perangkat daerah, yang mana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya.

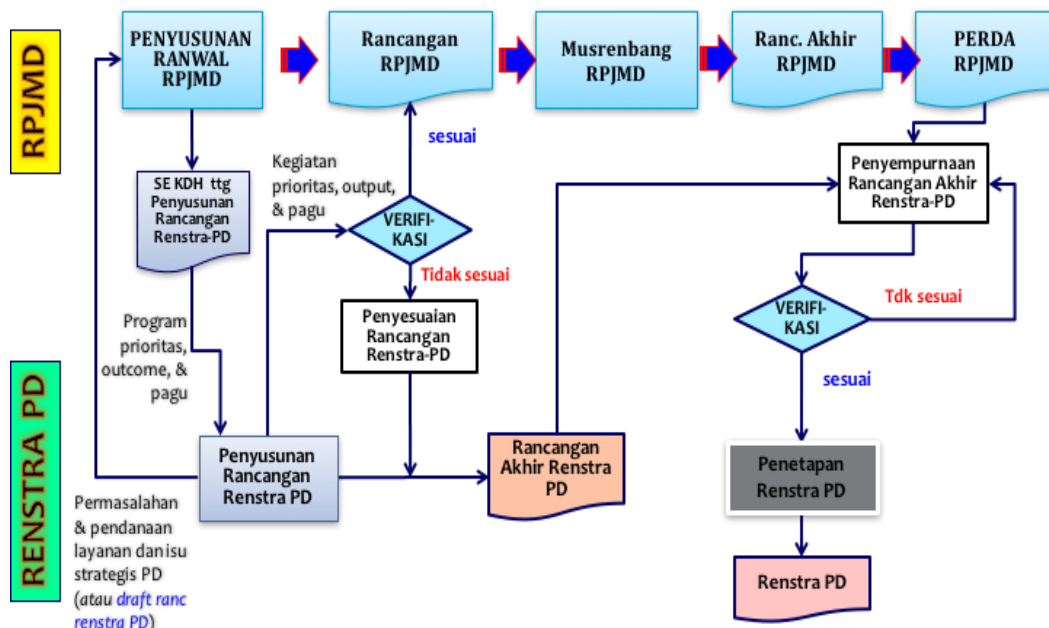
Adapun Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 ditampilkan sebagai berikut :



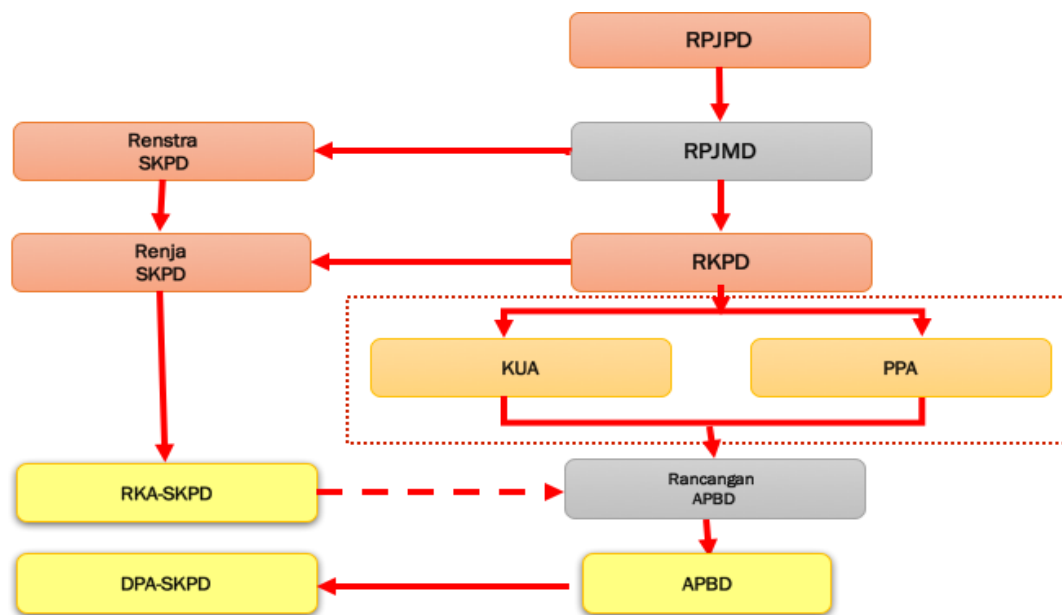
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah kemudian dijabarkan menjadi Program Tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan Pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian Dokumen Perencanaan Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta perkiraan maju yang disusun pada rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.

Rumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen yang utuh dari unsur pimpinan dan staf melalui proses komunikasi yang baik antara *top-down* dan *bottom-up approach*. Untuk mewujudkan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan diperlukan sinergitas dan keterpaduan antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik di daerah maupun nasional.

Rencana strategis menjadi sarana operasional Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal instansi terutama dalam masalah dinamika manajemen dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan peran dan kontribusi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Praktek manajemen yang baik selalu memasukkan pertimbangan perencanaan sumber daya dan anggaran dalam perencanaan strategis. Renstra menggariskan arah perkembangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, sedangkan anggaran merupakan salah satu sumber daya untuk melaksanakannya. Sebaliknya alokasi anggaran yang tidak dilandaskan pada pemikiran yang strategis seringkali tidak responsif terhadap berbagai kondisi dan perubahan dimasa mendatang. Perencanaan Strategis diperlukan untuk memandu proses anggaran dan Kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya periode 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan untuk melaksanakan penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah No. 127 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2042;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
30. Surat Edaran Nomor 0026 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- 1) Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan;
- 2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- 4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 5) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- 6) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Menerjemahkan visi dan misi Bupati Tasikmalaya ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2025-2029, beserta program prioritas dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
- 2) Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- 3) Untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- 4) Merumuskan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2025-2029;
- 5) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2029;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPKPP KABUPATEN TASIKMALAYA

Bab ini menguraikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumberdaya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Capaian Kinerja masa Renstra periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang dihadapi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bab ini menguraikan mengenai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan, pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan DPKPP, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di DPKPP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPKPP KABUPATEN TASIKMALAYA

2.1 Gambaran Pelayanan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKPP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Tugas Pokok: Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pertanian yang terdiri dari Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Penyuluhan, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Perikanan dan Kelautan.

Dengan menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil, perbibitan dan produksi peternakan serta penyuluhan dan sarana prasarana pertanian serta bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
- b. Penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Penyelenggaraan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan mutu, peredaran dan
- e. pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. Penyelenggaraan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- g. Penyelenggaraan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;

- h. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan
- j. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pangan dan perikanan;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan dan perikanan;
- m. Penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, pangan dan perikanan;
- n. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- o. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- p. Pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- q. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
- r. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis.

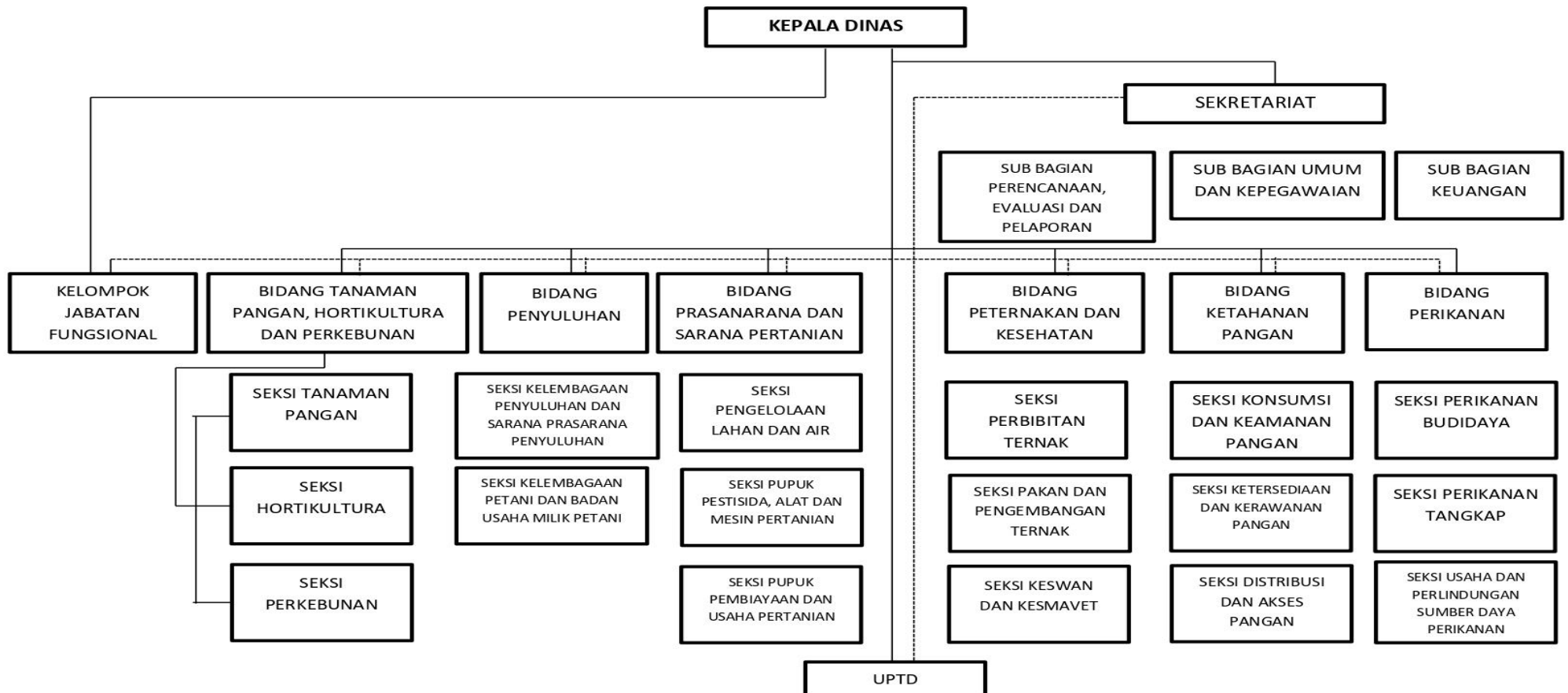
Susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok jabatan Fungsional.
- e. Bidang prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TASIKMALAYA



Rincian tugas pokok seluruh unsur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan tugas Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan perikanan serta pembinaan unit pelaksana teknis Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana prasarana pertanian, peternakan dan Kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan;
4. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan;
5. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepala dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Menyelenggarakan Kordinasi penyusunan program penyuluhan prikanan;
- d. Menyelenggarakan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;
- e. Menyelenggarakan pengawasan mutu, predaran dan pengadilan penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. Menyelenggarakan Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- h. Menyelenggarakan pengadilan dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan/ikan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi penanggulangan bencana alam;
- j. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- k. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- l. Menyelenggarakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan perikanan;
- m. Menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- n. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- o. Menyelenggarakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- p. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- q. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- r. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- s. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
- t. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah; dan
- u. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas;
 - l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
 - o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang tanaman pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meliputi produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan kebijakan teknis operasional produksi tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengadilan, pengembangan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberi bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, koordinasi penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- i. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan meliputi perbibitan dan produksi peternakan, pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi produksi perbibitan peternakan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengembangan peternakan;
- d. Pembinaan usaha sektor peternakan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- d. Menyelenggarakan pengendalian dan penyediaan bibit ternak, pakan ternak dan benih atau bibit hijauan pakan ternak;
- e. Menyelenggarakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- f. Menyelenggarakan proses pemberian izin atau rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- g. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil;
- h. Menyelenggarakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- i. Menyelenggarakan pengawasan obat hewan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- k. Menyelenggarakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- l. Menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi perizinan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunany pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan meliputi aspek kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian mempunyai fungsi :

- 1. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis penyuluhan;
- 2. Penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan meliputi kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuiuhan serta keiembagaan petani dan badan usaha milik petani; dan

3. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Penyuluhan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penyuluhan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang penyuluhan;
- d. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi bidang penyuluhan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan di bidang penyuluhan;
- h. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi kerja sama dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri;
- i. Menyelenggarakan integrasi, sinkronisasi lintas sektor optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- j. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah dalam aspek penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- l. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia penyuluh;

- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang penyuluhan, terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program prasarana dan sarana pertanian;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Penyelenggaraan kebijakan teknis potensi dan pengelolaan dan irigasi pertanian;
- d. Penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- e. Penyelenggaraan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan usaha pertanian; dan
- f. Penyelenggaraan pemberian fasilitasi investasi pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan air serta alat mesin pertanian;

- c. Menyelenggarakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. Menyelenggarakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan dan usaha pertanian;
- f. Menyelenggarakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang ketahanan pangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan pendampingan di bidang ketahanan pangan; dan
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang ketahanan pangan;

- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang ketahanan pangan; dan
- g. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang ketahanan pangan, meliputi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Bidang Perikanan

Bidang perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang perikanan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama di bidang perikanan; dan
- d. Penyelenggaraan pembinaan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perikanan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perikanan;
- b. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- c. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- d. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan budidaya meliputi sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan tangkap meliputi sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- k. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang perikanan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perikanan terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

- b. Sumber Daya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya

1. Kekuatan Sumber Daya Pegawai

Sumber daya manusia di DPKPP sebanyak 371 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai DPKPP Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	137	81	218
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	67	17	84
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu	63	6	69
Jumlah Total		267	104	371

Sumber : data DPKPP diolah Tahun 2025

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai DPKPP Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Jabatan Administrator	5	2	7
3	Jabatan Pengawas	18	3	21
4	Jabatan Fungsional Tertentu (Penyetaraan)	7	3	10
5	Penyuluh Pertanian	141	64	205
6	Medik Veteriner	1	1	2
7	Paramedik Veteriner	3	0	3
8	Pengawas Mutu Pakan	8	2	10
9	Pengawas Bibit Ternak	6	1	7
10	Arsiparis	1	0	1

11	Analisis Pasar Hasil Perikanan	0	1	1
12	Pranata Komputer	0	1	1
13	Perencana	1	1	2
14	Jabatan Fungsional Umum	13	18	31
15	Operator Layanan Operasional	13	1	14
16	Penata Layanan Operasional	7	4	11
17	Pengelola Umum Operasional	41	2	43
18	Pengelola Layanan Operasional	1	0	1
Jumlah Total		267	104	371

Sumber: data DPKPP diolah Tahun 2025

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung	Prasarana	1	Unit	Baik	KIB T.A 2024	Desa Arjasari Kec. Leuwisari/ BPP Leuwisari	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Desa Cibongas RT/RW 03/01 Kec. Pancatengah/ BPP Pancatengah Desa Cikuya Kec. Culamega/ BPP Culamega	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Desa Dirgahayu Kec. Kadipaten/ BPP Kadipaten	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Desa Panyiaran Kec. Cikalong/ Pos IB Kec Cikalong	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Desa Raksasari Kec. Taraju/ BPP Taraju	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Desa Sukaresik Kec. Sukaresik/ BPP Sukaresik	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Desa Tanjungjaya Kec. Tanjungjaya/ BPP Tanjungjaya	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Desa Wargakerta Kec. Sukarame/ BPP Sukarame	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Bantarseureuh Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong/ Pos IB Kec Bantarkalong	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Cikadu Desa Cinunjang Kec. Cibalong/ BPP Cibalong	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Cipari Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang/ BPP Puspahiang	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
			1	Unit	Baik		Jl. Cirengit Desa Cogreg Kec. Cikatomas/ Aula BPP Cikatomas	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Karanglayung Desa Cijulang Kec. Karangjaya/ BPP Cineam	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Mandalajaya Desa Mandalajaya Kec. Cikalong/ BPP Cikalong	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Nangkaleah No.45 Desa Cilampung Hilir Kec. Padakembang/ BPP Padakembang	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Cigereneng Desa Girijaya Kec. Bojongasih/ BPP Bojongasih	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Cipatujah Desa Cipatujah Kec. Cipatujah/ Balai Benih Penyu	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Cipatujah RT/RW 02/01 Desa Tobongjaya Kec. Cipatujah/ Balai Benih Pertanian dan Perkebunan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Cipatujah RT/RW 02/01 Desa Tobongjaya Kec. Cipatujah/ Balai Benih Pertanian dan Perkebunan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Cipatujah RT/RW 02/01 Desa Tobongjaya Kec. Cipatujah/ Balai Benih Pertanian dan Perkebunan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Eks Kewedanaan/ BPP Karangnunggal	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Eks Kewedanaan/ BPP Karangnunggal	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Eks Kewedanaan/ BPP Karangnunggal	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Eks Kewedanaan/ BPP Karangnunggal	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Singaparna Kp. Singarani Desa Cikadongdong Kec. Singaparna/ Pasar Hewan Singaparna	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Singaparna Kp. Singarani Desa Cikadongdong Kec. Singaparna/ Pasar Hewan Singaparna	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Taraju Desa Croyom Kec. Bojonggambir/ BPP Bojonggambir Jl. Sindangraja	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
							Kp. Legok Desa Sindangraja Kec. Jamanis/ BPP Jamanis Jl. Sindangreret Desa Sukasukur Kec. Cisayong/ BPP Cisayong	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Sirnajaya Dusun Sukarapih RT/RW 07/09 Desa Karangjaya Kec.Karangjaya/ BPP Karangjaya	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Sukapura VI Kp. Bojongkoneng Desa Sukaasih Kec. Singaparna/ Gedung Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Jl. Sukaraja No. 54 Desa Margajaya Kec. Mangunreja/ BPP Mangunreja	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Tanjak Nangsi No.11 Desa Pagerageung Kec. Pagerageung/ BPP Pagerageung	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Tonjong Desa Janggala Kec. Sukaraja/ BPP Sukaraja	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Warung Sumedang No. 27 Desa Manonjaya Kec. Manonjaya/ BPP Manonjaya	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Babakan Cihonje Desa Tanjungpura Kec. Rajapolah/ BPP Rajapolah	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Bojong Desa Sukamantri Kec. Ciawi/ BPP Kec. Ciawi	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibengang Desa Sodonghilir Kec. Sodonghilir/ BPP Sodonghilir	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibengang Desa Sodonghilir Kec. Sodonghilir/ BPP Sodonghilir	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilaja Desa Rancapaku Kec. Padakembang/ BBI Rancapaku Kp. Cilaja Desa Rancapaku Kec. Padakembang/ BBI Rancapaku Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cioray Desa Jatiwaras Kec. Jatiwaras/ Puskesmas Jatiwaras Kp. Ciranca RT/RW 04/02 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ Pasar Hewan Pancatengah	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Desko Desa Papayan Kec. Jatiwaras/ BPP Jatiwaras	Data Sesuai KIB Terbaru

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
								(KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Kelengsari Desa Sukahening Kec. Sukahening/ BPP Sukahening	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Kubangeceng RT/RW 03/02 Desa Mekarjaya Kec. Padakembang/ Pasar Ikan Padakembang	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Malaganti Desa Sukaharja Kec. Sariwangi/ BPT Kambing PE	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Malaganti Desa Sukaharja Kec. Sariwangi/ BPT Kambing PE	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Mongor RT/RW 03/01 Desa Margajaya Kec. Mangunreja/ UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan Kp. Pasir Kincir RT/RW 27/02 Desa Neglasari Kec. Salawu/ BPP Salawu Kp. Pasirmalang Desa Lengkongjaya Kec. Cigalontang/ BPP Cigalontang Kp. Sangkali Desa Cogreg Kec.	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Sindanghurip RT/RW 03/04 Desa Jatihurip Kec. Cisayong/ Pasar Ikan Jatihurip	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Singar RT/RW 31/09 Desa Kamulyan Kec. Manonjaya/ Pasar Hewan Manonjaya	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Sumber Jaya Desa Baru Mekar Kec. Parungponteng/ BPP Parungponteng Kp. Tabrik Desa Jayaratu Kec.Sariwangi/ BPP Sariwangi	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
2	Bangunan Gedung	Prasarana	1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Cipatujah RT/RW 02/01 Desa Tobongjaya Kec. Cipatujah/ Balai Benih Pertanian dan Perkebunan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
			1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Mongor RT/RW 03/01 Desa Margajaya Kec. Mangunreja/ UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan Kp. Mongor RT/RW 03/01 Desa Margajaya Kec. Mangunreja/ UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cisurupan RT/RW 03/07 Desa Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya/ Balai Benih Pertanian dan Perkebunan/ Gudang	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Tumaritis RT/RW 02/09 Desa Cikawungading Kec. Cipatujah/ TPI dan PPI	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
							Embung Desa Guranteng Embung Desa Karangjaya Embung Desa Karangsari Embung Desa Pageralam Embung Desa Sukajayaguna	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cisurupan RT/RW 03/07 Desa Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya/ Balai Benih Pertanian dan Perkebunan/ Gudang	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Cipatujah Desa Cipatujah Kec. Cipatujah/ Balai Benih Penyu	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilaja Desa Rancapaku Kec. Padakembang/ BBI Rancapaku Kp. Cilaja Desa Rancapaku Kec. Padakembang/ BBI Rancapaku Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
							Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
			1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cimuta RT/RW 03/01 Desa Cintaraja Kec. Singaparna/ RPH Singaparna Baru	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Sindanghurip RT/RW 03/04 Desa Jatihurip Kec. Cisayong/ Pasar Ikan Jatihurip	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
							Rehabilitasi Pasar Ikan Singaparna	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Pagerageung Kp. Tanjaknangsi RT/RW 03/01 Desa Pagerageung Kec. Pagerageung/ Puskesmas Pagerageung Kp. Ranto Desa Pakemitan Kec.	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
							Cikatomas/ Puskesmas Cikatomas	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Eks. Kewadanaan Kec. Karangnunggal/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Sukasirna RT/RW 07/02 Desa Sukaratu Kec. Sukaratu/ BPP Sukaratu Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec.	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
							Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
							Kec. Pagerageung/ Poskeswan Pagerageung	Data Sesuai KIB Terbaru

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
								(KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Ciranca RT/RW 04/02 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ Pasar Hewan Pancatengah	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Singar RT/RW 31/09 Desa Kamulyan Kec. Manonjaya/ Pasar Hewan Manonjaya	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Singar RT/RW 31/09 Desa Kamulyan Kec. Manonjaya/ Pasar Hewan Manonjaya	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Tumaritis RT/RW 02/09 Desa Cikawungading Kec. Cipatujah/ TPI dan PPI	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cimuta RT/RW 03/01 Desa Citaraja Kec. Singaparna	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Citoe Mekar Desa Cidadap Kec. Karangnunggal/ Rumah Jaga Tambak Ikan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Malaganti Desa Sukaharja Kec. Sariwangi/ BPT Kambing PE	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Kebon Salak Blok Pajagalan Kec. Singaparna/ RPH Singaparna Lama Kp. Cimuta RT/RW 03/01 Desa Citaraja Kec. Singaparna/ RPH Singaparna Baru	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cisalam RT/RW 02/01 Desa Pasirpanjang Kec. Manonjaya/ RPH Manonjaya	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Lanbau RT/RW 04/08 Desa Pakemitan Kec. Ciawi/ Pasar Hewan dan RPH Ciawi	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Lanbau RT/RW 04/08 Desa Pakemitan Kec. Ciawi/ Pasar Hewan dan RPH Ciawi	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Pamoekan RT/RW 18/03 Desa Sindangkerta Kec. Cipatujah/ TPI Pamoekan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Malaganti Desa Sukaharja Kec. Sariwangi/ BPT Kambing PE	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Malaganti Desa Sukaharja Kec. Sariwangi/ BPT Kambing PE	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Malaganti Desa Sukaharja Kec. Sariwangi/ BPT Kambing PE	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
							Desa Mekarjaya Kec. Padakembang	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Ciawi Desa Kadipaten Kec. Kadipaten/ Technopark	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Raya Cipatujah RT/RW 02/01 Desa Tobongjaya Kec. Cipatujah/ Balai Benih Pertanian dan Perkebunan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
			1	Unit	Baik		Jl. Sirnajaya Dusun Sukarapih RT/RW 07/09 Desa Karangjaya Kec.	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
							Karangjaya/ BPP Karangjaya	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Jl. Sukapura VI Kp. Bojongkoneng Desa Sukaasih Kec. Singaparna/ Gedung Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibayah RT/RW 012/006 Desa Tawang Kec. Pancatengah/ UPTD Pembibitan Ternak	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cibangang Desa Sodonghilir Kec. Sodonghilir/ BPP Sodonghilir	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cilaja Desa Rancapaku Kec. Padakembang/ BBI Rancapaku Kp. Cilutung RT/RW 03/02 Desa	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
							Cikapinis Kec. Karangnunggal/ UPTD Kultur Jaringan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Cioray Desa Jatiwaras Kec. Jatiwaras/ Puskesmas Jatiwaras Kp. Cirando Desa Kadipaten Kec. Kadipaten	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Malaganti Desa Sukaharja Kec. Sariwangi/ BPT Kambing PE	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Malaganti Desa Sukaharja Kec. Sariwangi/ BPT Kambing PE	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Mongor RT/RW 03/01 Desa Margajaya Kec. Mangunreja/ UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan Kp. Mongor RT/RW 03/01 Desa Margajaya Kec. Mangunreja/ UPTD Balai Benih Pertanian dan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
							Perkebunan Kp. Mongor RT/RW 03/01 Desa Margajaya Kec. Mangunreja/ UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan Kp. Mongor RT/RW 03/01 Desa Margajaya Kec. Mangunreja/ UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan Kp. Nangkasari Desa Parung Kec.	
							Cibalong/ Puskesmas Cibalong Kp. Pasirjaya Desa Sirnajaya Kec. Sukaraja/ Pos IB Sukaraja	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Eks. Kewadanaan Kec. Karangnunggal/ BPP Karangnunggal	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
			1	Unit	Baik		Kp. Mongor RT/RW 03/01 Desa Margajaya Kec. Mangunreja/ UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan	Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
3	Kendaraan Dinas	Sarana						Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Mini Bus		12	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Pick Up		5	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Sepeda Motor		180	Unit	10 Rusak			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
4	Komputer/Laptop	Sarana						Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Mini Komputer		2	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	P.C Unit		100	Unit	1 Rusak			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Laptop		70	Unit	7 Rusak			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Note Book		96	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
5	Printer	Sarana	71	Unit	13 Rusak			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
6	Meja Kerja	Sarana		Unit				Data Sesuai KIB Terbaru

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
								(KIB 2024)
	Metal		1	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Kayu		36	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Meja Eselon II		1	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	III		6	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	IV		16	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Meja Kerja Non Struktural		234	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
	Meja Kerja Lain lain		5	Unit	Baik			Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)
7	Kursi Rapat	Sarana	0	Buah				Data Sesuai KIB Terbaru (KIB 2024)

Sumber : Data DPKPP diolah Tahun 2025

c. Kinerja Pelayanan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan, terutama dalam aspek penguatan produksi pertanian, pengelolaan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor perikanan. Pada awal tahun 2020, DPKPP masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pertanian yang belum merata, rendahnya pemanfaatan teknologi oleh petani dan nelayan, serta fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi kesejahteraan pelaku usaha tani dan nelayan.

Namun, seiring berjalannya waktu, melalui perencanaan strategis yang berkelanjutan, DPKPP berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperbarui data pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan secara berkala. Selama periode tersebut, DPKPP juga fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan pendekatan berbasis teknologi informasi, seperti penggunaan sistem informasi pertanian, platform digital pemasaran hasil pertanian, dan media daring untuk menyebarkan informasi harga, cuaca, serta edukasi budidaya.

Kegiatan bimbingan teknis, sekolah lapang, pelatihan budidaya berkelanjutan, dan penguatan kelompok tani/nelayan dilakukan secara rutin bersama masyarakat dan aparat desa. Upaya ini membentuk ekosistem pertanian, pangan, dan perikanan yang lebih adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim serta dinamika pasar. Hal ini juga berkontribusi pada meningkatnya indeks ketahanan pangan daerah secara bertahap dari tahun ke tahun.

Selain itu, perbaikan tampak pada meningkatnya keterlibatan aktif DPKPP dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, termasuk integrasi isu pangan, pertanian, dan perikanan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Dukungan dari

pemerintah daerah serta sinergi dengan lembaga vertikal, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan kelompok tani/nelayan menjadikan DPKPP lebih responsif dalam menghadapi tantangan pangan dan pertanian yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, serta kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam perbaikan kinerja pelayanan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	N/A	N/A	N/A	N/A	53,22	54,02	54,88	55,82	N/A	24,53	40,83	80,32	93,38	N/A	0,46	0,76	1,46	1,67
2	Persentase Peningkatan Poduksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	N/A	N/A	N/A	0,31	1,00	1,04	1,05	1,06	0,71	2,05	0,91	1,02	-3,57	0,71	2,05	0,88	0,97	-3,37
3	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Yang ASUH	N/A	N/A	N/A	0,50	1,00	1,10	1,20	1,30	0,33	0,58	2,10	0,71	-6,03	0,33	0,58	1,91	0,59	-4,64
4	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	2,00	2,00	3,00	3,10	3,20	2,00	2,30	3,27	2,37	3,34	2,00	1,15	1,09	0,76	1,04
5	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	N/A	N/A	N/A	2,95	1,00	2,00	3,00	4,00	2,90	1,34	2,25	2,72	1,04	2,90	1,34	1,13	0,91	0,26

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa terdapat 3 indikator yang tidak tercapai, yaitu :

1. Cakupan Bina Kelompok Tani

- a. Terjadi peningkatan signifikan dari 24,53% pada tahun 2020 menjadi 93,38% pada tahun 2023.
- b. Rasio capaian melonjak dari 0,46 pada tahun 2020 menjadi 1,67 pada tahun 2023, mencerminkan keberhasilan pembinaan kelompok tani.

2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

- a. Capaian fluktuatif, sempat naik ke 2,05% pada 2021, namun turun menjadi -3,57% pada 2023.

- b. Rata-rata capaian belum konsisten, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan harga pasar.
- 3. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)
 - a. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 2,10%, namun terjadi penurunan signifikan pada 2023 (-6,03%).
 - b. Perlu penguatan pengendalian penyakit ternak dan akses pasar.
- 4. Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat
 - a. Capaian relatif stabil, berada pada kisaran 2,00%–3,34% selama periode 2020–2024.
 - b. Menunjukkan keberhasilan program diversifikasi pangan meskipun laju peningkatan melambat di beberapa tahun.
- 5. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan
 - a. Pencapaian awal tinggi (2,90% pada 2020), menurun pada 2021, lalu naik kembali di 2022 (2,72%), namun stagnan di 2023–2024.
 - b. Kinerja dipengaruhi oleh faktor musim, ketersediaan benih, dan harga pakan.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tasikmalaya

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	21.868.007.300	157.100.526.650	45.208.291.067	47.468.705.620	-	20.661.542.847	27.788.184.174	3.652.761.302	3.948.527.026		94,48	17,69	8,08	8,32
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			4.945.526.650	6.071.883.402	6.375.477.572	-	-	455.903.200	638.314.454	1.168.071.747		0	9,22	10,51	18,32
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologidan Spesifik Lokasi			4.945.526.650	5.993.133.402	6.292.790.072			455.903.200	515.539.454	1.018.071.747		0	9,22	8,60	16,18
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				78.750.000	82.687.500				122.775.000			0	0	155,90	0
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih					150.000.000					150.000.000		0	0	0	0
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,				375.000.000	393.750.000	-	-	-	-	-		0	0	-	-
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		N/A	N/A	125.000.000	131.250.000							0	0	0	0
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		N/A	N/A	125.000.000	131.250.000							0	0	0	0
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		N/A	N/A	125.000.000	131.250.000							0	0	0	0
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	105.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				300.000.000	315.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		N/A	N/A	150.000.000	157.500.000							0	0	0	0
Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan		N/A	N/A	150.000.000	157.500.000							0	0	0	0
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		250.000.000	430.000.000	562.500.000	590.625.000	-	243.423.500	99.999.900	-	-		97,37	23,26	-	-
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan		250.000.000	430.000.000	262.500.000	275.625.000		243.423.500	99.999.900				97,37	23,26	0	0
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain		21.618.007.300	151.725.000.000	37.798.907.665	39.688.853.048	-	20.418.119.347	27.232.281.074	3.014.446.848	2.780.455.279		94,45	17,95	7,97	7,01
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		21.618.007.300	151.725.000.000	37.698.907.665	39.583.853.048		20.418.119.347	27.232.281.074	3.014.446.848	2.755.455.679		94,45	17,95	8,00	6,96

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000					24.999.600		0	0	0	23,81
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		35.502.329.959	105.201.600.000	84.465.234.000	100.415.643.019	-	22.329.298.100	24.061.704.055	15.930.131.482	25.006.988.807		62,90	22,87	18,86	24,90
Pengembangan Prasarana Pertanian		11.798.800.000	20.620.000.000	12.388.740.000	13.735.324.319	-	8.860.454.150	149.928.110	-	-		75,10	0,73	0	0
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		4.117.800.000	20.620.000.000	4.323.690.000	5.135.824.319		3.814.129.650	149.928.110				92,63	0,73	0	0
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		N/A	N/A									0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		7.681.000.000		8.065.050.000	8.599.500.000		5.046.324.500					65,70	0	0	0
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		N/A	N/A									0	0	0	0
Pembangunan Prasarana Pertanian		23.584.803.209	84.281.600.000	71.361.494.000	85.929.568.700	-	13.361.597.200	23.626.010.395	15.930.131.482	24.981.988.807		56,65	28,03	22,32	29,07
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		8.826.500.000	33.535.600.000	15.267.825.000	16.031.216.250		8.231.747.000	6.328.710.200	1.700.000.000	2.206.559.150		93,26	18,87	11,13	13,76
Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian		N/A		8.000.000.000	8.000.000.000				240.000.000			.	0	3,00	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		10.147.780.000	28.426.000.000	10.655.169.000	11.187.927.450		647.780.000	3.290.337.100	2.743.525.000	8.089.207.848		6,38	11,58	25,75	72,30
Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Dam Parit		N/A	4.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000			249.700.000		839.999.500		0	6,24	0	7

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage		N/A	N/A	1.000.000.000	13.050.000.000							0	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		N/A	N/A	1.000.000.000	1.050.000.000							0	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		4.599.603.209	17.220.000.000	18.081.000.000	18.985.050.000		4.471.150.200	13.250.838.295	6.365.576.745	11.706.298.905		97,21	76,95	35,21	61,66
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		N/A	N/A	1.000.000.000	1.050.000.000				4.881.029.737	125.700.000		0	0	488,10	11,97
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Porong Hewan		10.920.000	5.100.000.000	4.357.500.000	4.575.375.000		10.920.000	506.424.800		2.014.223.404		100,00	9,93	0	44,02
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		118.726.750	300.000.000	415.000.000	435.750.000	-	107.246.750	285.765.550	-	25.000.000		90,33	95,26	0	5,74
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		118.726.750	300.000.000	315.000.000	330.750.000		107.246.750	285.765.550		25.000.000		90,33	95,26	0	8
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum				300.000.000	315.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		43.806.300	1.030.000.000	1.676.500.000	1.760.325.000	-	43.800.000	468.715.175	751.225.150	1.507.902.654		99,99	45,51	44,81	85,66
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah			660.000.000	843.000.000	885.150.000	-	-	79.759.975	-	25.000.000		0	12,08	0	3

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			660.000.000	693.000.000	727.650.000			79.759.975				0	12,08	0	0
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		N/A	N/A	75.000.000	78.750.000							0	0	0	0
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		N/A	N/A	75.000.000	78.750.000							0	0	0	0
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000					25.000.000		0	0	0	0
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000	157.500.000	-	-	-	-	164.800.000		0	0	0	104,63
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000					164.800.000		0	0	0	313,90
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		33.306.300	270.000.000	383.500.000	402.675.000	-	33.300.000	291.085.340	751.225.150	1.268.102.654		99,98	107,81	195,89	314,92
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000		33.300.000			157.875.688		0	0	0	150,36
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		33.306.300	270.000.000	283.500.000	297.675.000			291.085.340	751.225.150	1.110.226.966		0	107,81	264,98	372,97

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		10.500.000	100.000.000	200.000.000	210.000.000	-	10.500.000	97.869.860	-	50.000.000		100,00	97,87	0	23,81
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000					50.000.000		0	0	0	95,24
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		10.500.000	100.000.000	105.000.000	110.250.000		10.500.000	97.869.860				100,00	97,87	0	0
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis		N/A	N/A	20.000.000	21.000.000							0	0	0	0
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		N/A	N/A	25.000.000	26.250.000							0	0	0	0
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				100.000.000	105.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			400.000.000	820.000.000	861.000.000	-	-	196.260.500	-	193.406.900		0	49,07	0	22,46
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			400.000.000	820.000.000	861.000.000	-	-	196.260.500	-	193.406.900		0	49,07	0	22,46
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			400.000.000	420.000.000	441.000.000			196.260.500		193.406.900		0	49,07	0	43,86
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Penanggulangan Bencana Non Alam		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
yang Bersifat Zoonosis															
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			499.999.800	1.099.999.790	1.154.999.780	-	-	66.550.000	-	-		0	13,31	0	0
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			499.999.800	724.999.790	761.249.780	-	-	66.550.000	-	-		0	13,31	0	0
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		N/A	N/A	200.000.000	210.000.000							0	0	0	0
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		N/A	249.999.800	262.499.790	275.624.780			66.550.000				0	26,62	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		N/A	250.000.000	262.500.000	275.625.000							0	0	0	0
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				250.000.000	262.500.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Rumah Potong Hewan															
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				125.000.000	131.250.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		N/A	N/A	75.000.000	78.750.000							0	0	0	0
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.347.898.896	16.065.766.850	9.498.297.046	9.973.211.898	-	1.329.145.500	2.503.047.925	2.468.374.270	3.784.389.766		98,61	15,58	25,99	37,95
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.347.898.896	16.065.766.850	9.498.297.046	9.973.211.898	-	1.329.145.500	2.503.047.925	2.468.374.270	3.784.389.766		98,61	15,58	25,99	37,95
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		1.347.898.896	8.558.144.750	1.415.293.841	1.486.058.533		1.329.145.500	1.477.238.475	1.976.586.750	1.834.227.250		98,61	17,26	139,66	123,43
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			5.630.000.000	5.911.500.000	6.207.075.000			98.024.000	491.787.520	1.950.162.516		0	1,74	8,32	31,42
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1.877.622.100	1.971.503.205	2.070.078.365			927.785.450				0	49,41	0	0
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		N/A	N/A	200.000.000	210.000.000							0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		500.000.000	1.250.000.000	1.187.500.000	1.159.375.000	-	465.698.000	965.163.000	-	-		93,14	77,21	0	0
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		500.000.000	1.250.000.000	1.187.500.000	1.159.375.000	-	465.698.000	965.163.000	-	-		93,14	77,21	0	0
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		500.000.000	1.250.000.000	562.500.000	528.125.000		465.698.000	965.163.000				93,14	77,21	0	0
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur												0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		N/A		500.000.000	500.000.000							0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		N/A	N/A	75.000.000	78.750.000							0	0	0	0
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.301.755.000	7.648.100.000	3.798.092.750	3.987.997.388	-	1.189.517.600	3.365.984.340	-	482.775.700		91,38	44,01	0	12,11
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			1.005.600.000	1.631.250.000	1.712.812.500	-	-	2.585.861.400	-	-		0	257,15	0	0
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			330.000.000	346.500.000	363.825.000			2.162.240.000				0	655,22	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		N/A	N/A	200.000.000	210.000.000							0	0	0	0
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		N/A	55.600.000	183.750.000	192.937.500							0	0	0	0
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		N/A	620.000.000	651.000.000	683.550.000			423.621.400				0	68,33	0	0
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pengelolaan dan Keseimbangan		650.000.000	700.000.000	1.232.500.000	1.294.125.000	-	557.800.000	374.780.990	-	482.775.700		85,82	53,54	0	37,31

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		N/A	N/A	200.000.000	210.000.000							0	0	0	0
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		650.000.000	700.000.000	682.500.000	716.625.000		557.800.000	374.780.990		482.775.700		85,82	53,54	0	67,37
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		N/A	N/A	300.000.000	315.000.000							0	0	0	0
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi				100.000.000	105.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		651.755.000	5.942.500.000	834.342.750	876.059.888	-	631.717.600	405.341.950	-	-		96,93	6,82	0	0
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		651.755.000	5.942.500.000	684.342.750	718.559.888		631.717.600	405.341.950				96,93	6,82	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				500.000.000	525.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan				100.000.000	105.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pangan Kecamatan															
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				400.000.000	420.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		N/A	N/A	300.000.000	315.000.000							0	0	0	0
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			400.000.000	570.000.000	598.500.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			400.000.000	570.000.000	598.500.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000	262.500.000	275.625.000							0	0	0	0
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		N/A	150.000.000	157.500.000	165.375.000							0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN		2.150.427.50	4.545.204.400	111.033.479.305	116.585.153.270	-	2.063.054.05	3.222.143.86	3.721.738.05	510.175.200		95,94	70,89	3,35	0,44

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PERIKANAN TANGKAP		0					0	8	8						
Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.900.427.500	4.392.747.500	104.763.083.750	110.001.237.938	-	1.813.054.050	2.427.143.868	3.521.738.058	245.175.200		95,40	55,25	3,36	0,22
Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan		N/A	49.997.500	52.497.375	55.122.244							0	0	0	0
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		1.900.427.500	35.000.000	100.187.448.875	105.196.821.319		1.813.054.050					95,40	0	0	0
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Penangkapan Ikan		N/A	4.307.750.000	4.523.137.500	4.749.294.375			2.427.143.868	3.521.738.058			0	56,34	77,86	0
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					250.000.000					245.175.200		0	0	0	0
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			76.499.100	2.166.223.055	2.274.534.208	-	-	75.000.000	-	-		0	98,04	0	0
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			1.500.000	2.087.474.000	2.191.847.700							0	0	0	0
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan			74.999.100	78.749.055	82.686.508			75.000.000				0	100,00	0	0
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000	315.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		N/A	N/A	150.000.000	157.500.000							0	0	0	0
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran		N/A	N/A	150.000.000	157.500.000							0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
sampai dengan 10 GT															
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				300.000.000	315.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		N/A	N/A	150.000.000	157.500.000							0	0	0	0
Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		N/A	N/A	150.000.000	157.500.000							0	0	0	0
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				300.000.000	315.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		N/A	N/A	150.000.000	157.500.000							0	0	0	0
Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		N/A	N/A	150.000.000	157.500.000							0	0	0	0
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota		250.000.000	75.957.800	3.204.172.500	3.364.381.125	-	250.000.000	720.000.000	200.000.000	265.000.000		100,00	947,89	6,24	7,88
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		N/A	44.450.000	446.672.500	469.006.125			720.000.000				0	1.619,80	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		250.000.000	31.507.800	2.657.500.000	2.790.375.000		250.000.000		200.000.000	265.000.000		100,00	0	7,53	9,50
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1.742.517.500	2.124.253.436	5.745.900.808	6.033.195.848	-	1.627.740.100	5.599.171.760	3.717.415.950	1.662.609.137		93,41	263,58	64,70	27,56
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000	210.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			366.235.650	384.547.433	403.774.804	-	-	664.524.100	-	-		0	181,45	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil			66.514.300	69.840.015	73.332.016			387.407.400				0	582,44	0	0
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		N/A	299.721.350	314.707.418	330.442.788							0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			285.000.000					277.116.700				0	0	0	0
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1.742.517.500	1.758.017.786	5.161.353.375	5.419.421.044	-	1.627.740.100	4.934.647.660	3.717.415.950	1.662.609.137		93,41	280,69	72,02	30,68
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		N/A	7.030.000	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.722.717.500	314.774.000	1.808.853.375	1.899.296.044		1.607.940.100	1.538.859.360				93,34	488,88	0	0
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		19.800.000	1.432.775.500	3.000.000.000	3.150.000.000		19.800.000	3.395.788.300	3.717.415.950	1.662.609.137		100,00	237,01	123,91	52,78
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.438.286	52.500.000	55.125.000							0	0	0	0
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		N/A	N/A									0	0	0	0
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		N/A	N/A	150.000.000	157.500.000							0	0	0	0
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		N/A	N/A	100.000.000	105.000.000							0	0	0	0
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA				100.000.000	105.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				100.000.000	105.000.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		N/A	N/A	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		395.000.000	555.028.400	2.047.529.820	2.149.906.311	-	390.971.263	1.090.902.061	1.492.376.450	244.150.000		98,98	196,55	72,89	11,36
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		N/A	7.030.000	50.000.000	52.500.000	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		N/A	7.030.000	50.000.000	52.500.000							0	0	0	0
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			59.506.500	62.481.825	65.605.916	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			59.506.500	62.481.825	65.605.916							0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		395.000.000	495.521.900	1.935.047.995	2.031.800.395	-	390.971.263	1.090.902.061	1.492.376.450	244.150.000		98,98	220,15	77,12	12,02
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		N/A	495.521.900	520.297.995	546.312.895			1.090.902.061	1.492.376.450	244.150.000		0	220,15	286,83	44,69
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		395.000.000		1.414.750.000	1.485.487.500		390.971.263					98,98	0	0	0
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24.205.926.057	27.689.440.116	34.723.544.822	37.019.546.063	-	21.930.238.424	29.189.804.495	30.207.537.217	30.895.775.554		90,60	105,42	86,99	83,46
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		92.524.000	144.999.700	450.000.000	472.500.000	-	90.448.600	145.347.200	204.740.400	314.173.909		97,76	100,24	45,50	66,49
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		72.524.000	75.000.000	100.000.000	105.000.000		70.582.400	66.511.800	124.789.500	189.377.087		97,32	88,68	124,79	180,36
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			39.999.700	250.000.000	262.500.000							0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000	30.000.000	100.000.000	105.000.000		19.866.200	78.835.400	79.950.900	124.796.822		99,33	262,78	79,95	118,85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.351.450.907	23.915.185.446	31.531.490.718	33.667.889.254	-	20.105.933.290	27.103.278.137	26.927.016.313	27.526.057.674		89,95	113,33	85,40	81,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		22.351.450.907	23.915.185.446	31.531.490.718	33.667.889.254		20.105.933.290	27.103.278.137	26.927.016.313	27.526.057.674		89,95	113,33	85,40	81,76
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			195.300.000	230.065.000	241.568.250	-	-	-	-	-		0	0	0	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		N/A	N/A	25.000.000	26.250.000							0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			195.300.000	205.065.000	215.318.250							0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah		345.686.750	904.015.670	916.928.954	962.775.401	-	345.076.200	531.717.911	746.400.167	636.461.252		99,82	58,82	81,40	66,11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.042.700	178.242.020	187.154.121	196.511.827		7.609.300	125.630.189	43.465.575	48.339.000		94,61	70,48	23,22	24,60
Penyediaan Barang			88.072.450	92.476.073	97.099.876										

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cetakan dan Penggandaan		74.919.600					74.911.300	98.763.910	115.791.345	94.969.700		99,99	112,14	125,21	97,81
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		32.520.000	30.000.000	31.500.000	33.075.000		32.520.000	30.000.000	29.995.000	29.950.000		100,00	100,00	95,22	90,55
Penyediaan Bahan/Material		102.095.350	198.243.200	208.155.360	218.563.128		101.996.500	99.642.390	127.214.675	99.094.600		99,90	50,26	61,12	45,34
Fasilitasi Kunjungan Tamu		60.000.000	90.750.000	63.000.000	66.150.000		59.945.000	69.940.000	169.720.000	124.650.000		99,91	77,07	269,40	188,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		68.109.100	165.328.000	173.594.400	182.274.120		68.094.100	107.741.422	210.213.572	234.573.952		99,98	65,17	121,09	128,69
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		N/A	87.480.000	91.854.000	96.446.700							0	0	0	0
Pengadaan Mebeleur		N/A	65.900.000	69.195.000	72.654.750					4.884.000		0	0	0	6,72
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000					50.000.000			0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.082.826.400	1.252.215.000	1.215.844.250	1.276.636.463	-	1.059.343.587	1.166.128.947	2.045.172.537	1.954.317.619		97,83	93,13	168,21	153,08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		253.185.000	308.958.000	265.844.250	279.136.463		230.546.687	233.867.059	245.059.491	275.564.619		91,06	75,70	92,18	98,72
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		829.641.400	943.257.000	950.000.000	997.500.000		828.796.900	932.261.888	1.783.076.000	1.678.753.000		99,90	98,83	187,69	168,30
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.300.000					17.037.046			0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		333.438.000	1.277.724.300	379.215.900	398.176.695	-	329.436.747	243.332.300	284.207.800	464.765.100		98,80	19,04	74,95	116,72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		242.113.500	300.438.300	254.219.175	266.930.134		239.238.747	209.929.300	237.334.800	363.967.100		98,81	69,87	93,36	136,35
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.720.000	29.106.000	30.561.300		-			51.325.000		0	0	0	167,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		91.324.500	949.566.000	95.890.725	100.685.261		90.198.000	33.403.000	46.873.000	49.473.000		98,77	3,52	48,88	49,14
												0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
TOTAL	0	89.057.668.512	324.509.919.652	302.474.369.408	329.797.559.197	-	72.031.005.884	98.517.631.353	61.941.559.879	68.236.700.744	0	80,88	30,36	20,48	20,69

Sumber: Data DPKPP diolsh Tahun 2025

c. Kelompok Sasaran Pelayanan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya

Kelompok sasaran pelayanan DPKPP mencakup berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan terhadap pembangunan sektor pertanian, pangan, dan perikanan di daerah. Sasaran utama meliputi para petani dan keluarga petani yang mengelola usaha di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, termasuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang membutuhkan pembinaan, penyuluhan, serta akses terhadap sarana produksi pertanian.

Selain itu, pelaku usaha di sektor pertanian, pangan, dan perikanan, baik skala kecil, menengah, maupun besar, termasuk koperasi, UMKM, serta pengusaha penyedia sarana produksi dan pengolah hasil pertanian dan perikanan, menjadi sasaran penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Di bidang perikanan, sasaran pelayanan meliputi nelayan tradisional maupun modern, pembudidaya ikan di kolam, keramba, maupun tambak, serta pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang memerlukan dukungan teknologi, permodalan, dan pemasaran.

Masyarakat konsumen juga menjadi kelompok sasaran, terutama rumah tangga, lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan yang menerima bantuan pangan, serta masyarakat yang berada pada kategori rawan pangan dan gizi yang membutuhkan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau.

Di sisi lain, lembaga dan mitra pembangunan, seperti lembaga penyuluhan pertanian, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, serta instansi pemerintah pusat dan daerah

terkait, merupakan sasaran yang dilibatkan dalam penguatan koordinasi, inovasi teknologi, dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Tidak kalah pentingnya adalah aparat pemerintah daerah, terutama penyuluh pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan, serta aparat desa dan kelurahan yang berperan dalam pelaksanaan program-program pembangunan sektor ini.

Terakhir, generasi muda pertanian atau petani milenial dan wirausaha muda di bidang pertanian dan perikanan juga menjadi kelompok sasaran untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian di masa depan.

Tabel 2.6
Mitra DPKPP dalam Pemberian Layanan

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Pengujian kualitas produk peternakan dan konsultasi kesehatan hewan	Peternak, Dinas Peternakan lain, Balai penelitian veteriner, Balai karantina, perusahaan obat hewan dan vaksin	Pemeriksaan dan pengujian ternak, penelitian, surveilans dan pemantauan penyakit, sertifikasi dan layanan teknis	
2	Pelayanan kesehatan hewan	Peternak, Dinas Peternakan lain, Balai veteriner, Balai karantina, perusahaan obat hewan dan vaksin, Dinkes	Pelayanan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan hewan, koordinasi program kesehatan hewan, uji lab, program pengendalian zoonosis	

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
3	Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelayakan Pemotongan, Pemenuhan Standar Higienis dan Sanitasi	Peternak, Dinas Peternakan lain, Balai veteriner, Balai karantina, MUI dan BPJPH (sertifikasi halal), Dinkes	Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelayakan Pemotongan, Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Karkas/Daging, Sertifikasi halal bekerja sama dengan MUI dan BPJPH, Pemenuhan Standar Higienis dan Sanitasi, Distribusi dan Pemasaran Daging, Pengelolaan Limbah	
4	Pengelolaan dan Operasional Pasar Hewan	Peternak, Dinas Peternakan lain, puskesmas dan labkeswan, Balai karantina, satpolpp dan polisi, Disperindag	Penyaluran hewan dan informasi pasar, pengelolaan dan pembinaan pasar hewan, pemeriksaan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit, pengawasan lalu lintas hewan dan sertifikasi kesehatan, keamanan dan penertiban pasar, pengaturan harga, mekanisme transaksi, dan fasilitas perdagangan.	
5	Produksi dan Distribusi Bibit Ternak	Peternak, Dinas Peternakan lain, Balai embrio ternak dan balai inseminasi buatan, puskesmas dan labkeswan.	Produksi dan penyediaan bibit ternak unggul, Distribusi bibit ternak kepada peternak atau kelompok tani ternak, Kerja sama pengadaan bibit melalui program pemerintah	
6	Operasional dan Pengelolaan TPI	Nelayan, DKP kabupaten/kota lain, Disperindagukmnaker, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Dinas Perhubungan	pengelolaan harian TPI dan distribusi hasil tangkapan, pembinaan teknis dan pengawasan operasional TPI, pengaturan harga dan mekanisme lelang, sertifikasi mutu dan kesehatan ikan, pengelolaan dermaga dan	

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
			akses transportasi hasil tangkapan.	
7	Produksi dan Distribusi Benih Ikan	Pembudidaya ikan, DKP Kab/kota lain, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Balai Riset Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan unggul, Distribusi benih kepada pembudidaya ikan, kelompok tani nelayan, Penelitian dan Pengembangan	
8	Produksi dan Distribusi Benih Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan	Pembudidaya ikan, DKP Kab/kota lain, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Balai Riset Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan unggul, Distribusi benih kepada pembudidaya ikan, kelompok tani nelayan, Penelitian dan Pengembangan	

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Tabel 2.7
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja DPKPP

No	Nama BUMD yang Mendukung	Bentuk Dukungan BUMD	Hasil/Outcome yang Dicapai	Keterangan
1				
2		NIHIL		
3				
4				
5				

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Tabel 2.8
Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab DPKPP

No	Mitra Kerja Sama (Pemerintah/Swasta)	Ruang Lingkup Kerja Sama	Dasar Hukum Kerja Sama	Status Pelaksanaan
1	BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi Nelayan	Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tasikmalaya dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya nomor : PER/11/012025 dan nomor 500.5/454/DPKPP.Ikan/2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab Tasikmalaya
2	Kantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya	Pengembangan klaster kopi Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya	Perjanjian kersama antara Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya Nomor : 27/5/PKS/Tsm/2025 dan Nomor 500.6.14/994/DPKPP/2025 tentang Pengembangan klaster kopi Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya
3	Pimpinan Daerah Aisiyyah Kabupaten Tasukmalaya	Pelaksanaan Program Penurunan Stunting dan Pemberdayaan Ekonomi	Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program Penurunan Stunting dan Pemberdayaan Ekonomi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya dengan Pimpinan Daerah Aisiyyah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : PR.01/442/DPKPP/2024 dan Nomor : 05/PDA-	Dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Aisiyyah Kabupaten Tasikmalaya

No	Mitra Kerja Sama (Pemerintah/Swasta)	Ruang Lingkup Kerja Sama	Dasar Hukum Kerja Sama	Status Pelaksanaan
			PKS/XI/2023	
4	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Perjanjian Kerjasama antara Politeknik Pembangunan Pertanian Bogot dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : PR.01/135/DPKPP/2023 dan 26/SM.220/I.7/01/2023, tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Dilaksanakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPKPP Kabupaten Tasikmalaya

a. Permasalahan Pelayanan DPKPP

Permasalahan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan identifikasi permasalahan aktual, potensi daerah, serta tantangan lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional. Berbagai isu yang muncul antara lain masih terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian, peternakan, dan perikanan; rendahnya akses petani, peternak, dan nelayan terhadap permodalan; perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang berdampak pada produktivitas; serta adanya ancaman alih fungsi lahan pertanian.

b. Isu Strategis

Isu strategis juga mencakup rendahnya konsumsi protein hewani, belum optimalnya cadangan pangan daerah, distribusi pangan yang belum merata, minimnya hilirisasi dan industri pengolahan hasil, hingga rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Rumusan isu strategis ini menjadi

dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan di Kabupaten Tasikmalaya agar mampu mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.9
Rumusan Isu Strategis DPKPP Kabupaten Tasikmalaya

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non- Pertanian yang Tak Terkendali	Alih Fungsi Lahan & Degradasi Sumber Daya Alam	Degradasi Lahan dan Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan Pertanian	Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non- Pertanian	Alih Fungsi dan Penurunan Kualitas Lahan Sawah Produktif
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Minimnya Insentif untuk Petani LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)					
Perlindungan terhadap Petani, Peternak dan Nelayan (AUTP, AUTS, Dan Asuransi Nelayan)	Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem	Perubahan Iklim & Penurunan Kualitas Lingkungan	Perubahan iklim, El Nino/La Nina, cuaca ekstrem	Program adaptasi pertanian tahan iklim dan diversifikasi komoditas	Penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian kerusakan ekosistem pertanian & perikanan	Peningkatan kapasitas adaptasi petani, peternak, dan nelayan terhadap iklim ekstrem
Penerapan teknologi pertanian, Peternakan dan Perikanan tepat guna	Pertanian, Peternakan dan Perikanan masih bersifat tradisional	Kualitas dan Ketersediaan Air, Limbah dan Pencemaran	Revolusi teknologi pertanian (IoT, AI, bioteknologi)	Modernisasi dan mekanisasi pertanian, peternakan, dan perikanan	Peningkatan adopsi teknologi produksi dan pasca panen	Peningkatan adopsi teknologi produksi, pasca panen, dan penerapan pertanian, peternakan, dan perikanan berkelanjutan berbasis pengelolaan limbah ramah lingkungan
Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Terbatasnya Sarana Prasarana Pertanian, Peternakan dan Perikanan					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menyediakan pendampingan teknis bagi petani untuk mengakses program kredit perbankan	Terbatasnya Akses Petani Terhadap Permodalan	Kesejahteraan & Kemandirian Petani, Peternak, dan Nelayan	Fluktuasi harga pupuk, pakan, dan produk pangan	Kebijakan subsidi pupuk & stabilisasi harga pangan nasional	Stabilisasi harga di tingkat petani/nelayan melalui kelembagaan	Penguatan rantai pasok input produksi dan pemasaran hasil
Fasilitasi pakan ikan mandiri	Biaya Pakan Tinggi					
Fasilitasi ketersediaan pakan ternak lokal.						
Menyediakan fasilitas penyimpanan (gudang/cold storage) untuk menampung sementara hasil panen/produksi	Fluktuasi Harga Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan					
Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan pertanian, teknologi pertanian modern, dan digital farming	Kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian		Isu Biodiversitas dan Pertanian Berkelanjutan	Regenerasi Petani dan Tenaga Kerja Pertanian serta Penguatan Kelembagaan Petani	Krisis Regenerasi Petani	Rendahnya keterlibatan generasi muda di sektor pertanian
Bekerja sama dengan SMK Pertanian, perguruan tinggi, dan BLK untuk mencetak tenaga kerja muda terampil						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Minimnya industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan di tingkat lokal (Hilirisasi)	Hilirisasi & Nilai Tambah Produk	Persaingan produk lokal dengan impor	Perlindungan produk pangan lokal & peningkatan daya saing	Hilirisasi produk dan penguatan pasar domestik	Penguatan hilirisasi, branding, dan pemasaran produk unggulan daerah
Penanganan pasca panen dan diversifikasi olahan ikan						
Pembinaan unit usaha pengolahan hasil peternakan (susu, telur, daging olahan)						
Penguatan koperasi perikanan dan UMKM berbasis perikanan						
Penguatan kelompok ternak dan kemitraan agribisnis peternakan	Terbatasnya pasar dan rantai distribusi yang belum efisien					
Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal	Ketahanan Pangan & Gizi	Gangguan rantai pasok pangan internasional akibat konflik & bencana	Penguatan cadangan pangan pemerintah & stabilisasi harga bahan pokok	Optimalisasi lumbung pangan dan sistem distribusi antar-wilayah	Penguatan cadangan pangan daerah dan sistem distribusi berbasis kawasan
Fasilitasi penyediaan dan distribusi pangan pokok strategis di tingkat kabupaten	Distribusi Pangan Belum Merata					
Edukasi dan promosi konsumsi pangan beragam, bergizi,	Konsumsi Protein Hewani Rendah		Tren pangan sehat, organik, dan	Diversifikasi pangan dan penguatan	Peningkatan konsumsi pangan lokal berbasis	Peningkatan konsumsi pangan bergizi dan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
seimbang dan aman (B2SA)			berkelanjutan	pangan lokal	potensi daerah	diversifikasi pangan berbasis lokal
Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan di pasar lokal	Keterbatasan Diversifikasi Pangan Lokal					
Pendataan dan pelaporan peta ketahanan dan kerentanan pangan daerah (FSVA)	Ketidakseimbangan Produksi dan Konsumsi					

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Dalam Penetapan permasalahan dan isu strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat, valid, serta relevan dengan kondisi daerah yang tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Isu Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

ISU STRATEGIS PD	DATA DUKUNG	TAHUN					SUMBER DATA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Alih Fungsi dan Penurunan Kualitas Lahan Persawahan	Luas Panen Tanaman Padi (Hektar)	72.941,41	82.934,85	81.310,17	69.686	66.324,47	BPS
		2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan kapasitas adaptasi petani, peternak, dan nelayan terhadap iklim ekstrem	Luas Lahan Sawah Kekeringan (Hektar)	274,5	667	11	590	94,3	DPKPP
		2024					
Peningkatan adopsi teknologi produksi, pasca panen, dan penerapan pertanian, peternakan, dan perikanan berkelanjutan berbasis pengelolaan limbah ramah lingkungan	Petani Yang Menggunakan Teknologi (Orang)	145.249					BPS
	Petani Yang Tidak Menggunakan Teknologi (Orang)	142.696					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Penguatan rantai pasok input produksi dan pemasaran hasil	Nilai Tukar Petani Jawa Barat	101,42	97,84	99,75	107,46	112,17	BPS
	Nilai Tukar Usaha Pertanian Jawa Barat	101,94	98,56	100,73	108,87	114,91	
		2024					
Rendahnya keterlibatan generasi muda di sektor pertanian	Jumlah Petani Menurut Generasi	Generasi Z	Milenial	Generasi X	Boomer	Pre Boomer	BPS
		3.395	53.787	122.428	98.071	10.264	

ISU STRATEGIS PD	DATA DUKUNG	TAHUN					SUMBER DATA
	Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 (Jiwa)						
		2020	2021	2022	2023	2024	
Penguatan hilirisasi, branding, dan pemasaran produk unggulan daerah	Jumlah Nilai Produksi Industri Pengolahan Pangan (Rp)	N/A	875.577.800	109.446.247	1.633.501.929	1.673.283.367	OpenData Tasikmalaya
		2020	2021	2022	2023	2024	
Penguatan cadangan pangan daerah dan sistem distribusi berbasis kawasan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (ton)	99,7	85	55,8	55	57,00	DPKPP
		2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan konsumsi pangan bergizi dan diversifikasi pangan berbasis lokal	Pertumbuhan Angka PoU (%)	5,64	7,12	10,45	8,65	5,95	Bapanas
	Sehingga Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebesar 108.620 Jiwa dari 1.825.834 Jiwa (PoU 5,95%)						

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029 terdapat beberapa relevansi permasalahan pelaksanaan pelayanan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya:

1) Alih Fungsi dan Penurunan Kualitas Lahan Sawah Produktif

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menghadapi tekanan besar akibat konversi lahan persawahan ke non-pertanian, baik untuk pemukiman, industri, maupun infrastruktur.
- Penurunan kualitas lahan akibat degradasi tanah, pencemaran, dan penggunaan input pertanian yang tidak berkelanjutan berdampak pada produktivitas jangka panjang.
- Tantangan ini memerlukan kebijakan perlindungan lahan yang tegas, pengendalian tata ruang, dan penguatan insentif bagi petani khususnya di lahan persawahan untuk mempertahankan fungsi lahan.

2) Peningkatan kapasitas adaptasi petani, peternak, dan nelayan terhadap iklim ekstrem

- Variabilitas iklim dan cuaca ekstrem (banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman/ternak) mempengaruhi siklus produksi pangan.
- Meningkatnya risiko gagal panen, penurunan produktivitas ternak dan perikanan, serta ancaman ketahanan pangan daerah akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem,
- Perlu penguatan kapasitas adaptasi petani, peternak, dan nelayan melalui teknologi ramah iklim, infrastruktur tahan iklim, sistem informasi cuaca, serta dukungan pembiayaan dan kelembagaan.

- 3) Peningkatan adopsi teknologi produksi, pasca panen, dan penerapan pertanian, peternakan, dan perikanan berkelanjutan berbasis pengelolaan limbah ramah lingkungan.
- Masih rendahnya tingkat adopsi teknologi modern di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, khususnya pada tahap produksi dan pasca panen.
 - Minimnya penerapan pengelolaan limbah ramah lingkungan, menyebabkan rendahnya efisiensi, tingginya kehilangan hasil (losses), pencemaran lingkungan, dan terbatasnya nilai tambah produk.
 - Perlu percepatan penerapan teknologi pertanian 4.0 yang berbasis Internet of Things (IoT), sensor, big data, serta modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang didukung oleh peningkatan literasi digital dan pembiayaan inovasi.
 - Perlu strategi percepatan adopsi teknologi tepat guna, penguatan kapasitas SDM, serta pembangunan sistem produksi berkelanjutan yang ramah lingkungan
- 4) Penguatan rantai pasok input produksi dan pemasaran hasil
- Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi sarana produksi (benih, pupuk, pakan, obat hewan/ikan, serta alat dan mesin).
 - Harga komoditas pertanian sering berfluktuasi akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, keterbatasan rantai pasok, serta infrastruktur distribusi yang kurang memadai.
 - Perlunya penguatan rantai pasok melalui peningkatan efisiensi distribusi input, pengembangan pasar yang

lebih luas, digitalisasi pemasaran, dan kemitraan dengan swasta maupun BUMD untuk memperkuat sistem logistik dan hilirisasi serta pemanfaatan platform pemasaran digital.

- 5) Rendahnya keterlibatan generasi muda di sektor pertanian
 - Minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sangat rendah.
 - Lemahnya kelembagaan petani/peternak/nelayan menghambat konsolidasi usaha dan adopsi teknologi baru.
 - Dibutuhkan program regenerasi petani, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan kelembagaan untuk mencetak SDM unggul di sektor pangan.
- 6) Penguatan hilirisasi, branding, dan pemasaran produk unggulan daerah
 - Harga komoditas pertanian sering berfluktuasi akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, keterbatasan rantai pasok, serta infrastruktur distribusi yang kurang memadai.
 - Petani dan nelayan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang menguntungkan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
 - Diperlukan penguatan korporatisasi petani, kemitraan usaha, dan pemanfaatan platform pemasaran digital.
- 7) Penguatan cadangan pangan daerah dan sistem distribusi berbasis kawasan
 - Jumlah Cadangan pangan pemerintah daerah masih belum optimal.
 - Sistem distribusi pangan antar-kawasan belum merata dan belum efisien.

- Perlu penguatan cadangan pangan daerah berbasis komoditas unggulan lokal, pengembangan lumbung pangan modern, serta sistem distribusi pangan berbasis kawasan yang terintegrasi dengan infrastruktur logistik, teknologi informasi, dan jejaring pemasaran.
- 8) Peningkatan konsumsi pangan bergizi dan diversifikasi pangan berbasis lokal
- Tingkat konsumsi protein hewani dan pangan bergizi masyarakat masih rendah.
 - Pola konsumsi pangan cenderung belum beragam dan masih bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama.
 - Perlu upaya mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (umbi-umbian, jagung, sagu, sayuran, buah, ikan, daging, telur, susu), peningkatan kesadaran gizi masyarakat, serta penguatan rantai pasok produk pangan bergizi yang mudah diakses masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun.

Selain itu Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat

membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah diuraikan dalam RPJMD 2025-2029, Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2025-2029 yaitu “MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN”. Dengan tujuan “Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah”.

Dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut DPKPP Kabupaten Tasikmalaya menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan yaitu : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah dengan indikator sasaran meningkatnya Skor PPH dan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan.

Gambaran lebih detail tentang Tujuan dan Sasaran jangka menengah DPKPP disajikan dalam berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (IKK)	88,45	88,66	88,88	89,11	89,35	89,6	89,86	
		Meningkatnya Konsumsi Energi	Presentase Tingkat Konsumsi Energi (%)	96,13	96,23	96,32	96,42	96,52	96,61	96,71	
		Meningkatnya Konsumsi Protein	Presentase Tingkat Konsumsi Protein (%)	102,84	102,94	103,05	103,15	103,25	103,36	103,46	
		PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (Rp)	18.326,33	18.692,86	19.066,71	19.448,05	19.837,01	20.233,75	20.638,42		
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan		Persentase Kontribusi Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Target Provinsi Jawa Barat	6,24	6,25	6,26	6,27	6,28	6,29	6,30		
Meningkatnya Produksi Hortikultura		Persentase Kontribusi Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Tasikmalaya terhadap Target Provinsi Jawa Barat	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	4,71	4,72		
Meningkatnya Produksi Perkebunan		Persentase Kontribusi Produksi Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Target	19,28	19,29	19,30	19,31	19,32	19,33	19,34		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Produksi Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH)	Provinsi Jawa Barat Persentase Kontribusi Produksi Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) Kabupaten Tasikmalaya terhadap Target Provinsi Jawa Barat	1,80	1,83	1,84	1,85	1,86	1,87	1,88	
		Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Pertanian yang dibangun	N/A	583	589	595	601	607	613	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	N/A	1,5	1,5	1,65	1,815	1,9965	2,19615	
		Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Tani	Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	N/A	2	4	6	8	10	12	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Reformasi Birokrasi	73,99	74,00	74,25	74,5	74,75	75	75,25	

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi DPKPP dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang sinergis dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 ini dirumuskan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 misi ke dua yaitu MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN. Proses Penahapan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dapat dilakukan melalui penahapan diantaranya :

Tabel 3.2**Penahapan Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan Potensi dan Penguatan Dasar Tasik Hejo	TASIK HEJO (Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Pertanian Terpadu)	Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Nilai Tambah Tasik Hejo	Penguatan Pasar, Digitalisasi, dan Kemitraan Tasik Hejo	Evaluasi dan Penguatan Keberlanjutan Tasik Hejo
- Evaluasi program tahun sebelumnya & pemetaan kebutuhan. - Pemetaan potensi wilayah Pertanian, Peternakan dan Perikanan unggulan. - Updating data infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan. - Peningkatan ketersediaan benih/bibit unggul dan sarana produksi melalui UPTD. - Penguatan kelembagaan dan updating database petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan. - Peningkatan kapasitas SDM Pertanian, Peternakan dan Perikanan, salah satunya melalui pembentukan Posluhdes	- Penerapan Pertanian Terpadu di Beberapa Desa Unggulan (Pilot Project) - Peningkatan produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan. - Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi tersier, jalan usaha tani dan embung), Peternakan (RPH, UPTD Bitnak, dan Pasar Hewan), dan Perikanan (UPTD BBI, Pasar Ikan, dan TPI). - Distribusi dan peningkatan pemanfaatan sarana prasarana Pertanian, Peternakan dan Perikanan. - Pengembangan sistem informasi berbasis digital. - Penerapan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan ramah lingkungan	- Diversifikasi produk olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (abon, kerupuk, nugget, dll). - Pelatihan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran digital. - Sertifikasi mutu produk olahan (PIRT, halal, BPOM). - Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan cadangan pangan masyarakat. - Penguatan UMKM pangan berbasis masyarakat	- Pengembangan pasar tani, BUMDes pangan, dan sentra distribusi hasil pangan. - Digitalisasi pemasaran dan e-commerce komoditas lokal. - Kemitraan petani-peternak-nelayan dengan pelaku industri dan retail. - Promosi produk unggulan dalam pameran dan expo regional/nasional. - Fasilitasi akses pembiayaan (KUR, koperasi pangan, CSR sektor swasta).	- Evaluasi menyeluruh terhadap capaian Renstra dan indikator kinerja daerah. - Replikasi model pertanian-peternakan-perikanan terpadu ke desa potensial lainnya. - Penguatan regulasi daerah untuk perlindungan produk lokal dan petani kecil. - Pelatihan lanjutan SDM pertanian berbasis teknologi dan iklim. - Penyusunan dokumen teknokratik untuk Renstra periode berikutnya.

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Arah Kebijakan dan Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan	Penguatan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah	
2		Operasi pasar pangan murah		
3		Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal		
4		Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar		
5		Pembangunan dan rehabilitasi Irigasi pertanian, embung, saluran tambak, jalan usaha tani dan akses pelabuhan perikanan	Penguatan Infrastruktur dan Sarana Produksi	
6		Fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan), cold storage, dan kapal tangkap ikan		
7		Penggunaan benih/bibit unggul dan varietas adaptif		
8		Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Aquaculture Practices (GAqP)	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	
9		Pengendalian kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan		
10		Perluasan Pasar Hasil Pertanian dan Perikanan	Penguatan Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	
11		Fasilitasi KUR sektor pertanian/perikanan, asuransi usaha tani dan nelayan (AUTP dan AUTS)	Perlindungan Petani, Peternak, dan Nelayan	
12		Penyuluhan dan pendampingan teknologi kepada petani dan nelayan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan	
13		Penguatan kelembagaan petani/nelayan (kelompok tani, koperasi, BUMDes)		

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Dalam rangka mendukung misi kedua RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 yaitu *“Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Berkelanjutan”*, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Tasikmalaya menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan secara sinergis dan komprehensif. Strategi ini disusun untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan daerah serta kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Produksi dan Penguatan Cadangan Pangan

DPKPP berkomitmen meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, pemanfaatan teknologi modern, serta pemberdayaan petani. Selain itu, penguatan cadangan pangan dilakukan dengan membangun lumbung pangan masyarakat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, serta memperluas akses distribusi pangan. Hal ini bertujuan menjamin ketersediaan pangan yang cukup, merata, dan berkelanjutan.

2) Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar

Untuk menjaga keterjangkauan pangan masyarakat, pemerintah daerah akan melaksanakan operasi pasar pada komoditas strategis seperti beras, telur, daging ayam, cabai, dan bawang. Kegiatan ini dilaksanakan terutama pada saat terjadi gejolak harga. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah.

3) Diversifikasi Pangan Berbasis Potensi Lokal

DPKPP akan mendorong pemanfaatan pangan lokal yang beragam seperti jagung, singkong, umbi-umbian, hasil hortikultura, serta produk perikanan. Diversifikasi

ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras sekaligus memperkuat ketahanan pangan dengan pola konsumsi yang beragam, bergizi, dan berimbang.

4) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar

Untuk menjamin keamanan pangan, pemerintah daerah memperkuat pengawasan mutu produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang beredar di pasar maupun sentra distribusi. Pengawasan ini meliputi penerapan standar keamanan pangan, sertifikasi produk segar, dan pemantauan kontaminasi pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.

5) Pengembangan Infrastruktur Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

DPKPP akan membangun dan merehabilitasi infrastruktur produksi seperti jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, sarana tambak, serta pelabuhan perikanan. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta menekan kehilangan hasil pasca panen.

6) Modernisasi Sarana Produksi melalui Fasilitas Alsintan, Cold Storage, dan Kapal Tangkap

Modernisasi sektor pertanian dan perikanan dilakukan dengan memberikan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang efisien, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk menjaga mutu hasil perikanan, serta penyediaan sarana penangkapan ikan bagi nelayan. Upaya ini akan meningkatkan efisiensi, mengurangi kerugian pasca panen, dan meningkatkan daya saing produk.

7) Peningkatan Produktivitas melalui Benih/Bibit Unggul dan Varietas Adaptif

DPKPP akan mendorong penggunaan benih padi, jagung, hortikultura, serta bibit ternak dan ikan yang berkualitas tinggi dan tahan terhadap perubahan iklim maupun serangan hama penyakit. Penggunaan varietas unggul diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan.

8) Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Aquaculture Practices (GAqP)

Untuk menghasilkan produk yang aman dan ramah lingkungan, pemerintah daerah akan memperluas penerapan praktik pertanian dan perikanan yang baik sesuai standar internasional. Melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, petani dan nelayan diharapkan mampu menerapkan teknologi produksi yang sehat, efisien, serta menjaga kelestarian lingkungan.

9) Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak dan Peningkatan Kualitas Pangan Asal Hewan

DPKPP akan memperkuat sistem kesehatan hewan dengan melakukan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, serta pengawasan rumah potong hewan (RPH). Langkah ini penting untuk mencegah penyakit hewan menular serta menjamin kualitas produk asal hewan seperti daging, telur, dan susu agar aman dikonsumsi masyarakat.

10) Perluasan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Produk

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian, DPKPP akan memperluas akses pasar melalui promosi produk unggulan daerah, fasilitasi pemasaran digital, kemitraan dengan pelaku industri, serta dukungan ekspor. Dengan demikian, produk pertanian, peternakan, dan perikanan Tasikmalaya dapat bersaing di pasar lokal, nasional, maupun internasional.

11) Fasilitasi Pembiayaan dan Asuransi Usaha

Untuk meningkatkan keberlanjutan usaha, petani, peternak, dan nelayan difasilitasi akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah serta asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak/nelayan (AUTS). Hal ini memberikan perlindungan dari risiko gagal panen, gagal tangkap, maupun kerugian usaha lainnya.

12) Penyuluhan dan Pendampingan Teknologi

DPKPP akan memperkuat peran penyuluh pertanian dan perikanan sebagai agen perubahan di lapangan. Penyuluhan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani/nelayan dalam menggunakan teknologi modern, praktik ramah lingkungan, serta digitalisasi usaha.

13) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Nelayan

Pemerintah daerah akan mendukung pengembangan kelompok tani, koperasi, dan BUMDes berbasis pangan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat. Dengan kelembagaan yang kuat, petani dan nelayan dapat memiliki posisi tawar lebih baik dalam rantai distribusi serta lebih mudah memperoleh akses pasar, teknologi, dan pembiayaan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

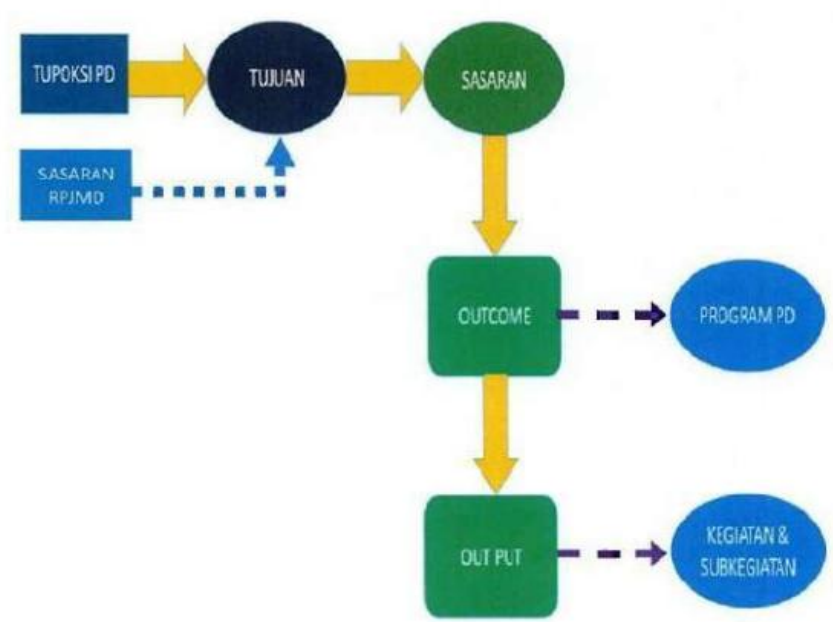
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis DPKPP Kabupaten Tasikmalaya ditentukanlah program, dan kegiatan. Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPKPP Kabupaten Tasikmalaya merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra DPKPP Kabupaten Tasikmalaya juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPKPP Kabupaten Tasikmalaya serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPKPP Kabupaten Tasikmalaya dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra
DPKPP Kabupaten Tasikmalaya



Tabel 4.1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (IKK)			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (IKK)		
					- Presentase Tingkat Konsumsi Energi (%) - Presentase Tingkat Protein (%)		
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
				Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
				Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Pemantauan Stok Pangan	
				Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Tersedianya Neraca Bahan	Informasi Neraca Bahan Makanan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Makanan (NBM)	(NBM)	(NBM)	
				Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
				Tersedianya Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
				Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
				Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
				Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	
			Meningkatnya Pengawasan Kerawanan Pangan		Persentase Peningkatan Pengawasan Kerawanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
				Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
					PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan		
	Meningkatnya PDRB Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			- Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan - Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura - Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		
			Meningkatnya Sarana Pertanian		Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Kualitas Sarana	Persentase Peningkatan Pengawasan	Pengawasan Penggunaan Sarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pertanian	dan Penyediaan Sarana Pertanian	Pertanian	
				Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
				Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
				Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	
				Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Tersedianya benih bersertifikat	Jumlah benih bersertifikat	Perbanyak Benih Bersertifikat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perkebunan Berbentuk Setek	Perkebunan Berbentuk Setek	Perkebunan Berbentuk Setek	
				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
				Meningkatnya Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	
				Meningkatnya Kualitas Prasarana Pasca Panen Pertanian	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Penyediaan Prasarana Pasca Panen Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pangan			
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				Terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
			Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian		Persentase Peningkatan Luas Lahan Pertanian yang Terkendali dan Tertanggulangi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
				Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Meningkatnya Usaha Pertanian Yang Berizin		Persentase Peningkatan Perizinan Usaha Pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
				terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	
				Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
		Meningkatnya Produksi Peternakan Yang ASUH			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan		
			Meningkatnya Sarana Peternakan		Persentase Peningkatan Sarana Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Mikro Organisme	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Mikro Organisme	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	
						Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
				Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
				Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
				Meningkatnya Mutu dan Kualitas Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
				Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	
				Meningkatnya Mutu dan Kualitas Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
				Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
				Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
				Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
				Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
				Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
				Meningkatnya Mutu dan Kualitas Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
				Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
				Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya Prasarana Peternakan		Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
				Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
				Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
				Meningkatnya Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Peningkatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
				Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	
				Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	
			Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
				Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	
				Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
				Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
				Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	
				Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
				Terawasi dan diperiksanya	Jumlah pengawasan dan	Pengawasan dan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	
				Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
				Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Meningkatnya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
				Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
				Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kesejahteraan hewan	kompetensi		
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
				Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
				Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
				Meningkatnya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Peningkatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
				Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	
				Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
				Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Peternakan	Persentase Peningkatan Hewan Ternak yang Terkendali dan Tertanggulangi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	
				Meningkatnya Usaha Peternakan Yang Berizin	Persentase Peningkatan Perizinan Usaha Peternakan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Peternakan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
				Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
				Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	
				Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	
				Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
				Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	
				Meningkatnya Izin Usaha Pengecer Peternakan	Persentase Peningkatan Izin Usaha Pengecer Peternakan	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Usaha Pengecer Obat Hewan		Hewan	
				Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
		Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian			Jumlah Prasarana dan Sarana Pertanian yang dibangun		
			Meningkatnya Prasarana Pertanian		Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Infrastruktur Pertanian	Meningkatnya Infrastruktur Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	
				Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
				Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
		Meningkatnya produksi perikanan			- Persentase Peingkatan Produksi Perikanan Tangkap - Persentase Peingkatan Produksi Perikanan Budidaya		
			Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap		Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas	Jumlah Nelayan Kecil yang	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nelayan Kecil	Meningkat Kapasitasnya		
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				Meningkatnya Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Peningkatan Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Diterbitkannya rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan	Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Meningkatnya Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Meningkatnya Pencatatan kapal perikanan	Persentase Peningkatan Pencatatan kapal perikanan	Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam <u>peraturan perundang- undangan</u>	
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Tercatatnya kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan	Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Meningkatnya Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	Persentase Peningkatan Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	Persentase Peningkatan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Diterbitkannya Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
			Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya		Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Melalui OSS (Online Single Submission), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia.
				Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya IkanPemberdayaan Pembudi Daya Ikan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	Persentase Peningkatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		
				Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		
				Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
			Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
				Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	
				Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	
				Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	
				Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota	
				Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	
				Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pengawasan Ekstraksi Garam	
				Meningkatnya Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan	Persentase Peningkatan Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota	
				Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Perikanan		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	
				Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Meningkatnya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Persentase Peningkatan Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Persentase Peningkatan Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Meningkatnya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang tersedia	Tersedianya prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha	Persentase Peningkatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kecil yang bersertifikat GMP	bersertifikat GMP	Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Meningkatnya Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Persentase Peningkatan Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Meningkatnya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Persentase Peningkatan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
		Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Tani			Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani		
			Meningkatnya Penyuluhan Pertanian		Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	yang Ditingkatkan Kapasitasnya	dan Desa	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
				Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
				Meningkatnya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya				Nilai Reformasi Birokrasi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja			Nilai Reformasi Birokrasi		
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Penataan Organisasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan DPKPP Kabupaten Tasikmalaya

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DINAS PERTANIAN					150.147.528.484		181.834.937.815		208.292.196.959		242.753.759.347		269.993.418 .196	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					10.316.312.500		11.620.312.500		13.004.312.500		14.428.312.500		15.932.312. 500	
2.09.02 – PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN														
(Output) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	%		100	1.125.000.000	100	1.665.000.000	100	2.225.000.000	100	2.765.000.000	100	3.325.000.0 00	
2.09.02.2.01 – Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah														
Kabupaten/Kota (Output) Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	%		100	1.125.000.000	100	1.665.000.000	100	2.225.000.000	100	2.765.000.000	100	3.325.000.0 00	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1	2	1.000.000.000	3	1.500.000.000	4	2.000.000.000	5	2.500.000.000	6	3.000.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
(Output) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Kelompok	1	5	100.000.000	7	140.000.000	10	200.000.000	12	240.000.000	15	300.000.000	
2.09.03 – PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
(Outcome) Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	%		100	8.629.312.500	100	9.393.312.500	100	10.217.312.500	100	11.101.312.500	100	12.045.312.500	
2.09.02.2.01 – Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan		13	2.915.312.500	13	2.915.312.500	13	2.915.312.500	13	2.915.312.500	13	2.915.312.500	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
(Output) Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1	363.825.000	1	363.825.000	1	363.825.000	1	363.825.000	1	363.825.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
(Output) Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														
(Output) Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
(Output) Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	10	10	105.000.000	10	105.000.000	10	105.000.000	10	105.000.000	10	105.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
(Output) Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	39	39	595.000.000	39	595.000.000	39	595.000.000	39	595.000.000	39	595.000.000	
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
(Output) Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														
(Output) Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	3	3	683.550.000	3	683.550.000	3	683.550.000	3	683.550.000	3	683.550.000	
Pemantauan Stok Pangan														
(Output) Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen	1	1	192.937.500	1	192.937.500	1	192.937.500	1	192.937.500	1	192.937.500	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	1	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
(Output) Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.09.03.2.02 – Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	%		100	4.759.000.000	100	5.523.000.000	100	6.347.000.000	100	7.231.000.000	100	8.175.000.000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														
(Output) Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	288	319	4.306.500.000	349	5.060.500.000	379	5.874.500.000	409	6.748.500.000	439	7.682.500.000	
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
(Output) Terlaksananya	Jumlah penyaluran	Unit												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		23	50	50.000.000	60	60.000.000	70	70.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
(Output) Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Ton	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)														
(Output) Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	Kelompok		5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	
2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi														
(Output) Tersedianya Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Laporan		1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal														
(Output) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi														
(Output) Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	%		100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
(Output) Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal														
(Output) Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	720.000.000	1	720.000.000	1	720.000.000	1	720.000.000	1	720.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
(Output) Terlaksananya Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun													
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
(Output) Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
(Output) Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	%		100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	
2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan														
(Output) Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	%		100	50.000.000		50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
(Output) Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Laporan/Buku	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
(Output) Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	%		100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
(Output)Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pelaksanaan Intervensi														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
(Output)Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan														
(Output) Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
(Output) Meningkatnya Pengawasan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Pengawasan Kerawanan Pangan	%		100	137.000.000	100	137.000.000	100	137.000.000	100	137.000.000	100	137.000.000	
2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	%		100	137.000.000	100	137.000.000	100	137.000.000	100	137.000.000	100	137.000.000	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
(Output)Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota														
(Output)Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
(Output)Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
(Output) Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal	Laporan	1	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	tumbuhan													
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.885.000.000		11.675.000.000		12.245.000.000		13.445.000.000		14.045.000.000	
3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
(Output) Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap	%		100	4.760.000.000	100	5.390.000.000	100	5.960.000.000	100	6.650.000.000	100	7.150.000.000	
3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
(Output) Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	%		100	1.310.000.000	100	1.570.000.000	100	1.580.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
(Output) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	-	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tangkap (Output) Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
(Output) Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	11	10	750.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.00	0
3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	%		100	1.850.000.000	100	1.700.000.000	100	1.750.000.000	100	1.800.000.000	100	1.800.000.000	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
(Output) Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	-	50	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
(Output) Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	1	1	250.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
(Output) Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	-	1	50.000.000	2	100.000.000	3	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Usaha														
Penyediaan Sarana dan Prasarana														
Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
(Output) Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit		5	1.500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	
Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil													
3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
(Output) Meningkatnya Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Peningkatan Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	%		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
(Output) Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
(Output) Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau,														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	%		100	50.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
(Output) Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
(Output) Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)														
(Output) Diterbitkannya rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap														
(Output) Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap														
(Output) Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia	Dokumen	-	1	50.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3 25 03 2.05 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
(Output) Meningkatnya Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	%		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
(Output) Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)														
(Output) Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 25 03 2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Meningkatkan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
(Output) Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)														
(Output) Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomend asi	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 25 03 3.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatkan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	%		100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100	3.000.000.0 00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
(Output) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha	unit	-	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	1	3.000.000.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Nelayan Skala Kecil	Nelayan Skala Kecil													
3 25 03 3.07 Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan														
(Output) Meningkatnya Pencatatan kapal perikanan	Persentase Peningkatan Pencatatan kapal perikanan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.														
(Output) Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.														
(Output) Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 25 03 3.08 Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota														
(Output) Meningkatnya Pencatatan kapal perikanan	Persentase Peningkatan Pencatatan kapal perikanan	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota														
(Output) Terlaksananya Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencatatan kapal kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 25 03 3.09 Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota														
(Output) Meningkatnya Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	Persentase Peningkatan Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota														
(Output) Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan	Dokumen												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah Sungai													
Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota														
(Output) Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 25 03 3.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota														
(Output) Meningkatnya Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	Persentase Peningkatan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota														
(Output) Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(satu) daerah kabupaten/kota	diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota													
Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota														
(Output) Diterbitkannya Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
(Output) Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	%		100	3.450.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	4.100.000.000	100	4.100.000.000	
3 25 04 2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/ atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/ atau Tenaga Kerja Asing	Rekomend asi												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota														
(Output) Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Rekomend asi	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
(Output) Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya IkanPemberdayaan Pembudi Daya Ikan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan	%		100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
(Output) Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	-	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	-	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
(Output) Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
(Output) Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatiha	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	-	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	
3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi	Persentase Peningkatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi	%		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daya Ikan Kecil (TDPIK)	Daya Ikan Kecil (TDPIK)													
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomend asi	-											
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomend asi	-											
Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota														
(Output) Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan	Rekomend asi	-											

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berusaha bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota													
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan														
(Output) Meningkatnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	%		100	2.450.000.000	100	2.600.000.000	100	2.600.000.000	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	3	150.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	11 pokdakan	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
(Output) Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	-	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
(Output) Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Perencanaan,														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
(Output) Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan														
(Output) Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Unit	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
(Output) Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Meningkatkan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	%		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
Operasi Kapal Pengawas Perikanan														
(Output) Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan	Hari Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
(Output) Terawasnya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	-	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat														
(Output) Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
(Output) Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	-	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
diawasi														
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
(Output) Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan														
(Output) Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan														
(Output) Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota														
(Output) Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Perkara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Ekstraksi Garam														
(Output) Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 25 05 3.02 Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota														
(Output) Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangan		%		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani														
(Output) Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wiilayah kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani														
(Output) Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wiilayah kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
(Output) Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	%		100	2.525.000.000	100	2.535.000.000	100	2.535.000.000	100	2.545.000.000	100	2.645.000.000	
3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil														
(Output) Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri														
(Output) Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	Dokumen	-											
Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan														
(Output) Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rekomend asi	-											
Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko														
(Output) Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan	Rekomend asi	-											

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko													
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
(Output) Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
(Output) Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
(Output) Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%			1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
(Output) Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ton	1 kegiatan	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota														
(Output) Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	-	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	
3 25 06 3.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
(Output) Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	%		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
(Output) Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Unit Usaha	-	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	
3 25 06 3.05 Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Meningkatnya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Persentase Peningkatan Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	%		100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	
Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
(Output) Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel		10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	
3 25 06 3.06 Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
(Output) Meningkatnya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Persentase Peningkatan Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	%		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
(Output) Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro	kg/kap/ta hun	18	20	250.000.000	21	250.000.000	22	250.000.000	24	250.000.000	26	250.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	dan skala usaha kecil													
3 25 06 3.07 Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan														
(Output) Tersedianya prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang tersedia	%		100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	
Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
(Output) Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	unit		5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	600.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3 25 06 3.08 Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
(Output) Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang bersertifikat GMP	Persentase Peningkatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang bersertifikat GMP	%		100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	
Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
(Output) Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Rekomendasi	-	5	50.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	
3 25 06 3.09 Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Meningkatnya Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Persentase Peningkatan Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	%		100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
(Output) Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi	Unit	-	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					80.884.271.000		106.483.471.000		126.883.471.000		154.148.471.000		174.163.471.000	
3.27.02 – PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
(Outcome) Meningkatnya Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%		100	12.180.000.000	100	12.540.000.000	100	12.840.000.000	100	13.155.000.000	100	13.470.000.000	
3.27.02.2.01 – Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian														
(Output) Meningkatnya Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Penyediaan Sarana Pertanian	%		100	1.330.000.000	100	1.640.000.000	100	1.890.000.000	100	2.155.000.000	100	2.420.000.000	
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3.27.02.2.01.0002	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
(Output) Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	
3.27.02.2.01.0003 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak													
(Output) Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih		Ton	1	1	200.000.000	2	300.000.000	3	400.000.000	4	500.000.000	5	600.000.000	
3.27.02.2.01.0004 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak													
(Output) Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek		Setek	100	100	50.000.000	150	75.000.000	175	80.000.000	180	90.000.000	185	100.000.000	
3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan													
(Output) Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan		Laporan	39	39	30.000.000	39	35.000.000	39	40.000.000	39	45.000.000	39	50.000.000	
3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sarana Pascapanen Perkebunan	pascapanen Perkebunan													
(Output) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan		Laporan	39	39	30.000.000	39	35.000.000	39	40.000.000	39	45.000.000	39	50.000.000	
3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura													
(Output) Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura		Laporan	39	39	30.000.000	39	35.000.000	39	40.000.000	39	45.000.000	39	50.000.000	
3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang													
(Output) Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang		Batang	100	100	50.000.000	150	75.000.000	175	80.000.000	180	90.000.000	185	100.000.000	
3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak													
(Output) Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang		Batang	100	100	50.000.000	150	75.000.000	175	80.000.000	180	90.000.000	185	100.000.000	
3.27.02.2.01.0010 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh													
(Output) Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh		Mata	50	50	50.000.000	60	60.000.000	70	70.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	
3.27.02.2.01.0011 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji		Gram	50	50	50.000.000	60	60.000.000	70	70.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	
3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan													
(Output) Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan		Laporan	39	39	30.000.000	39	35.000.000	39	40.000.000	39	45.000.000	39	50.000.000	
3.27.02.2.01.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek													
(Output) Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek		Setek	50	50	50.000.000	60	60.000.000	70	70.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	
3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan													
(Output) Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan		Laporan	39	39	30.000.000	39	35.000.000	39	40.000.000	39	45.000.000	39	50.000.000	
3.27.02.2.01.0015 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak													
(Output) Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi		Ton	1	1	50.000.000	2	60.000.000	3	70.000.000	4	80.000.000	5	90.000.000	
3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura													
(Output) Terawasinya		Laporan												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penggunaan sarana pascapanen hortikultura 3.27.02.2.01.0017			39	39	30.000.000	39	35.000.000	39	40.000.000	39	45.000.000	39	50.000.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan													
(Output) Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan		Anakan	50	50	50.000.000	60	60.000.000	70	70.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	
3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan, dan Mikro Organisme	%		100	275.000.000	100	325.000.000	100	375.000.000	100	425.000.000	100	475.000.000	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
(Output) Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
(Output) Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
(Output) Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1	5	200.000.000	10	250.000.000	15	300.000.000	20	350.000.000	25	400.000.000	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	%		100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
(Output) Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak														
(Output) Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer														
(Output) Meningkatnya Mutu dan Kualitas Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
(Output) Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan														
(Output) Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Kasus	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Mutu dan Kualitas Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak														
(Output) Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														
(Output) Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak														
(Output) Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
(Output) Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
(Output) Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain														
(Output) Meningkatnya Mutu dan Kualitas Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya	Persentase Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1	%		100	10.200.000.000	100	10.200.000.000	100	10.200.000.000	100	10.200.000.000	100	10.200.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain													
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain														
(Output) Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Ton	7	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain														
(Output) Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain	Ekor	300	50.000	10.000.000.000	50.000	10.000.000.000	50.000	10.000.000.000	50.000	10.000.000.000	50.000	10.000.000.000	
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain														
(Output) Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain	Dosis	-	3.000	100.000.000	3.000	100.000.000	3.000	100.000.000	3.000	100.000.000	3.000	100.000.000	
3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
(Output) Meningkatnya Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%		100	60.850.000.000	100	85.150.000.000	100	105.050.000.000	100	131.800.000.000	100	152.300.000.000	
3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian														
(Output) Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	%		100	21.200.000.000	100	33.850.000.000	100	46.500.000.000	100	59.150.000.000	100	71.950.000.000	
Koordinasi dan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
(Output) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
(Output) Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha		38.000	1.000.000.000	38.000	1.500.000.000	38.000	2.000.000.000	38.000	2.500.000.000	38.000	3.000.000.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														
(Output) Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit		100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
(Output) Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit		150	750.000.000	150	750.000.000	150	750.000.000	150	750.000.000	150	750.000.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
(Output) Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit		150	750.000.000	150	750.000.000	150	750.000.000	150	750.000.000	150	750.000.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan														
(Output) Terkendali dan termanfaatkannya	Jumlah prasarana pascapanen peternakan	Unit		5	750.000.000	6	900.000.000	7	1.050.000.000	8	1.200.000.000	10	1.500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
prasarana pascapanen Peternakan	yang dikendalikan dan dimanfaatkan												0	
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan														
(Output) terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Unit		5	3.000.000.000	10	6.000.000.000	15	9.000.000.000	20	12.000.000.000	25	15.000.000.0 00	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
(Output) Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit		5	3.000.000.000	10	6.000.000.000	15	9.000.000.000	20	12.000.000.000	25	15.000.000.0 00	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
(Output) Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit		5	3.000.000.000	10	6.000.000.000	15	9.000.000.000	20	12.000.000.000	25	15.000.000.0 00	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
(Output) Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit		5	3.000.000.000	10	6.000.000.000	15	9.000.000.000	20	12.000.000.000	25	15.000.000.0 00	
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
spasial di Kabupaten/Kota														
(Output) Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen		1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
(Output) Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen		1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														
(Output) Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen		1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	
Penyusunan Action Plan Pengembangan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Output) Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen		1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	
3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian														
(Output) Persentase Peningkatan Infrastruktur Pertanian	Meningkatnya Infrastruktur Pertanian	%		100	39.050.000.000	100	50.700.000.000	100	57.950.000.000	100	72.050.000.000	100	79.750.000. 000	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
(Output) Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		7	1.400.000.000	10	2.000.000.000	13	2.600.000.000	15	3.000.000.000	17	3.400.000.00 0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
(Output) Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		20	4.000.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.00 0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
(Output) Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		10	2.000.000.000	13	2.600.000.000	15	3.000.000.000	17	3.400.000.000	20	4.000.000.00 0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air														
(Output) Terbangun,	Jumlah Pintu Air yang	Unit												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			4	800.000.000	6	1.200.000.000	9	1.800.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
(Output) Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		2	1.800.000.000	4	3.600.000.000	5	4.500.000.000	7	6.300.000.000	10	9.000.000.000	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
(Output) Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		5	20.000.000.000	6	24.000.000.000	7	28.000.000.000	9	36.000.000.000	10	40.000.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
(Output) terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit		25	5.000.000.000	30	6.000.000.000	30	6.000.000.000	30	6.000.000.000	30	6.000.000.000	
Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak														
(Output) Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	Unit		1	750.000.000	2	1.500.000.000	3	2.250.000.000	3	2.250.000.000	3	2.250.000.000	
Pembangunan,														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
(Output) Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit		1	750.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	3	2.250.000.000	3	2.250.000.000	
Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan														
(Output) Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi	Unit		1	750.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	3	2.250.000.000	3	2.250.000.000	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas														
(Output) Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit		1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	2	1.600.000.000	2	1.600.000.000	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
(Output) Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	
3 27 03 2.03														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
(Output) Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	%		100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
(Output) Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
(Output) Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3 27 03 2.04 Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum														
(Output) Meningkatnya Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Persentase Peningkatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum														
(Output) Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha	1	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	
Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha	1	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum														
(Output) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
(Output) Meningkatnya Kesehatanan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatanan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	
3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	%		100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
(Output) Tertanggulangnya	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Terkendali													
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														
(Output) Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
(Output) Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	39	100.000.000	39	100.000.000	39	100.000.000	39	100.000.000	39	100.000.000	
Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
(Output) Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis														
(Output) Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
3 27 04 2.02														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatkan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	%		100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
(Output) Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pengawasan Peredaran Produk Hewan														
(Output) Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM														
(Output) Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														
(Output) Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														
(Output) Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
(Output) Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	3	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner														
(Output) Meningkatnya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	Persentase Peningkatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	%		100	455.000.000	100	455.000.000	100	455.000.000	100	455.000.000	100	455.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesehatan Masyarakat Veteriner													
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
(Output) Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	3	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner														
(Output) Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
(Output) Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha		50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	
Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
(Output) Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan														
(Output) Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang		12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan														
(Output) Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan														
(Output) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Produk		25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
(Output) Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3 27 04 2.05														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan														
(Output) Meningkatnya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya														
(Output) Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha														
(Output) Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit		10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	
3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
(Output) Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang Terkendali dan Tertanggulangi	%		100	720.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	
3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota														
(Output) Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%		100	720.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
(Output) Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	
3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
(Output) Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha		1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	
3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
(Output) Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha		1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	
3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bersifat Zoonosis (Output) Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
(Output) Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	JJumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penanggulangan Bencana Alam Bidang Pernakan dan kesehatan hewan														
(Output) Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Pernakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Pernakan dan Kesehatan Hewan	laporan		1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	
3.27.05 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN														
Meningkatnya Usaha Pernakan Yang Berizin	Persentase Peningkatan Perizinan Usaha Pernakan	%		100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
3.27.05.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pernakan	Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Pernakan	%		100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														
(Output) Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.27.05.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														
(Output)Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak														
(Output) Terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/ budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Unit		1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit	Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit	%		100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan													
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														
(Output) Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan														
(Output) Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan														
(Output) Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan														
(Output) Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan														
(Output) Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi Hewan	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
3 27 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan														
(Output) Meningkatnya Izin Usaha Pengecer Peternakan	Persentase Peningkatan Izin Usaha Pengecer Peternakan	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan														
(Output) Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan														
(Output) Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengecer Obat Hewan	yang Diawasi													
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
(Output) Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian	%		100	5.054.271.000	100	5.993.471.000	100	6.193.471.000	100	6.393.471.000	100	5.593.471.0 00	
3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian														
(Output) Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%		100	5.054.271.000	100	5.993.471.000	100	6.193.471.000	100	6.393.471.000	100	5.593.471.0 00	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
(Output) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	39	39	2.654.271.000	39	2.654.271.000	39	2.654.271.000	39	2.654.271.000	39	2.654.271.00 0	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
(Output) Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	25	45	1.550.000.000	45	2.089.200.000	45	2.089.200.000	45	2.089.200.000	45	2.089.200.00 0	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
(Output) Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit		6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (Output) Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit		8	400.000.000	8	800.000.000	8	1.000.000.000	8	1.200.000.000	8	400.000.000	
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian (Output) Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Unit		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota (Output) Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (Output) Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Output) Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Unit		6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					48.061.944.984		52.056.154.315		56.159.413.459		60.731.975.847		65.852.634. 696	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Output) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	73,99	74	48.061.944.984	74,25	52.056.154.315	74,50	56.159.413.459	74,75	60.731.975.847	75	65.852.634. 696	
X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
(Output) Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		24	1.155.168.750	24	1.386.202.500	24	1.663.443.000	24	1.996.131.600	24	2.395.357.9 20	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
(Output) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	195.762.500	5	234.915.000	5	281.898.000	5	338.277.600	5	405.933.120	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
(Output) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	N/A	4	75.000.000	4	90.000.000	4	108.000.000	4	129.600.000	4	155.520.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD														
(Output) Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	4	75.000.000	4	90.000.000	4	108.000.000	4	129.600.000	4	155.520.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
(Output) Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	N/A	4	75.000.000	4	90.000.000	4	108.000.000	4	129.600.000	4	155.520.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
(Output) Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	4	289.406.250	4	347.287.500	4	416.745.000	4	500.094.000	4	600.112.800	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
(Output) Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	115.762.500	1	138.915.000	1	166.698.000	1	200.037.600	1	240.045.120	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
(Output) Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	N/A	1	75.000.000	1	90.000.000	1	108.000.000	1	129.600.000	1	155.520.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
(Output) Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	Data	N/A	1	75.000.000	1	90.000.000	1	108.000.000	1	129.600.000	1	155.520.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah													
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
(Output) Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	N/A	1	150.000.000	1	180.000.000	1	216.000.000	1	259.200.000	1	311.040.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
(Output) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	N/A	2	75.000.000	2	90.000.000	2	108.000.000	2	129.600.000	2	155.520.000	
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
(Output) Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Subtansi	N/A	1	75.000.000	1	90.000.000	1	108.000.000	1	129.600.000	1	155.520.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
(Output) Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	N/A	1	75.000.000	1	90.000.000	1	108.000.000	1	129.600.000	1	155.520.000	
X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
(Output) Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Dokumen		8	38.441.487.103	8	40.414.811.458	8	42.458.802.031	8	44.603.242.132	8	46.853.154.239	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
(Output) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	302	302	38.266.487.103	302	40.179.811.458	302	42.188.802.031	302	44.298.242.132	302	46.513.154.239	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
(Output) Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
(Output) Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SKPD													
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
(Output) Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
(Output) Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
(Output) Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
(Output) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Se mesteran SKPD	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
mesteran SKPD														
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
(Output) Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
X XX 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
(Output) Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		7	175.000.000	7	210.000.000	7	245.000.000	7	280.000.000	7	315.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
(Output) Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
(Output) Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
(Output) Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang Milik Daerah pada SKPD														
(Output) Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
(Output) Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
(Output) Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
(Output) Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP														
X XX 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
(Output) Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen		7	175.000.000	7	210.000.000	7	245.000.000	7	280.000.000	7	315.000.000	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
(Output) Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
(Output) Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
(Output) Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pengolahan Data Retribusi Daerah														
(Output) Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penetapan Wajib Retribusi Daerah														
(Output) Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
(Output) Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daera	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
(Output) Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		11	491.328.996	11	589.594.795	11	698.513.754	11	820.216.504	11	957.259.805	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
(Output) Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kelengkapannya (Output) Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
(Output) Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
(Output) Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
(Output) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A	1	28.940.625	1	34.728.750	1	41.674.500	1	50.009.400	1	60.011.280	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
(Output) Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	N/A	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
(Output) Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pemindahan Tugas ASN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
(Output) Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan														
(Output) Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
(Output) Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	100	237.388.371	100	284.866.045	100	341.839.254	100	410.207.104	100	492.248.525	
X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
(Output) Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		11	1.420.025.531	11	1.704.030.637	11	2.039.836.765	11	2.437.804.118	11	2.910.364.941	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
(Output) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penyediaan Peralatan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Perlengkapan Kantor														
(Output) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	216.654.289	1	259.985.147	1	311.982.177	1	374.378.612	1	449.254.334	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
(Output) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
(Output) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
(Output) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	107.052.613	1	128.463.136	1	154.155.763	1	184.986.916	1	221.984.299	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
(Output) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	36.465.188	1	43.758.225	1	52.509.870	1	63.011.844	1	75.614.213	
Penyediaan Bahan/ Material														
(Output) Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	1	1	240.965.849	1	289.159.018	1	346.990.822	1	416.388.986	1	499.666.784	
Fasilitasi Kunjungan Tamu														
(Output) Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	192.930.375	1	231.516.450	1	277.819.740	1	333.383.688	1	400.060.426	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	500.957.217	1	601.148.661	1	721.378.393	1	865.654.071	1	1.038.784.886	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
(Output) Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
(Output) Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
(Output) Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Unit		11	1.541.434.349	11	1.769.721.218	11	1.941.665.462	11	2.141.998.554	11	2.376.398.265	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
(Output) Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	N/A	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	
Pengadaan Alat Besar														
(Output) Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	N/A	1	100.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
(Output) Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	N/A	1	100.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	
Pengadaan Mebel														
(Output) Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	160.101.862	1	192.122.234	1	230.546.681	1	276.656.017	1	331.987.221	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
(Output) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	1	125.000.000	1	150.000.000	1	180.000.000	1	216.000.000	1	259.200.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
(Output) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	125.000.000	1	150.000.000	1	180.000.000	1	216.000.000	1	259.200.000	
Pengadaan Aset Tak Berwujud														
(Output) Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
(Output) Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
(Output) Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	75.000.000	1	90.000.000	1	108.000.000	1	129.600.000	1	155.520.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
(Output) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	106.332.487	1	127.598.984	1	153.118.781	1	183.742.537	1	220.491.045	
X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
(Output) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		4	3.357.747.950	4	4.029.297.540	4	4.834.157.048	4	5.798.988.457	4	6.955.786.149	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
(Output) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
(Output) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	1	707.747.950	1	849.297.540	1	1.019.157.048	1	1.222.988.457	1	1.467.586.149	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	1	125.000.000	1	150.000.000	1	180.000.000	1	216.000.000	1	259.200.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
(Output) Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.500.000.000	1	3.000.000.000	1	3.600.000.000	1	4.320.000.000	1	5.184.000.000	
X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
(Output) Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara			23	913.989.806	23	1.323.581.167	23	1.581.297.400	23	1.883.556.880	23	2.239.268.256	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
(Output) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	394.290.472	12	473.148.567	12	567.778.280	12	681.333.936	12	817.600.724	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
(Output) Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
(Output) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
(Output) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pemeliharaan Mebel														
(Output) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	1	33.693.833	1	40.432.600	1	48.519.120	1	58.222.944	1	69.867.533	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
(Output) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
(Output) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
(Output) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1	111.005.501	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	1	345.600.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
(Output) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1	100.000.000	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	1	345.600.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1	100.000.000	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	1	345.600.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
(Output) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
X XX 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
(Output) Meningkatnya Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Ditingkatkan	Unit Kerja		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
(Output) Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penataan Organisasi														
(Output) Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen		5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
(Output) Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output) Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
(Output) Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
(Output) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
(Output) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah DPKPP Kabupaten Tasikmalaya

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung	Kegiatan
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Sub Kegiatan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sub Kegiatan
			Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Sub Kegiatan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kegiatan
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Sub Kegiatan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sub Kegiatan
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kegiatan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sub Kegiatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Perbanyakkan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Sub Kegiatan
			Perbanyakkan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Sub Kegiatan
			Perbanyakkan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Sub Kegiatan
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Sub Kegiatan
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Sub Kegiatan
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kegiatan
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Sub Kegiatan
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Sub Kegiatan
			Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Sub Kegiatan
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Sub Kegiatan
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Sub Kegiatan
			Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Sub Kegiatan
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Sub Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Sub Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Sub Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Sub Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Sub Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Sub Kegiatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Sub Kegiatan
			Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Sub Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sub Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Sub Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Sub Kegiatan
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Sub Kegiatan
7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sub Kegiatan
8	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kegiatan
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Sub Kegiatan
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Sub Kegiatan
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Usaha Pertanian Yang Berizin	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kegiatan
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Sub Kegiatan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kegiatan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Sub Kegiatan
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Sub Kegiatan
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Sub Kegiatan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana	Sub Kegiatan
			Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Sub Kegiatan
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kegiatan
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Sub Kegiatan
12	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Sub Kegiatan
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Sub Kegiatan
			Pengawasan Ekstraksi Garam	Sub Kegiatan
13	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kegiatan
			Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Sub Kegiatan
			Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kegiatan
			Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Sub Kegiatan
			Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kegiatan
			Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Sub Kegiatan
14	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Sub Kegiatan
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Sub Kegiatan
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sub Kegiatan
			Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Sub Kegiatan
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Sub Kegiatan

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Tasikmalaya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (IKK)	Poin	88,66	88,88	89,11	89,35	89,6	89,86	Indikator Tujuan
2	Presentase Tingkat Konsumsi Energi (%)	%	96,23	96,32	96,42	96,52	96,61	96,71	Indikator Sasaran
3	Presentase Tingkat Konsumsi Protein (%)	%	102,94	103,05	103,15	103,25	103,36	103,46	Indikator Sasaran
4	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Rp	18.692,86	19.066,71	19.448,05	19.837,01	20.233,75	20.638,42	Indikator Tujuan
5	Persentase Kontribusi Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Target Provinsi Jawa Barat	%	6,25	6,26	6,27	6,28	6,29	6,30	Indikator Sasaran
6	Persentase Kontribusi Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Tasikmalaya terhadap Target Provinsi Jawa Barat	%	4,67	4,68	4,69	4,70	4,71	4,72	Indikator Sasaran
7	Persentase Kontribusi Produksi Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Target Provinsi Jawa Barat	%	19,29	19,30	19,31	19,32	19,33	19,34	Indikator Sasaran
8	Persentase Kontribusi Produksi Peternakan yang	%	1,83	1,84	1,85	1,86	1,87	1,88	Indikator



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) Kabupaten Tasikmalaya terhadap Target Provinsi Jawa Barat								Sasaran
9	Jumlah Prasarana dan Sarana Pertanian yang dibangun	Unit	583	589	595	601	607	613	Indikator Sasaran
10	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,50	1,50	1,65	1,82	2,00	2,20	Indikator Sasaran
11	Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	%	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	Indikator Sasaran

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPKPP Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci DPKPP Kabupaten Tasikmalaya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	88,66	88,88	89,11	89,35	89,60	89,86	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersedian	Poin	81,16	82,18	83,21	84,25	85,30	86,36	
3	Peningkatan Produksi perikanan	Ton	85.892	87.181	88.619	90.232	92.037	94.062	
4	Angka Konsumsi ikan	kg/kapita	18,80	20,00	21,29	22,65	24,11	24,15	
5	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45	
6	Peningkatan produksi tanaman pangan	Ton	725.156	725.882	726.607	727.334	728.061	728.789	
7	Peningkatan produksi hortikultura	Ton	267.608	267.876	268.144	268.412	268.680	268.949	
8	Peningkatan produksi perkebunan	Ton	57.608	57.665	57.723	57.781	57.838	57.896	
9	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Ton	40.227	40.513	40.837	41.163	41.513	41.866	

Sumber: Data DPKPP diolah Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah pembangunan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, pangan, dan perikanan.

Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk perubahan iklim, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikannya sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta sebagai alat evaluasi dalam mengukur capaian pembangunan. Semoga dokumen ini menjadi pijakan yang kokoh dalam mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Ketentuan transisi sebagaimana dimaksud bersifat adaptif dan diberlakukan dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2029.

BUPATI TASIKMALAYA,



CECEP NURUL YAKIN